

EDISI #17 FEBRUARI 2022



**INVESTASI AS
TERBESAR
KEDUA SETELAH
FREEPORT**

**TIMBANG
TIMANG ANIES
BASWEDAN**

**UNTUNG RUGI
DAN POLITIK
IBU KOTA BARU**

**TETIRAH
PEMIMPIN
INDONESIA DAN
SINGAPURA**

**KUNJUNGAN
KE SUMSEL
SIAPKAN ENERGI
MASA DEPAN**

**BABAK BARU
PINDAH IBU KOTA**

IKN IDE BRILIAN JOKOWI

**SABAR DULU,
TAMAN MINI
SEDANG RENOVASI**



Rp75.000,-

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

GAMANG

Tiba-tiba saja kegamangan menyergap. Begitulah kesan yang tertangkap. Ketika para wakil rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi UU. Pada Selasa, 18 Januari 2022.

Harap maklum jika kegamangan terjadi. Pengesahan itu pertanda perubahan besar akan terjadi. Begitu banyak yang terdampak olehnya. Pusat kegiatan pemerintah berpindah berarti personelnnya pun ikut hijrah. Kegamangan pun muncul karena situasi dan kondisi yang belum jelas di lokasi baru.

Baru namanya saja yang sudah jelas: Nusantara. Nama lokal sebelumnya adalah Sepaku, wilayah yang masuk administrasi dua pemerintah kabupaten di Kalimantan Timur: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Sementara kabar negatif sekitar dan di seputar calon Kota Nusantara bertebaran di aneka saluran media. Tak terkecuali media sosial. Katakanlah soal banjir berulang di kawasan Ibu Kota baru itu. Kemudian juga kecelakaan di turunan Rapak, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan. Tambahan pula penangkapan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.

Namun, pengesahan UU Ibu Kota Negara itu berarti pemindahan Ibu Kota dari Jakarta segera menjadi hukum yang berlaku. Malah Pemerintah menargetkan sekitar 500 ribu Pegawai Negeri Sipil kementerian dan lembaga dipindahkan ke kawasan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur pada tahap awal pembangunan periode 2022-2024.

Perpindahan itu seiring dengan pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR dan perumahan di tahap awal pembangunan. Rencana yang lebih jauh, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berniat merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-79 di kawasan IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang. Berarti jadilah pindah Ibu Kota itu.

Pindah memang bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu akan banyak yang gamang.

Yang pindah gamang tentang situasi dan kondisi baru di sana. Lalu yang ditinggal pindah pun gamang bagaimana menghadapi perubahan itu. Namun, mudah-mudahan saja kegamangan tadi hanya sementara.

Berpindah sudah menjadi fitrah manusia. Dari kandungan bunda ke dunia nyata. Dari dunia fana ke ketiadaan. Ada apa dengan gamang? ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)
Telp / Fax : 021-278 123 97

Twitter : @1nfoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
FEBRUARI
2022



6 INFO UTAMA

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara oleh DPR menjadi babak baru pemindahan Ibu Kota dari Jakarta. Dengan landasan hukum yang jelas, apakah kegamangan akan terenyahkan?



18 INFO SUMSEL

Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengingatkan agar pemerintah kabupaten dan kota kembali meningkatkan kesiapsiagaan menyusul meningkatnya jumlah kasus penderita Covid-19 varian Omicron yang saat ini telah terjadi di Indonesia seperti di Pulau Jawa dan Bali.



24 INFO TANGSEL

Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus mengencakan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun serta dosis ketiga atau booster kepada masyarakat. Upaya percepatan vaksinasi dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak agar bisa mencapai target.

86 INFO SELEBRITI

Semakin jelas sekarang, selera sebagian besar pengguna media sosial Indonesia adalah tayangan hiburan. Karena itu, 10 saluran (channel) dunia hiburan pula yang paling banyak memiliki penonton berlangganan (subscriber).





56 INFO EKONOMI

Pandemi Covid-19 belum habis-habis. Justru karena itu program Desa BRllian semakin relevan menjadi booster ekonomi terutama di pedesaan.



64 INFO POLITIK

Menimbang belum tentu menimang Anies Rasyid Baswedan. Sedangkan Anies bilang menunggu azan. Ini memang soal Calon Presiden.



88 INFO KHUSUS

Acaranya bertajuk Leader's Retreat, bolehlah diindonesiakan sebagai tetirah atau pergi sementara waktu. Namun 5th Singapore-Indonesia Leader's Retreat adalah acara serius yang berkaitan dengan perjanjian bilateral kedua negara yang mencerminkan keunikan hubungan antartetangga di kawasan.

- 3 DARI REDAKSI
- 30 INFO KALTIM
- 34 INFO BANTEN
- 38 INFO JAMBI
- 42 INFO NUSANTARA
- 44 INFO NASIONAL
- 48 INFO SOSOK
- 52 INFO INOVASI
- 68 INFO TEKNOLOGI
- 76 INFO SPORT
- 80 INFO WISATA
- 98 KAJI





JALAN GAMANG MENUJU IBU KOTA BARU

Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara oleh DPR menjadi babak baru pemindahan Ibu Kota dari Jakarta. Dengan landasan hukum yang jelas, apakah kegamangan akan terenyahkan?

Mungkin untuk lebih meyakinkan atau menjadi bahan pembandingan, Tim Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI yang dipimpin Ketua Pansus IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengunjungi Kota Mandiri BSD City dan Alam Sutera, di Provinsi Banten. Meskipun hari itu, Minggu, 16 Januari 2022, libur, justru kunjungan itu menjadi tanda pengesahan UU IKN menjadi agenda mendesak.

"Tujuan kunjungan ini untuk memahami perencanaan pembangunan kawasan BSD City dan Alam Sutera. Hal-hal yang dipelajari meliputi inovasi,

pengelolaan, konsep berkelanjutan atau sustainability, hingga sistem keamanan kawasan," kata Doli.

Menurut dia, IKN baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur memiliki konsep smart city, sustainable city dan green city. Menurutnya, langkah meninjau BSD dan Alam Sutera dilakukan karena dua daerah itu dikategorikan memenuhi konsep terkait IKN baru.

Informasi dan data yang dihimpun dalam tinjauan lapangan tersebut, lanjut Doli, akan digunakan sebagai salah satu masukan penting untuk perencanaan pembangunan IKN. "Peninjauan ini penting dilakukan karena kita akan bahas soal master plan IKN baru. Adapun konsep pembangunan disini 70



persen itu green city, konsep ini kan sesuai dengan pengebagan kawasan di IKN baru yang mempertahankan kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Adapun beberapa lokasi yang ditinjau Pansus IKN ialah, The Lloyd Alam Sutera untuk melihat percontohan low-rise apartment, hingga meninjau panic button, sistem keamanan yang terhubung dengan command center untuk memberi respons cepat pada pelaporan masyarakat. Setelah itu dilanjutkan ke Green Office Park 9 dan The Breeze untuk meninjau inovasi mall without wall dengan memanfaatkan sistem ventilasi yang meminimalisasi penggunaan pendingin ruangan dan lampu.

Kunjungan rombongan Pansus DPR itu sepertinya jalan-jalan di akhir pekan. Namun, keesokan harinya, Senin, 17 Januari 2022, Pansus langsung menggelar rapat sejak pukul 11.00 WIB, sementara rapat paripurna DPR diagendakan berlangsung Selasa, 18 Januari 2022. Semakin jelas saja arahnya.

Rapat sempat diskors sekitar pukul 17.00 WIB, dan kembali dibuka pada

19.00 WIB. Menjelang pukul 23.00 WIB, rapat di tingkat Pansus itu telah menyepakati sejumlah pasal krusial dalam RUU. Walhasil, Tim Pansus menyepakati pembahasan dilanjutkan ke tingkat Panja agar bisa dibawa ke Paripurna.

Di tingkat Panja, rapat semula diagendakan rampung pukul 1.30 WIB. Namun, rapat dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi, DPD, dan pemerintah itu molor dan baru selesai hingga pengesahan lebih dari 3.00 WIB.

Selama 16 jam, rapat menyepakati sejumlah hal terkait RUU IKN. Antara lain, nama ibu kota Nusantara, bentuk atau sistem pemerintahan, sistem pendanaan, hingga sumber pembiayaan. Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU IKN dibahas di tingkat dua atau pengesahan di Paripurna dan menjadi UU. Sedangkan, fraksi oposisi lain, Demokrat, mendukung dengan sejumlah catatan kritis.

Alhasil, Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani benar-benar menyetujui pengesahan RUU IKN dalam rapat paripurna. “Kami akan menanyakan

sekali lagi kepada seluruh Anggota Dewan, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan meminta persetujuan peserta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.

“Interupsi bu ketua,” terdengar seorang anggota di rapat paripurna berseru.

Mendengar permintaan interupsi, Puan sempat terlihat menahan untuk mengetuk palu. Ia terlihat melihat ke arah meja, namun beberapa saat palu ia ketukan sebanyak satu kali.

Toh permintaan interupsi terdengar kembali di ruang paripurna. “Interupsi bu ketua.”

Menanggapi hal itu, Puan menegaskan bahwa interupsi dilakukan nanti. “Iya nanti interupsi setelah ini ya bapak-bapak. Karena ada sembilan fraksi, satu yang tidak setuju. Artinya bisa kita sepakati bahwa delapan fraksi setuju dan artinya kita bisa setuju. Setuju ya?” tanya Puan dijawab dengan seruan setuju di ruang Rapat Paripurna itu.

Doli Kurnia mengatakan bahwa Pan-



• INFO UTAMA

sus bertekad mengebut pembahasan RUU IKN agar segera dapat menjadi payung hukum agar para investor mau terlibat mendanai pembangunan ibu kota baru. Dalam laporannya di sidang paripurna, Doli menjelaskan proses pembahasan RUU IKN di DPR dalam beberapa bulan terakhir.

Dia mengungkapkan pembahasan RUU IKN didasarkan pada keputusan rapat pimpinan DPR pada 3 Desember 2021 yang membahas surat Presiden tertanggal 29 September 2021 mengenai RUU itu. Rapat pimpinan DPR itu menyetujui agar diagendakan dalam rapat Badan Musyawarah untuk menugaskan panitia khusus (Pansus).

Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM dengan disertai tanggapan fraksi-fraksi dan DPD.

Kemudian dalam pembicaraan tingkat I pada rapat kerja bersama pemerintah pada 18 Januari pukul 00.30 WIB, dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi, pendapat Komite I DPD dan juga pemerintah terhadap pembahasan RUU IKN. "Pada pertemuan itu telah disepakati ibu kota negara yang baru diberi nama Nusantara, yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara," ungkap Doli.

Dalam rapat kerja tersebut, delapan fraksi (PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem,

tersebut ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Kamis, 27 Januari 2021.

Indra mengatakan, draf UU itu terdiri dari 11 Bab dan 44 Pasal. "Sudah diantar pukul 17.35 WIB," kata Indra.

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, Sekjen DPR menyerahkan draf UU dalam batas waktu tujuh hari setelah disahkan menjadi UU. Draft disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg untuk dikaji dalam waktu 30 hari.

Sedangkan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta mengatakan aturan turunan UU IKN akan segera difinalkan. Beleid turunan itu akan mengatur segala aspek teknis pendukung IKN.



"Selanjutnya rapat paripurna pada 7 Desember 2021 menetapkan pimpinan dan keanggotaan pansus untuk membahas RUU IKN bersama pemerintah," ujar Doli. Politikus Partai Golkar ini menyambung, pada 7 Desember itu juga secara resmi pansus mulai membahas RUU IKN dengan menggelar rapat kerja bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri

PKB, Demokrat, PAN, dan PPP) serta Komite I DPD RI menyatakan menerima hasil pembahasan RUU tentang IKN dan melanjutkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

Usai pengesahan itu, DPR menyerahkan naskah matang UU tersebut kepada pemerintah. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengantar draf UU

Beberapa antaranya menyangkut pelaksanaan pembangunan fisik, pendanaan, tata pengelolaan pemerintahan, masa transisi, dan tahapan relokasi. "Soal pemindahan juga akan didetailkan secara teknis dalam peraturan turunan tersebut," ujar Febry.

UU IKN dan regulasi turunannya menjadi basis krusial dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara.

Oleh sebab itu, pihaknya memastikan proses penyusunan regulasi disampaikan kepada publik secara transparan. "KSP akan memastikan proses penyusunan regulasi turunan dan tindak lanjut eksekusi pembangunan 'Nusantara' dipersiapkan dengan benar, agar target penyelesaian pada 2024 bisa tercapai," ujarnya.

Dengan pengesahan UU IKN oleh para wakil rakyat dan tindak lanjut pemerintah, pemindahan Ibu Kota Negara idealnya mengenyahkan kegamangan tentang kepastiannya. Tinggal pelaksanaannya yang justru menjadi kegamangan baru.

Masih banyak sumber kegamang-



an lain menyangkut pemindahan IKN. Dari sisi landasan hukum boleh jadi akan tuntas segera. Sedangkan pelaksanaannya memang memerlukan kepastian lagi.

Katakanlah yang sudah dikemukakan seperti pembangunan fisik, pendanaan, tata pengelolaan pemerintahan, masa transisi, dan tahapan relokasi. Tentu saja ini memerlukan rincian yang menyeluruh.

Dalam draft UU IKN, misalnya, Ibu Kota Nusantara akan berstatus pemerintah daerah khusus yang disebut otorita dan dipimpin oleh kepala otorita, setara menteri yang dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan, Otorita IKN akan melaksanakan pemerintahan daerah khusus, dan bentuk-bentuk kewenangan khusus. Otorita juga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang setingkat kementerian, dan hanya ada pemilu nasional. "Apakah menyalahi UU dasar atau tidak, saya berani mengatakan tidak, karena ruang itu dibuka dalam UUD... sebenarnya pasal 18 UUD menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kesatuan, sehingga wilayah Indonesia dibagi atas, bukan terdiri dari," kata Suharso.

Soal pendanaan, Suharso Monoarfa

"Program IKN bukan sekadar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif," ujar Presiden dalam Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Peresmian Pembukaan Rakernas ICMI secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, 29 Januari 2022.

Presiden menyampaikan pembangunan ibu kota negara menjadi bagian penting dari berbagai upaya transformasi struktural agar Indonesia makin kompetitif. IKN akan menghadirkan transformasi di berbagai bidang, seperti pengelolaan lingkungan, ekonomi, teknologi, kesehatan, serta pendidikan yang lebih baik. "IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara



menegaskan, pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN. Sebaliknya akan menambah aset negara. "Kita juga menghindari pembiayaan utang jangka panjang," tandasnya.

Boleh jadi kegamangan demi kegamangan yang berkembang membuat Presiden Joko Widodo merasa perlu menjelaskan langsung ihwal pemindahan Ibu Kota Negara ini. Jokowi menegaskan program IKN bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan, melainkan membangun ekonomi modern dan kehidupan sosial yang lebih adil.

kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas," ungkap Jokowi.

Tak hanya itu, Kepala Negara menyebutkan IKN akan menghadirkan tata sosial yang lebih majemuk dan toleran, serta menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia. Jokowi mengatakan program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung membutuhkan dukungan semua pihak.

Pemerintah dan wakil rakyat sudah sepakat. Meskipun kegamangan masih berlanjut. ●



UNTUNG-RUGI DAN POLITIK IBU KOTA BARU

Siapa mendapat apa dengan cara bagaimana, aspek penting politik praktis, melekat dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Bukan sekadar untung-rugi yang melibatkan kalangan bisnis, melainkan juga politisi.

Selain berdampak kegamangan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara tampak memicu reaksi emosional. Bahkan ekonom Faisal Basri mengaku tersinggung lantaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan geli terhadap kritiknya soal Ibu Kota Negara.

"Menteri Bappenas itu jangan naif lah, saya tersinggung terus terang. Jadi jangan mempertanyakan kredibilitas saya. Ya jadi personal kalau seperti itu; dan apakah data saya tidak valid? Faktanya itu ada semua, jadi jangan dianggap remeh itu semua," ungkap Faisal dalam acara 'Adu Perspektif' detikcom, Rabu, 26 Januari 2022.

Faisal memang mengkritik pedas pemerintah yang dinilai tergesa-gesa memindahkan ibu kota. Ia menyeru-

kan pelaksanaan audit lingkungan, terkait dengan lahan lokasi IKN yang dikelola Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan dan Sukanto Tanoto, konglomerat yang tersohor sebagai pendiri kelompok usaha Raja Garuda Mas.

Ekonom itu juga menyebut masih ada juga lubang-lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim dan Investasi. "Harusnya diaudit dulu, kerusakan lingkungannya berapa. Ada pembersihan dari dosa-dosa masa lalu juga. Nah ini semua harus jelas sebelum Pak Jokowi selesai, karena itu pemindahan Ibu Kota harus secepat mungkin supaya investor oligarki ini punya kepastian," ungkap Faisal.

Nah, menanggapi Faisal, Suharso

Monoarfa mengaku geli dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Faisal Basri. "Masa sederhana cara berpikirnya, menurut saya nggak pasti. Apalagi lahan di sana, dia bilang banyak dikuasai oleh ini-ini dan seterusnya. Saya kira beliau harus mencari tahu benar informasi mengenai lahan itu, penguasaan negara berapa, masyarakat berapa dan badan hukum berapa itu semua terbuka," jelas dia.

Menurut Suharso ada Undang-undang yang mengatur kepentingan publik di daerah tersebut. Karena itu tidak mungkin ada keuntungan yang didapatkan dari pemilik konsesi. Suharso mengharapkan Faisal bisa mengedukasi kontra pemindahan ibu kota ini dengan cara yang baik.

"Sebagai orang yang mengerti persoalannya mesti bisa memberikan edukasi, artinya kalau mau mengkritik oke. Pro dan kontra terhadap IKN itu sah-sah saja. Tapi bagaimana cara membawakan yang kontra dan yang pro supaya bisa diterima," ujarnya.

Terlepas dari itu, nama-nama pengusaha dan pejabat yang memegang konsesi di lahan yang menjadi lokasi kawasan Ibu Kota Negara memang sudah muncul sejak bertahun-tahun sebelumnya. Kajian koalisi masyarakat sipil terdiri dari sejumlah pegiat dan lembaga swadaya masyarakat yang terbit dengan tajuk 'Ibu Kota Baru Buat Siapa?' (2019), nama-nama Prabowo, Tanoto, Luhut sudah disebut.

Tak ketinggalan nama Yusril Ihza Mahendra, mantan menteri yang juga politisi Partai Bulan Bintang. Sebagai pemilik saham di perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah calon ibu kota negara baru, Yusril dan korporasinya dituding bakal mendapat keuntungan ekonomis dan politis.

LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Trend Asia, dan Forest Watch Indonesia menuding Yusril memiliki daya tawar kepada pemerintah karena ketua umum Partai Bulan Bintang itu merupakan ketua tim pengacara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam sengketa pemilihan presiden 2019.

Selain Yusril, kajian yang diklaim

berbasis data Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM itu juga menyebut nama Rezha Herwindo, anak Setya Novanto mantan Ketua Umum Partai Golkar yang menjadi terpidana perkara e-KTP. Proyek ibu kota baru juga dituding akan menguntungkan dua konglomerat Sukanto Tanoto dan Hashim Djojohadikusumo serta dua menteri yang juga pengusaha, yakni Prabowo Subi-

dapat keuntungan politik. Kalau tukar guling lahan, perusahaannya bisa saja mendapatkan lahan di daerah lain atau ikut dalam proyek pembangunan ibu kota baru."

"Hal-hal itu yang kami khawatirkan, proyek ini seperti pembayaran utang budi atau membangun konsolidasi kuat antara pengusaha dan penguasa," kata Yuyun.

Yuyun bilang, kajian yang dilakukan



anto dan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Semua orang yang berhubungan dengan perusahaan, jika mereka duduk dalam struktur, keuntungan mereka nyata," kata Yuyun Indradi, peneliti di lembaga advokasi lingkungan, Trend Asia, dalam kaitannya dengan penerbitan hasil kajian itu pada akhir 2019.

"Kalau tidak dapat keuntungan secara ekonomi, misalnya Yusril, dia akan

pihaknya menemukan bahwa Yusril merupakan pemegang saham dan komisaris utama PT. Mandiri Sejahtera Energindo (MSE). Perusahaan tambang batu bara itu memegang izin di Sepaku, kawasan luar pusat pemerintahan di ibu kota baru.

Kini nama-nama itu muncul kembali. Yusril yang pernah menanggapi beberapa tahun lalu menyampaikan perkembangan baru terkait namanya

• INFO UTAMA

di lahan konsesi lokasi Ibu Kota Negara. Menurut Yusril, kini ia bukan lagi pemegang saham ataupun komisaris di PT Mandiri Sejahtera Energindo.

Ia pun mempersilakan siapa saja mengecek data di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Belakangan, sahamnya saya jual lagi karena tumpang tindih perizinan dan pinjam pakai kawasan hutan yang tak kunjung selesai sehingga tambang itu tidak pernah dapat dikerjakan oleh perusahaan

IUP habis.

"Jadi, keuntungan apa yang saya dapat dengan dijadikannya kawasan itu sebagai IKN? Tidak ada sama sekali, malah rugi karena sudah capek mengurus perkara IUP-nya, ketika selesai, kawasan itu dijadikan IKN sehingga tidak bisa menambang di sana," sambungnya.

Yusril justru mempertanyakan klaim-klaim Walhi dan Eggi Sudjana. Dia mengaku heran klaim tersebut bisa

Sekretaris Kecamatan Sepaku Adi Kus-taman mengatakan kenaikan harga tanah mencapai sekitar 5-10 kali lipat dibandingkan dengan sebelum adanya pengumuman perpindahan ibu kota baru.

"Ya setelah pengumuman Penajam dan Kukar Kaltim sebagai ibu kota negara, harga tanah langsung naik," kata Adi, Selasa, 18 Januari 2022.

Camat Sepaku Risman Abdul juga membenarkan hal tersebut. Dia bilang



tersebut," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Januari 2022.

Yusril menyebut PT Mandiri Sejahtera Energindo pun tidak memiliki lahan di IKN Nusantara. Perusahaan itu hanya memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atas lahan seluas 160 hektare di kawasan calon IKN Nusantara. Politisi yang juga pendiri kantor hukum itu menjelaskan IUP tidak berarti kepemilikan atas tanah. IUP ada karena lahan tersebut milik negara.

Yusril menegaskan pemilik IUP tidak akan untung karena tak akan ada ganti rugi. Pemerintah, kata dia, akan mencabut atau menunggu masa berlaku

disampaikan orang-orang yang sudah belajar hukum.

"Namanya juga orang cari perhatian publik, apa saja diumbar ke permukaan. Apakah itu pembodohan atau tidak? Yang penting sudah jadi berita menarik bagi mereka," ucap Yusril.

Jawaban Yusril mewakili persoalan pemegang konsesi lain yang sudah disebut. Persoalan muncul kembali karena soal politik siapa mendapat apa dengan cara bagaimana tadi.

Yang jelas, harga lahan di kawasan lokasi IKN itu mulai meroket sejak 2019 lalu, beriringan dengan pengumuman rencana kepindahan Ibu Kota Negara.

saat ini harga tanah di Sepaku sudah menyentuh Rp 250 ribu per meter, padahal dulu cuma Rp 50 ribu. Kalau satu hektarenya bisa mencapai Rp 2,5 miliar. Itu untuk harga tanah yang letaknya dekat dengan jalan utama.

"Nah kalau di pinggir jalan itu lebih tinggi lagi, dulu hanya Rp 50 ribu per meter, kalau sekarang Rp 250 ribu per meter, jadi kalau satu hektare bisa sekitar Rp 2,5 miliar," kata Risman.

Begitulah gambaran tentang siapa mendapat apa dengan cara bagaimana terkait Ibu Kota Baru. Namun, kontroversi tampaknya masih akan terjadi. ●



JADI, KE MANA ANGGARAN BERLARI

Alih-alih repot soal lahan Ibu Kota Negara, kalangan pemerintah lebih sibuk dengan alokasi anggarannya. Terlebih, rencana penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APBN) untuk pengembangan Kota Nusantara memang tak terelakkan.

Penggunaan APBN untuk pengembangan Ibu Kota Negara tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Perpres itu terbit pada 9 September 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui mendapat banyak pertanyaan mengenai masalah pembiayaan pengembangan Ibu Kota Negara setelah pengesahan UU IKN ini. Terlebih, setelah DPR mengesahkan RUU menjadi UU IKN

"Kalau mengenai anggaran apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kita akan hitung. Jadi sebetulnya enggak ada yang disebut hari ini, pre-conception 54 persen adalah APBN," ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa, 18 Januari 2022.

Menurut Bu Menkeu, terdapat lima tahapan untuk pemindahan ibu kota baru. "Mungkin tahapan yang paling kritis sesudah UU dibuat adalah tahap pertama, tahun 2022 ini hingga 2024. Tahapan pemindahan berikutnya akan diikuti dengan tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari tahun 2025 hingga 2045," ujarnya.

Sedangkan Kemenkeu telah mematok anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466 triliun. Menkeu Ani mengatakan, dalam pendanaan IKN ini akan dianalisis terlebih dahulu apa yang menjadi trigger (pemicu) di awal dan kemudian menimbulkan pembangunan selanjutnya untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya.

Dalam rencana induk tersebut, akan juga dilihat akses untuk menuju IKN. Kemudian dilakukan identifikasi wilayah dan kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan. Sri Mulyani menyebut, APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar.

Pendanaan IKN tahun ini lebih

banyak digelontorkan kepada Kementerian PUPR. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang memang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya.

"Kemarin dengan Pak Menteri PUPR dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk mulai momentum pembangunan di sana. Maka kita semua nanti akan lihat dalam konteks anggaran," ucap Sri Mulyani

Selain itu, Ia mengatakan belanja pembangunan seperti kompleks pemerintahan, kemudian infrastruktur dasar, seperti bendungan, listrik dan telekomunikasi. Sebagian dalam bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). "Itu pasti akan butuh dukungan APBN, apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund atau bentuk dukungan lainnya," jelas Sri Mulyani.

Soal konsesi lahan sudah jelas ketinggalan. Persoalannya adalah anggaran dan alokasinya. Tapi, tetap siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. ●



GAGASAN BRILIAN BERBEKAL PERENCANAAN

Beberapa kali rencana dan kepindahan Ibu Kota terjadi dari Jakarta. Dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Namun Nusantara kali ini memang lebih terencana.

Yang gagal memindahkan Ibu Kota dari Batavia, kini Jakarta, adalah Herman Willem Daendels yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808-1811. Namun, namanya melekat dengan ruas jalan yang terbentang antara Anyer di pesisir Banten dan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur.

Di masa Daendels, Belanda di bawah kekuasaan Prancis. Ia mendapat mandat dari Kaisar Prancis saat itu, Napoleon Bonaparte, dengan misi menyelamatkan daerah kolonial dari serangan Inggris yang saat itu sedang bersitegang dengan Prancis.

Dalam konteks itu, Batavia sudah tak layak untuk pusat pertahanan Pulau Jawa. Tembok-tembok pertahanannya sudah keropos, selain kekuatan serdadunya yang akan kalah

oleh serbuan pasukan Inggris.

Daendels pun menggagas memindahkan ibu kota ke daerah yang lebih sehat, yakni Surabaya. Menurut Bernard H.M. Vlekke dalam bukunya Nusantara: Sejarah Indonesia (2008), Daendels sendiri banyak berpikir. Menimbang-nimbang. Namun ia batal memindahkan ibu kota dari Batavia karena kesulitan memindah semua permukiman Batavia, yang penuh gudang-gudang dan berkapal-kapal barang dagangan berharga. Padahal, bisa melewati jalan Anyer-Panarukan yang ia bangun.

Menurut Kepala Laboratorium Pengembangan Perkotaan dan Desain Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS), Ardy Maulidy Navastara ST MT, sejak masa kolonial, sudah banyak ahli menilai Batavia sudah tidak layak

menjadi sebuah ibu kota. Antara lain karena wabah penyakit kolera yang menyebar di sana.

Dari sisi infrastruktur, Bandung malah menjadi alternatif dengan pembangunan kantor pos besar dan industri kereta api. Selain itu, sumber daya ekonomi kolonial didukung oleh sektor perkebunan di sekitarnya. "Bandung sendiri juga merupakan pusat perkebunan," tuturnya.

Selanjutnya, kata Ardy, Palangkaraya menjadi favorit menjadi ibu kota saat Presiden Soekarno berkuasa. Palangkaraya sudah didesain dan dibangun bertahap dengan tujuan menjadi ibu kota. Jalan yang lebar dapat membuktikan kota Palangkaraya pernah dicanangkan menjadi ibu kota. Namun, gagasan ini tidak sampai, sehingga Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota seperti semula.

Gagasan baru muncul pada masa Presiden Soeharto, yakni ingin memindahkan Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat. Namun memang tanpa realisasi.

Pasca reformasi 1998, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan tiga titik strategis yang menjadi dasar pengembangan ibu kota baru. Tiga titik strategis ini berada di Aceh, Kalimantan dan Pulau Biak. Pada masa ini, Aceh didorong menjadi pusat perdagangan Asia. Namun, beberapa negara seperti Singapura, Malaysia dan Tiongkok, kata Ardy, terganggu dengan gagasan ini lantaran rute kapal besar akan beralih dari Singapura ke Aceh.

Selanjutnya, Kalimantan dipilih menjadi titik strategis karena Kalimantan merupakan pusat logistik, di mana Gus Dur berencana akan mengembangkan sebuah industri logistik yang berskala Asia Pasifik. Sedangkan Pulau Biak digagas akan menjadi pusat peluncuran satelit Indonesia.

Nah, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Ardy, tidak ada gagasan yang dinilai istimewa. Isu memindahkan ibu kota pada era SBY hanya berupa wacana, tidak sampai berproses. Pada era ini hanya mengangkat isu lama, yaitu menyetujui gagasan Soekarno. Namun, terdapat gagasan yang tidak terlalu populer dan berhasil muncul, yakni gagasan Pur-

wekerto sebagai tujuan ibu kota baru.

Memasuki 2017, saat Jokowi menjabat sebagai presiden, isu pemindahan ibu kota semakin hangat. Pada April 2017 lalu, Jokowi sudah melontarkan ide itu. Jokowi menuturkan, berencana memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla melontarkan wacana, ibu kota sebaiknya dipindahkan di tengah negara, yakni Mamuju, Sulawesi Barat. Kini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengkaji

Bab II Pasal 5 RUU IKN menyebutkan kawasan Nusantara dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya. Wilayah ini kelak menjadi satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus sehingga tidak ada pemilihan kepala daerah oleh rakyat. "Di IKN Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional," demikian bunyi Pasal 5 ayat 3 draf RUU IKN.

Sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara dalam pasal 8 RUU itu adalah Otorita IKN Nusantara. Badan ini dipimpin



lebih jauh rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Awal Juli 2017, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan rencana pemindahan ibu kota tak lepas dari ide Presiden Joko Widodo. Ide itu timbul sejak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Teten, sulit membenahi Jakarta. Pemerintah juga ingin ada keseimbangan antara pusat dan daerah.

Ditinjau dari aspek perencanaan, gagasan, dan payung hukum relatif lebih serius. Termasuk beban keuangan negara, juga dampaknya terhadap masyarakat. Kemungkinan pembengkakan dana dan juga molornya waktu pemindahan sudah diperhitungkan.

Yang tak kalah penting adalah menjaga situasi kondusif ibu kota dengan menghindari pemilihan kepala daerah.

oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu seorang Wakil Kepala Otorita. Keduanya langsung ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 10 nya menyebutkan, Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Untuk pertama kali, Kepala Otorita dan Wakil Kepala ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat dua bulan setelah UU IKN ini diundangkan.

Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita IKN Nusantara disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara, tahapan

• INFO UTAMA

persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Pasal 13 ayat 1 menyebutkan IKN Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.

Penyusunan dan penetapan dae-

Demokrat berpendapat bahwa pemerintahan daerah khusus (Pemdasus) IKN yang dipimpin oleh badan otorita tidak konsisten. "Terkait hal itu (kepala pemdasus), ini cantolan hukumnya, rujukannya tentu jangan sampai menyalahi UUD 1945," ujar Muslim dalam rapat Pansus RUU IKN.

Anggota Pansus RUU IKN Fraksi

Selain itu, Ecky menyebut Gubernur dapat ditetapkan oleh Presiden dan memiliki kekhususan tertentu terkait pemdasus. "Sangat mungkin dan itu sudah terjadi baik itu di DKI Jakarta tidak ada pemerintahan administratif dan Yogyakarta dimana Gubernurnya itu dalam bentuk sultan," ujar Ecky.

Anggota Pansus RUU IKN Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan kepala pemdasus yang disepakati jika setingkat Provinsi maka akan disebut sebagai Gubernur. "Kenapa tidak pemerintahan daerah khusus IKN bukan Pemdasus? Terkesan disini sekonnyong-konyong muncul otorita IKN," ujar Guspardi.

Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia menyebut fungsi pemdasus IKN adalah sebagai penyelenggara.

“

Sangat mungkin dan itu sudah terjadi baik itu di DKI Jakarta tidak ada pemerintahan administratif dan Yogyakarta dimana Gubernurnya itu dalam bentuk sultan.

Sementara untuk otorita nantinya akan dipimpin oleh seorang kepala. Doli lantas menyebut hal tersebut adalah dua hal yang berbeda.

Menanggapi hal tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa menegaskan otorita hanyalah sebuah predikat yang diberikan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya pemerintah tetap akan menggunakan pemdasus sebagai status IKN.

Kini perdebatan itu tinggal menjadi risalah parlemen. Kelak akan menjadi catatan sejarah. RUU segera menjadi UU, dan Presiden akan memilih Kepala Otorita IKN. ●



rah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di IKN Nusantara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita IKN Nusantara.

Status otorita dan juga kepalanya memang sempat menjadi perdebatan sebelum pengesahan di parlemen. Anggota Pansus RUU IKN Fraksi Demokrat, Muslim mengatakan

PKS, Ecky Awal Mucharam mengatakan pemerintah daerah setingkat provinsi harus mengacu pada UUD 1945 Pasal 18 ayat 1, 2, 3 dan 4. Menurut Ecky, ayat 3 dan 4 jelas mengatur bahwa dalam konstitusi Indonesia, kepala daerah yang memimpin pemerintah provinsi adalah seorang Gubernur. Jadi, kata Ecky, IKN perlu Gubernur dan juga DPRD.



NAMA AHOK MENCUAT LAGI

Paling lambat, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari sejak DPR menesahkannya. Jadi, 18 Februari hitung-hitungannya. Dua bulan setelah itu, menurut amanat UU, paling lambat dua bulan kemudian Kepala Otorita IKN dan wakilnya akan ditunjuk Presiden.

Nah, beberapa nama yang bakal ditunjuk sebagai calon kepala otorita IKN pun bermunculan. Sedangkan Presiden Joko Widodo pernah menyatakan soal kriteria khusus calon kepala badan otoritas ibu kota baru tersebut.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 19 Januari 2022. Kriteria spesifik itu Presiden sampaikan setelah pada Maret 2020 sempat menyebutkan empat nama yang dianggapnya cocok sebagai sosok pemimpin ibu kota baru.

Nama-nama tersebut antara lain mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini

menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdulah Azwar Anas.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, berbagai nama calon Kepala Otorita IKN, termasuk Ahok yang juga kader PDIP, masih dalam proses diskusi antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "PDIP punya nama calon-calon yang penuh syarat untuk itu (Kepala Otorita IKN), termasuk Ahok. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama jadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI," ucap Hasto kepada wartawan, Kamis, 27 Januari 2022.

"Semuanya dalam dialog antara Presiden dengan Ibu Mega. Tetapi dari perspektif kriteria, PDIP sudah sampaikan. Karena besar harapan sejak zaman Bung Karno tentang IKN yang berada di Kalimantan," lanjutnya.

Ia pun menegaskan keputusan Kepala Otorita IKN sepenuhnya berada di tangan Presiden Jokowi. Namun, PDIP mengaku siap jika nantinya Jokowi meminta pertimbangan partai

untuk mengisi jabatan tersebut. "Kami serahkan sepenuhnya pada Presiden. Hanya saja ketika partai diminta, kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bapak Presiden," ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyebut parpolnya tidak berencana menyodorkan nama sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara seperti yang dilakukan PDIP Perjuangan (PDIP) dengan menyinggung nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. "Tidak, pasrah saja," kata Gus Jazil melalui layanan pesan, Sabtu, 29 Januari 2022, menjawab pertanyaan apakah PKB menyodorkan nama calon kepala otorita IKN.

Toh, kata dia, pekerjaan membangun IKN sangat berat dan mendesak, sehingga perlu diangkat kepala otorita yang memiliki kemampuan dan kegigihan 24 jam kerja. "Tahun 2024 berkejaran dengan waktu, dua tahun kawasan inti sudah harus berdiri. Istana negara dan gedung parlemen," beber Gus Jazil.

Dengan pertimbangan itu, Wakil Kepala Otorita sepertinya tak kalah penting. Tapi, siapa? Kita tunggu penunjukkan Presiden untuk duet ini. •



PERTUMBUHAN EKONOMI SUMSEL MELAMPAUI NASIONAL

Pandemi Covid 19 tidak menurunkan semangat pemerintah Sumatera Selatan dalam membangun ekonominya. Atas upaya tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) triwulan IV-2021 menunjukan trend meningkat sebesar 5,12 persen atau lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,02 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang mendorong bangkitnya pertumbuhan ekonomis di Provinsi Sumsel tersebut. Salah satunya dampak dari gencarnya upaya yang dilakukan Gubernur Herman Deru yang beberapa waktu lalu meluncurkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan (SMP).

Gerakan ini ternyata terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menekan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,10 persen (y-on-y).

Kepala BPS Provinsi Sumsel, Zulkipli melalui Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS

Sumsel, Tri Ratna Dewi membenarkan gerakan SMP yang secara masif digalakan di pelosok Sumsel tersebut telah menunjukan hasil yang positif meski belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat.

"Gerakan Sumsel Mandiri Pangan itu telah menunjukan akselerasinya di triwulan IV-2021. Tapi dampaknya baru pada peningkatan kesejahteraan pada beberapa kelompok saja, belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat," ucapnya.

Dia melihat gerakan SMP ini telah menjangkau ke 240 desa untuk tahun 2021. Diharapkan masyarakat yang mengikuti program ini dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada komoditas yang dijual



dipasaran.

"Jadi untuk tahun 2021 belum semua lapisan tersentuh dengan program ini. Tapi dari data pengeluaran konsumsi RT memang terlihat ada peningkatan pertumbuhannya. Artinya ada peningkatan kesejahteraan masyarakat di awal tahun 2022 ini," imbuhnya.

Sedangkan disisi lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sumsel triwulan IV-2021 lanjut dia, terlihat dari pertambangan dan penggalian sebesar 9,47 persen, Real Estate sebesar 8,69 persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,51 persen.

Kemudian untuk Jasa pendidikan 8,39 persen. Perdagangan 8,11 persen, akomodasi, makanan dan minuman tumbuh 5,75 persen, Industri pengolahan yang juga memiliki peran dominan tumbuh 4,29 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 4,03 persen, jasa lainnya tumbuh 3,91 persen dan listrik dan gas 3,44 persen.

"Untuk y-on-y, triwulan IV- 2021 dibandingkan triwulan IV- 2020 lebih disebabkan kenaikan produksi pertambangan batu bara yang naik sampai dua digit sebesar 23,92 persen. Secara total kategori pertambangan

dan penggalian naik hingga 9,47 persen. Industri kikang migas kita juga naik dibandingkan triwulan IV- 2020. Beberapa komoditas pertanian juga naik. Kalo dari sektor jasa, seperti perdagangan, transportasi, akomodasi



dan makan minum juga mendukung tumbuhnya ekonomi kita dibandingkan pada masa merebaknya pandemi di triwulan IV-2020," terangnya.

Atas prestasi itu, Gubernur Herman Deru merasa bersyukur karena pertumbuhan ekonomi Sumsel tinggi di angka 5,12 persen. Hal ini menunjukkan geliat ekonomi Sumsel itu bagus meski

omicron kepada masyarakat harus dengan cara persuasif jangan gaduh agar tetap taat protokol kesehatan (Prokes)," terangnya.

GSMP Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sumsel

Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang diinisiasi Gubernur H

positif dari kalangan ibu rumah tangga. Seperti yang digeluti oleh kalangan ibu rumah tangga yang bermukim di kawasan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

Asnah (59) salah satunya yang telah memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami berbagai macam bumbu dapur seperti tomat kecil, cabai, daun bawang daun sop serta sayur mayur lainnya.

"Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang telah digagas Gubernur Herman Deru patut kita ikuti. Pekarangan rumah ini bisa menghasilkan jika kita memanfaatkan dengan bertanam sayuran dan bumbu dapur lainnya seperti cabai, daun bawang, daun sop, tomat kecil. Hasilnya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak perlu beli pasar lagi," terang Asnah.

Hal yang sama juga digeluti Kisti-ana ibu rumah tangga yang mengakui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang telah digagas Pemerintah Provinsi Sumsel menjadi daya tarik tersendiri bagi dirinya menanam berbagai macam kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan barang bekas yang ada disekitar rumah untuk dijadikan pot sebagai media tanam.

"Dulunya kita tidak pernah terpikirkan untuk menanam bumbu sendiri, namun setelah ada gerakan Sumsel Mandiri Pangan jadinya tertarik juga untuk menanam disela kesibukan sehari-hari selaku ibu rumah tangga," imbuhnya.

Sementara itu masifnya GSMP yang dilakukan di sejumlah daerah di Sumsel dalam dua bulan terakhir sedikit banyak telah membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumsel.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Sumsel, menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) triwulan IV-2021 menunjukkan trend meningkat sebesar 5,12 persen atau lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hannya sebesar 5,02 persen.

Menurut Kepala BPS Provinsi Sumsel, Zulkifli melalui Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Sumsel, Tri Ratna Dewi membe-



dimasa pandemi covid-19 ataupun adanya varian baru omicron.

"Yah, kita bersyukur pertumbuhan ekonomi kita bagus. Makanya untuk mensosialisasikan tentang varian baru

Herman Deru bertujuan merubah pola berpikir atau mindset masyarakat dari konsumtif, menjadi produktif.

Sejak di launching diawal Desember 2021 lalu, GSMP mendapat respon

narkan GSMP yang secara masif digalakan di pelosok Sumsel tersebut telah menunjukkan hasil yang positif meski belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat.

"Gerakan Sumsel Mandiri Pangan itu telah menunjukkan akselerasinya di triwulan IV-2021. Tapi dampaknya baru pada peningkatan kesejahteraan pada beberapa kelompok saja, belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat," ucapnya.

Dia melihat Gerakan SMP ini telah menyasar ke 240 desa untuk tahun 2021. Dan diharapkan masyarakat yang mengikuti program ini dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada komoditas yang dijual dipasaran.

"Jadi untuk tahun 2021 belum semua lapisan tersentuh dengan program ini. Tapi dari data pengeluaran konsumsi RT memang terlihat ada peningkatan pertumbuhannya. Arti-



nya ada peningkatan kesejahteraan masyarakat diawal tahun 2022 ini," imbuhnya.

Dilain pihak Gubernur Herman Deru menegaskan laju pertumbuhan ekonomi Sumsel yang telah mencapai 5,12 persen tidak lain atas kerja keras semua pihak termasuk kalangan

ibu rumah tangga yang telah mulai produktif pasca digaungkannya Sumsel Mandiri Pangan.

"Yah, kita bersyukur pertumbuhan ekonomi kita bagus meski saat ini varian omicron tengah melanda. Mudah-mudahan ekonomi kita tidak akan begitu terdampak," terangnya.●



LIBATKAN SEMUA POTENSI UNTUK PARIWISATA SUMSEL

Bila dikelola secara baik dan benar, semua potensi yang ada di Sumatera Selatan ternyata mampu menarik dan menunjang pariwisata. Ternyata ada banyak potensi yang selama ini belum tergarap padahal menarik. Sehingga untuk menunjang pariwisata Sumsel ini, semua harus terlibat dan dilibatkan termasuk para komunitas.

Sungai Sekanak Lambidaro misalnya yang selama ini hanya dikenal sebagai anak Sungai Musi yang tidak memiliki potensi apapun setelah direstorasi Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Pemerintah Kota Palembang

ternyata menghasilkan nilai wisata yang cukup tinggi.

Bahkan untuk memaksimalkan potensi itu digelar Festival Sekanak Lambidaro. Dimana sebelum festival digelar, sempat mengundang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk melakukan pembersihan bersama hingga membuat Ganjar takjub den-

gan kegiatan gotong royong ini.

Gubernur Sumsel, Herman Deru yakin kawasan wisata Sungai Sekanak Lambidaro bisa menjadi destinasi wisata yang layak dinikmati pengunjung, dimana sungai ini kini telah disulap menjadi sungai yang bersih, rapih dan memanjakan mata bagi setiap masyarakat yang melintasi.

"Kerjasama yang luar biasa, kegigihan kita harus sepakat ini kerjasama tidak ada ego sektoral atau kesuksesan sendiri, ini berkerja sama dan sama-sama berkerja. Sama-sama berpikir dan berpikir yang sama," katanya saat membuka Festival Sungai Sekanak Lambidaro.

Bapak Pertanian Provinsi Sumsel ini juga mengharapkan Pemerintah Kota Palembang untuk menjadikan Festival Sekanak Lambidaro menjadi festival tahunan.

"Pemprov bantu dengan caranya, Pak Menteri PUPR dengan caranya, dan Pemkot Palembang dengan caranya. Alhamdulillah Sungai Sekanak Lambidaro jadi proyek strategis nasional. Atas persetujuan semua yang hadir hari ini, Saya minta pak Wali festival seperti ini menjadi agenda tahunan," himbuhnya.

Herman Deru mengakui, pekerjaan Sungai Sekanak Lambidaro sudah menempatkan hasilnya dari APBD Kota Palembang, APBN juga semua unsur disini sudah termanfaatkan.

"Nilai pekerjaan 150 Milyar bukan hanya keindahan yang didapat tapi manfaatnya, Kementerian PUPR akan menambah 1,3 Km. Mimpinya pak wali menjadikan Sekanak Lambidaro sungai yang digunakan transportasi air bisa tercapai Insya Allah muaranya



untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Sementara Walikota Palembang Harnojoyo mengungkapkan awal mula tercetus ide untuk merestorasi Sungai Sekanak Lambidaro, adalah berawal dari lomba perahu bidar pada tahun 2017 lalu.

Dimana ada salah seorang masyarakat, yang menyebutkan Sungai Sekanak Lambidaro di tahun 1960 menjadi tempat sarana transportasi serta sungai yang dipenuhi ikan yang banyak.

"Saat itulah kami mengutarakan kepada masyarakat menginginkan merestorasi Sungai Sekanak dan mengembalikan fungsi sungai. Pada tahun 2019 bulan Juli kami diajak beraudiensi dengan Menteri PUPR, salah satunya restorasi Sungai Sekanak Lambidaro. Alhamdulillah syukur kami pak menteri menyetujui restorasi sungai ini," terangnya.

Festival Sungai Sekanak Lambidaro digelar selama dua hari pada 5 - 6 Februari 2022. Dalam festival tersebut masyarakat bisa menikmati aneka kuliner khas daerah di 30 gerai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bermain perahu menyusuri sungai, menikmati aneka hiburan dan permainan rakyat lainnya.

Libatkan Komunitas

Tanpa ada dukungan dan kerjasama semua pihak, apapun programnya tidak akan sukses. Hal ini sangat disadari betul Gubernur Sumsel, Herman Deru.

"Ada tugas tambahan untuk para peserta ini khususnya Bedulur Land Rover Sumsel. Selain bersilaturahmi jadilah duta-duta wisata yang dapat mempromosikan wisata andalan Sumsel seperti Pagaralam dan Danau Ranau," ujar Herman Deru saat melepas peserta Sumatera Tribute 2022 yang digelar Land Rover Club Indonesia (LRCI).

Selain menjadi duta wisata, Gubernur Herman Deru juga berpesan agar komunitas ini dapat memberi contoh ke masyarakat khususnya pengendara agar dapat tertib berlalu lintas. Apalagi saat ini ETLE mulai berlaku di Sumsel.

Tak hanya itu lapun berharap organisasi Land Rover Bedulur Sumsel maupun Land Rover Club Indonesia



(LRCI) dapat semakin memasyarakat. Sehingga kesan eksklusif yang selama ini melekat perlahan dapat terkikis.

Pembina Bedulur Land Rover Sumsel, Syahrial Oesman menjelaskan, Camel Trophy Sumatra Tribute 2022 akan diadakan pada 6-22 Februari. Untuk kali ini jalur yang akan dilalui dari Jambi ke Medan, namun ada singgah terlebih dahulu di Palembang.

Pada tanggal 3 Februari tim dari Jakarta akan tiba di Palembang dan pada tanggal 4 Februari dilepas secara langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

"Camel Trophy Sumatra Tribute 2022 ini merupakan napak tilas Camel Trophy 1981," kata Syahrial Oesman.

Di acara yang berbeda Gubernur Herman Deru juga mengaku bangga dapat berkumpul bersama komunitas vespa se Sumsel. Menurutnya kecintaan terhadap salah satu jenis sarana transportasi yakni vespa itu luar biasa.

"Saya juga pengguna vespa sejak SMP, jadi kita tau sejarah panjang tentang pengendara vespa ini tidak dapat dilupakan karena punya klasnya tersendiri dulu hingga sekarang," ucapnya.

Ke depan orang nomor satu di Sumsel itu ingin komunitas vespa ini menjadi satu perkumpulan yang memiliki tujuan positif serta menjadi kekuatan ekonomi. Bahkan pentingnya lagi dapat menjadi duta pariwisata di Sumsel.

"Karena penggemar vespa ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Maka jalinlah komunitas antar negara agar mereka tau bahwa Sumsel selain memiliki wisata tapi juga mempunyai komunitas vespa yang sangat solid," imbuhnya.

Sementara Ketua Komunitas Vespa Scoot ID Palembang, Wavet Roelans mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support Gubernur Herman Deru kepada komunitas vespa di Sumsel.

Dia menyebutkan kegiatan ini memang diinisiasi oleh club scoot.id, kebutuhan club scoot.id baru dengan anggota tidak begitu banyak tapi hari ini juga berkumpul para komunitas-komunitas vespa lainnya.

"Jadi kami disini menginisiasi kegiatan ini tapi diikuti berbagai komunitas vespa di Sumsel. Kami berkeinginan agar satu vespa satu juta saudara," tuturnya. ●



USAHA PEMKOT TANGSEL DALAM PENANGANAN COVID 19



Pada Selasa (15/2/2022), Pemkot Tangerang Selatan bekerja sama dengan Badan Intelijen Nasional (BIN) menggelar vaksinasi anak di SDN Pisangan 02. Di sekolah tersebut, ditargetkan 320 anak menerima vaksin dosis kedua dari 650 siswa yang ada.



Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menerima suntikan vaksin booster di RSU Tangsel pada 12 Januari 2022.

"Tiga ratus dua puluh anak untuk dosis dua. Karena dosis pertamanya sudah selesai dari enam ratus lima puluhan ya," kata Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie.

Dengan upaya tersebut, vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun di wilayah itu bisa rampung 100 persen dalam waktu secepatnya. Kemudian, tinggal menunggu program vaksin booster untuk anak.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, juga sebelumnya meninjau vaksinasi bagi anak berusia 6-11 tahun yang

digelar di SDN Ciputat 06 pada 20 Januari lalu. Ini merupakan vaksinasi dosis kedua, di mana terdapat 700 anak penerima vaksin.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, saat ini penerima vaksin anak sudah di atas 90 persen.

"Vaksinasi tahap kedua ini merupakan upaya untuk menyempurnakan vaksinasi di usia anak. Agar para siswa lebih siap menghadapi Pembelajaran Tatap Muka," kata Pilar.

Selain itu, Pilar juga menegaskan Pemkot Tangerang Selatan berupaya

menggelar Pembelajaran Tatap Muka yang aman dan lancar. Tujuannya, kualitas pendidikan bagi para siswa tetap terjaga. Pilar juga berharap dukungan maupun peran serta orang tua untuk mendorong anaknya agar divaksinasi hingga lengkap. Sehingga tercipta kekebalan kelompok di lingkungan sekolah.

"Saya harap kepada seluruh orang tua siswa atau wali murid di Tangerang Selatan dapat mendorong anaknya divaksin hingga tahap kedua. Tentu dengan saran dan observasi terlebih dahulu dari tenaga medis," kata Pilar.

Sementara itu, terkait vaksin dosis ketiga atau booster, Pemkot Tangerang Selatan sudah memulainya pada minggu ketiga Januari lalu, khususnya kepada aparatur sipil negara (ASN) yang jumlahnya ribuan orang.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menjelaskan, vaksinasi booster diprioritaskan untuk ASN sebagai petugas pelayanan publik. Proses vaksinasinya berlangsung selama tiga hari dengan target 1.400 orang.

Benyamin mengatakan, selain vaksinasi yang diberikan secara massal, pemerintah juga membuka vaksinasi di seluruh Puskesmas. Sehingga bagi ASN atau masyarakat yang sudah memenuhi syarat vaksin booster sudah bisa menerimanya di Puskesmas.

"Jadi memang mungkin ada yang beberapa tidak memenuhi syarat untuk booster ini, karena tensi darah yang ter-

“
Tiga ratus dua puluh anak untuk dosis dua. Karena dosis pertamanya sudah selesai dari enam ratus lima puluhan ya.

lalu tinggi, itu setelah normal bisa melakukan vaksinasi di Puskesmas,” ujar Benyamin.

Untuk teknisnya, Benyamin menyampaikan bahwa setiap ASN yang akan divaksin booster bisa melakukan akses e-tiket yang bisa dibuat melalui aplikasi PeduliLindungi. Namun, bagi yang tidak memahami aksesnya juga bisa dilakukan secara manual di lokasi vaksinasi.

Sementara, sertifikat vaksin booster ini nantinya akan bisa segera diakses oleh ASN. Sehingga bukti setelah melakukan vaksinasi booster bisa segera didapatkan.

Benyamin sendiri telah menerima



Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menerima suntikan vaksin booster di RSUD Tangel pada 12 Januari 2022.



Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, bersama warga di Rumah Lawan COVID-19 Tangerang Selatan, Rabu (16/2/2022).

• INFO TANGSEL

suntik booster yang diselenggarakan Rumah Sakit Umum (RSU) Tangsel pada 12 Januari. Benyamin menjadi orang pertama yang menerima suntik booster tersebut.

"Alhamdulillah sudah menerima. Saya yakin (dibooster), mudah-mudahan tidak ada KIPI yang berarti," ungkap Benyamin usai menerima vaksin.

kedua 59,4 persen, dan dosis ketiga atau booster 25,9 persen.

Warga lansia memang menjadi kelompok rentan penularan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Untuk itu, pemerintah daerah terus mengejar capaian vaksinasi kepada lansia.

"Stok vaksin masih tersedia. Untuk lansia, kami kerahkan tim Ngider Sehat

bawah, mereka yang nyamperin (lansia) pakai motor," ujar Benyamin.

Benyamin berujar, program Ngider Sehat dilakukan karena banyak lansia yang memiliki masalah soal jarak antara kediaman mereka dan lokasi vaksinasi COVID-19 di Tangsel. Dengan demikian, Pemkot Tangsel bakal memvaksinasi COVID-19 para lansia di kediamannya



Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, saat meninjau vaksinasi anak di SDN Ciputat 06 pada 20 Januari 2022.

Ngider Sehat Mudahkan Lansia

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyatakan, pihaknya juga melakukan berbagai upaya untuk terus menggencarkan program vaksinasi kepada masyarakat. Tim petugas keliling yang dinamakan "Ngider Sehat" juga terus melakukan jemput bola untuk vaksinasi COVID-19, khususnya kepada warga lanjut usia (Lansia) di tengah lonjakan kasus COVID-19.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, hingga Senin (14/2/2022), dari sasaran 87.489 warga lanjut usia, penyuntikan dosis pertama sudah mencapai 70,7 persen, dosis

dengan sepeda motor beserta peralatan kesehatan. Tim Ngider Sehat ini yang jemput bola ke rumah warga lansia sesuai daftar yang ada," kata Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie.

Benyamin menjelaskan, satu tim Ngider Sehat terdiri dari 30 orang. Mereka menyambangi warga lansia di satu titik atau wilayah dari rumah ke rumah. Pihaknya meluncurkan program Ngider Sehat pada November 2021 guna mengejar capaian vaksinasi COVID-19 khusus lansia di wilayah administrasinya.

"Strateginya kami lakukan dengan Ngider Sehat. Mereka (petugas) turun ke

masing-masing. Adapun 30 motor tersebut bakal dikendarai oleh petugas paramedis dari puskesmas-puskesmas di sana.

"Orang tua susah mengakses (lokasi vaksinasi COVID-19), makanya kami yang datang ke rumah-rumah mereka, berdasarkan data yang dihimpun melalui kelurahan dari RT setempat," kata dia.

Benyamin berujar, selain karena jarak antara lokasi vaksinasi dan kediaman yang terpaut jauh, banyak juga lansia yang menderita komorbid. Sehingga tak bisa divaksinasi COVID-19.

Di sisi lain, melalui program Ngider Sehat, Pemkot Tangsel menargetkan 300 lansia divaksinasi COVID-19 per harinya.

"Minimal mereka bisa melakukan vaksinasi bagi 10 orang lansia per harinya. Jadi kalau ada 30 motor, ada 300 lansia tervaksinasi COVID-19," jelasnya.

Saat penyuntikan pertama vaksin booster pada 12 Januari lalu, puluhan lansia mendatangi Rumah Sakit Umum (RSU) Tangerang Selatan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga.

mempersilakan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Stok vaksin di Tangerang Selatan tidak ada masalah.

"Jenis vaksin booster ini kita pakai Pfizer dulu, nanti ke depannya menyesuaikan. Untuk sementara, pelayanan vaksin booster ini di fasilitas kesehatan milik pemerintah Tangsel, termasuk puskesmas," ungkapnya.

"Rumah Lawan COVID-19 sempat kosong akhir November. Sejak akhir 2021, Rumah Lawan COVID-19 sudah merawat 500 orang," terang Benyamin dalam akun Instagram pribadinya, @benyamindavnie_official, Rabu (16/2/2022).

Benyamin berpesan, para pasien yang sudah sembuh dan diboletkan



Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mendampingi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, saat meninjau kegiatan Gebyar Vaksinasi Doorprize Lansia di Flavor Bliss, Alam Sutera, Tangerang Selatan, Sabtu (12/2/2022).

Benyamin mengatakan ada lebih dari 100 ribu lansia di daerahnya yang sudah bisa mendapatkan vaksin penguat itu.

Menurut Benyamin, nantinya pelayanan vaksinasi dilaksanakan di fasilitas kesehatan pemerintah seperti di RSU Tangsel, RSU Pamulang, puskesmas serta RSU Serpong Utara dan RSU Pondok Aren.

"Kami siapkan untuk pelayanan vaksin booster ini, untuk ketersediaan vaksin Alhamdulillah jumlahnya masih cukup untuk 70 ribu orang dan itu akan ditambah lagi," ujarnya.

Untuk masyarakat yang mungkin belum mendapatkan dosis pertama dan kedua, lanjut Benyamin, Benyamin

Manfaatkan Rumah Lawan COVID-19

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap keberadaan Rumah Lawan COVID-19. Dia berharap, pengalaman selama dirawat di Rumah Lawan COVID-19 menjadi pengalaman hidup bagus bagi pasien yang dinyatakan sembuh dan bisa pulang.

Sejak didirikan pada 14 April 2020 dan beroperasi hingga saat ini, Rumah Lawan COVID-19 sudah merawat 4.558 pasien dengan total pasien yang pulang sebanyak 4.371.

pulang dari Rumah Lawan COVID-19 harus menjadi juru bicara untuk masyarakat. Mereka diminta memberitahu masyarakat tentang pengalaman bersahabat dengan COVID-19.

Menurutnya, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kesadaran individu dan kesadaran kolektif. Sehingga, pasien COVID-19 bisa sembuh karena punya semangat untuk sehat.

"Mari tekankan kepada masyarakat untuk menjalankan dua kunci utama, patuhi protokol kesehatan dan melaksanakan vaksin. Insha Allah, dua kunci utama tersebut akan menekan penyebaran COVID-19," pungkasnya. • (Adv)

GENCARKAN VAKSINASI, PROKES HARUS DIPATUHI

► Pelayanan Kesehatan Tangsel Masih Terjaga

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyoroti kasus COVID-19 yang terus melonjak. Padahal, capaian vaksinasi di wilayah tersebut sudah di atas 98 persen untuk dosis pertama dan di atas 79 persen untuk dosis kedua hingga minggu pertama Februari 2022.



Satpol PP dan unsur TNI-Polri melakukan razia PPKM Level 3 skala besar di Tangerang Selatan.



Satpol PP dan unsur TNI-Polri melakukan razia PPKM Level 3 skala besar di Tangerang Selatan.

"Karena vaksin kita tinggi, tapi COVID-19 kita naik, mestinya vaksin meningkatkan kekebalan tubuh. Mestinya COVID-19 enggak naik. Yang melemahkan, logikanya ada dua hal, pertama variannya melemahkan CO-

VID-19, seperti Omicron dan delta yang ada lebih canggih lagi," ujar Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie.

Alasan kedua, kata dia, masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Salah satunya dalam pemakaian masker, di mana kualitas masker yang dipa-

kai seharusnya hanya empat jam saja, tetapi digunakan lebih dari itu. Hal ini membuat pemakaian maskernya tidak efektif melindungi dari penyebaran COVID-19. Kemudian, masih banyak yang berkumpul dan membuat kerumunan.

"Maka saya minta satpol PP untuk patroli. Kan jam 21.00 WIB sudah kita atur restoran tutup, kuota makan 50 persen dan seterusnya. Dan ini di lapangan tidak menaati itu," jelasnya.

Karena itu, Benyamin juga merangkul pihak-pihak terkait untuk lebih memperketat prokes yang ada. "Oleh karena itu, saya sudah meminta kepada satgas COVID-19, yang pertama memperketat kembali di tingkat kecamatan, kelurahan. Kedua, saya sudah kordinasi dengan satpol PP, TNI, Polri, mengurai kerumunan," ucap Benyamin.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menganggap risiko pemberatan dari melonjaknya angka kasus COVID-19 di wilayahnya, periode Januari hingga Februari 2022 tidak setinggi gelombang kedua pada Juni hingga Juli 2021 lalu.

Hali itu dilihat dari menurunnya angka kematian dan keterisian tempat tidur ICU dan isolasi terpusat pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Tangsel.

"Untuk angka kematian juga sangat jauh sekali. Bila kita melihat, mungkin dulu pada saat gelombang kedua Delta, itu setiap hari kita pasti mendengar sirine ambulance, kemudian pengumuman di masjid atau masyarakat tentang kematian COVID-19 ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Tangsel, Allin Hendalin, Rabu (16/2/2022).

Allin menegaskan, pada gelombang dua kasus COVID-19 varian Delta di

Tangerang Selatan, saat itu, angka kematian per hari mencapai 50-60 orang per hari pada periode puncaknya. Sedangkan, periode Januari hingga Februari 2022, terverifikasi 7 orang meninggal akibat COVID-19.

"Waktu itu, per harinya bisa 50-60 orang. Tetapi, saat ini kasus kematian yang tercatat dari Januari sampai Februari tanggal 14 kemarin di Tangerang Selatan itu yang sudah terverifikasi ada 7 orang. Turun mungkin 10 kali lipatnya dari yang dulu varian delta," ujarnya.

Allin menegaskan, pasien meninggal dunia akibat COVID-19 pada periode Januari-Februari 2022 disumbang oleh korban yang belum mendapatkan dosis vaksinasi COVID-19 hingga 37 persen, sementara lainnya telah menerima dosis vaksin.

Selain vaksinasi, pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat ini didominasi oleh kelompok lansia dengan penyakit bawaan seperti diabetes melitus, jantung dan hipertensi.

Hal sama juga terlihat dari rendahnya keterisian tempat tidur pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan ICU dan isolasi terpusat. Apalagi, jika dibandingkan angka kasus di gelombang dua pada Juni-Juli 2021. Saat itu, keterisian tempat tidur ICU dan isolasi terpusat di Tangsel mencapai 100 persen.

"Itu keterisian tempat tidur di rumah sakit, baik tempat tidur isolasi atau tempat tidur ICU bisa mencapai 100 persen. Dengan gejala sedang bahkan banyak yang beratnya. Tetapi melihat keterisian tempat tidur saat ini, walaupun kita telah terisi 52,4 persen untuk tempat tidur isolasi dan 30,7 untuk ICU," terangnya.

Dia menegaskan, saat ini pasien positif COVID-19 yang menjalani isolasi terpusat di Rumah Lawan Covid (RLC) Serpong, umumnya bergejala sedang.

"Sementara untuk isolasi sendiri, gejalanya adalah gejala sedang dan semuanya terkendali," ungkapnya.

Dengan kondisi seperti itu, Allin memastikan pelayanan kesehatan berupa

penyediaan fasilitas kamar perawatan ICU dan isolasi tetap terjaga. Namun, dia mewanti-wanti masyarakat Tangsel untuk tetap disiplin menjaga prokes dan menghindari kerumunan. Sebab, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Februari jauh menurun dibanding periode Januari 2022 kemarin.

"Ini yang terus diupayakan, bagaimana masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri atau dirawat diupdate terus kesembuhannya," jelasnya.

Berdasarkan data Dinkes Tangsel, terdapat 1.073.266 peserta prioritas vaksinasi COVID-19 yang dibagi dalam enam kelompok masyarakat. Pertama, peserta

en dan 24,1 persen untuk dosis ketiga.

Pada kelompok ketiga, 60.291 petugas publik dengan capaian vaksinasi dosis pertama 30,1 persen dan 26,8 persen untuk dosis kedua. Kemudian, 9,18 persen tenaga kesehatan sudah menerima dosis ketiga.

Untuk kategori keempat, kelompok masyarakat rentan dan umum dengan jumlah 786.110 peserta. Cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 69,6 persen dan 57,2 persen untuk dosis kedua. Sementara, vaksinasi dosis ketiga tercatat 5,31 persen.

Kelima, kelompok remaja dengan jumlah 130.475 peserta. Pelaksanaan

vaksinasi dosis pertama tercatat mencapai 95,7 persen, kemudian 81,5 persen pada dosis kedua, dan 0,1 persen untuk dosis ketiga.

Keenam, penambahan kelompok sasaran vaksinasi anak usia 6-11 tahun dengan target 133.026 peserta. cakupan vaksinasi dosis pertama terhadap anak 6-11 tahun mencapai 95,9 persen dan sebesar 53,9 persen untuk dosis kedua.

Sementara itu, untuk menggenjot vaksinasi kepada masyarakat, Pemkot Tangsel dibantu Polda Metro Jaya menargetkan vaksinasi dosis dua kepada 10.000 warga lansia dalam kurun 10 hari ke depan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, mengatakan, target tersebut dicapai dengan memvaksinasi 1.000 warga lansia dalam sehari di beberapa sentra vaksinasi se-Tangerang Selatan. Salah satunya di Flavour Bliss Alam Sutera.

"Petugas gabungan akan menyambangi warga lansia ke RT/RW untuk dibawa ke sentra vaksinasi. Mereka kelompok rentan sehingga harus dipercepat vaksinasinya," katanya, Senin (14/2/2022).

Satgas COVID-19 Tangsel melaporkan tambahan 1.531 kasus positif per 14 Februari. Dengan tambahan itu, total ada 22.786 kasus dalam perawatan, 33.771 sembuh, dan 739 meninggal dunia. ●



Petugas kesehatan di Tangerang Selatan melakukan pelayanan kesehatan, khususnya lansia, secara langsung ke rumah warga.

vaksinasi COVID-19 kategori kelompok tenaga kesehatan dengan jumlah 8.901 peserta telah tercatat pencapaian pada dosis pertama sebesar 163,9 persen. Sementara capaian dosis kedua sebesar 158 persen, dan dosis ketiga atau boost-er sebesar 116,1 persen.

Kedua, kelompok peserta lanjut usia (lansia) dengan jumlah 87.489 orang. Cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 70,6 persen, dosis kedua 59 pers-

Memindahkan Ibu Kota ke Kaltim

WUJUDKAN MIMPI PENDIRI BANGSA, WARISAN GENERASI MASA DEPAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mulai dikerjakan semester dua tahun ini. Semua perhatian pun kini tertuju ke Kalimantan Timur untuk dapat mewujudkan mimpi yang terpendam sejak 1960 itu.

Provinsi yang terkenal dengan kekayaan alamnya, mulai dari kayu, batu bara, minyak dan gas, sampai kelapa sawit itu, dalam waktu dekat akan menjadi episentrum Indonesia. Dikarenakan, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) akh-

irnya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada 18 Januari 2022 lalu.

Besarnya megaprojek pembangunan IKN Nusantara ini, diyakini menjadi berkah tersendiri bagi Bumi Etam. Namun, di sisi lain ada kekhawatiran niat Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, malah jus-

tru membawa petaka bagi masyarakat di sana.

Warga Kaltim pun terpecah dua pendapat. Ada yang setuju IKN pindah ke lahan yang berada di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara tersebut, karena akan membuat pembangunan kian pesat di sana.



Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kaltim Isran Noor saat meninjau lokasi IKN Nusantara pada 2019 silam.

Namun, banyak juga yang sanksi pemindahan itu, lantaran masyarakat Kaltim hanya sekadar jadi penonton. Karena semua pembangunan berdasarkan keputusan pemerintah pusat.

Gubernur Kaltim Isran Noor menerangkan, terpecahnya masyarakat atas setuju atau tidak pemindahan ibu kota, harusnya tidak perlu dipusingkan. Dia ingin menyudahi perdebatan tersebut, karena akan menghabiskan waktu dan membuang energi.

"IKN ini urusan negara, undang-undangnya sudah disahkan. Ini kebijakan strategis Indonesia masa depan," kata dia mengutip dari siaran pers Pemprov Kaltim, Minggu, (23/1/2022).

Dia mengaku tidak sependapat, masih ada yang menyebut pemindahan IKN terkesan terburu-buru. Isran pun menjelaskan, ide pemindahan IKN tidak bisa disebut terburu-buru.

Pasalnya, sejak 60 tahun lalu, Presiden RI pertama Soekarno bahkan sudah mewacanakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Rencana juga bergulir lagi di era Presiden Soeharto dan kembali mencuat wacana tersebut di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau cita-cita tiga pemimpin bangsa Indonesia ini baru bisa diwujudkan di era Presiden Joko Widodo, maka menurut saya ialah sebuah keberanian tindakan yang terukur. Sekaligus sukses mewujudkan cita-cita tiga pemimpin bangsa sebelumnya," terang Isran.

Apabila dalam prosesnya, pemindahan IKN ini berjalan mulus setelah disahkannya UU IKN, maka Isran meyakini keberanian Presiden Joko Widodo memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim, akan menjadi sebuah warisan bagi generasi masa depan Indonesia.

Selain itu, Isran juga mengungkapkan, kurang paham dengan orang-orang yang masih berkomentar miring tentang penamaan "Nusantara" bagi IKN yang akan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ini.

"Orang itu tidak setuju IKN dipindah tapi dia masih komentar tidak setuju nama Nusantara. Padahal dia sendiri mengaku bukan ahli bahasa. Asli ngabisi batere aja," terang dia.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun juga sependapat dengan

pemindahan ibu kota ke Bumi Etam, akan memberikan dampak positif ke masyarakat. Namun, dengan catatan, masyarakat juga harus ikut berkembang, seiring pembangunan fisik IKN Nusantara.

"Harapan kita terhadap peminda-

seperti hutan dan keanekaragaman hayati agar tetap terjaga. Sementara itu, pemerintah juga dituntut untuk mampu mewujudkan IKN masa depan yang modern, berbudaya dan beradab serta mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

Termasuk dampak ekonomi



Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate.



Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun.

han IKN ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltim dan demi kemajuan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Kaltim," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, proses pembangunan IKN harus tetap menjaga lingkungan

masyarakat. Pemerataan ekonomi Indonesia khususnya di wilayah timur dapat dimulai dengan pembangunan IKN yang terkoneksi dengan kabupaten dan kota di Bumi Etam. "Semoga dengan pembangunan IKN yang terkoneksi dapat mewujudkan pemerataan ekonomi

di seluruh kabupaten kota di Kaltim,” sambung dia.

Keputusan Visioner

Pakar Sosiologi Perkotaan dan Kawasan, Profesor Gumilar Rusliwa So-mantri mengatakan, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim adalah, keputusan politik negara yang sangat visioner dan strategis.

“Secara sosiologis kebijakan ini berarti menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris,” kata Gumilar.

Gumilar menerangkan, saat ini Pulau Jawa sudah memiliki 156 juta penduduk dengan daya dukung ruang terbatas. Maka, dengan adanya IKN Nusantara, diharapkan bisa membuat pemerataan penduduk tercipta secara produktif.

“Kaltim sendiri penduduknya lima juta jiwa, padahal luas wilayahnya sama dengan Pulau Jawa, ditambah Madura dan Bali. Dengan pindahnya IKN diharapkan pemerataan penduduk terjadi secara alamiah,” ujar sosiolog Universitas Indonesia tersebut.

Lebih lanjut, Menurut Gumilar rencana pemindahan IKN sudah sering diwacanakan sejak 1960, hingga era reformasi. Namun hal itu baru ditindaklanjuti dengan undang-undang (UU) di masa sekarang.

“Proses pembuatan UU IKN pun sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan telah melalui pembahasan dan masukan para akademisi, serta perdebatan di DPR RI,” katanya pula.

Gumilar mengungkapkan IKN Nusantara nantinya akan jadi kota percontohan nasional, karena merupakan forest city pertama di dunia. Kota ini juga akan menerapkan sistem transportasi massal modern ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan secara masif.

“Pembangunannya dengan sistem teknologi maju mampu menyelesaikan persoalan kekurangan air, labilitas geologis, jaminan keamanan, keindahan, dan kenyamanan,” kata Gumilar.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate

Pakar Sosiologi Perkotaan dan Kawasan Universitas Indonesia, Profesor Gumilar Rusliwa.

mengatakan pembangunan IKN, harus dilihat dengan perspektif optimistis. Karena akan memunculkan berbagai manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pembangunan IKN merupakan ga-

“
Proses pembuatan UU IKN pun sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan telah melalui pembahasan dan masukan para akademisi, serta perdebatan di DPR RI.

gasan visioner Presiden Joko Widodo. IKN dibangun dengan tahapan-tahapan panjang, dan melibatkan berbagai pihak, khususnya masyarakat di sekitarnya.

Menurutnya, pembangunan IKN akan

gan dipertentangkan secara diametral, seolah-olah yang ada adalah masa suram, bahaya, ketakutan, dan merugikan masyarakat atau penduduk lokal. Pemerintah dipastikan telah memerhatikan mitigasi berbagai risiko, yang muncul untuk menghindari dampak negatif dilakukannya pembangunan di daerah baru yang jauh dari perkotaan.

“Terhadap dampak yang negatif, pemerintah akan melakukan mitigasi. Bagaimana itu untuk menghindari sedapat mungkin agar dampak negatif (pembangunan IKN) dihindari,” terangnya.

Pembangunan IKN juga dipastikan memberi peluang besar bagi masyarakat lokal, seperti terciptanya banyak lapangan kerja baru selama tahapan pembangunannya.

Peluang yang sama juga terdapat di sektor produksi dengan munculnya kebutuhan barang dan jasa dalam jumlah besar untuk menunjang pembangunan kawasan IKN.

“Di mana-mana ya environmental atau lingkungan ekonomi itu pasti bertumbuh, pasti ada efek berganda terhadap ekonomi, lingkungan masyarakat Kalimantan. Trickle down atau rembesan perekonomian akan terjadi di Kalimantan Timur,” ujar dia.

Lebih lanjut Johnny menjelaskan, tujuan membangun IKN adalah memperkecil disparitas atau kesenjangan antarwilayah. Dalam hal ini, pembangunan IKN dilakukan untuk menghindari pusat-pusat pertumbuhan lama bergerak dan berkembang sendiri, sedangkan wilayah yang lain semakin tertinggal.

“Justru ini adalah penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan,” ia menegaskan.

Oleh karenanya, Johnny mengajak semua pihak ikut mendukung pembangunan IKN Nusantara dengan cita-cita besar, semangat, dan optimisme tinggi karena merupakan visi besar bangsa untuk pemerataan pembangunan. •



nfo Sumsel

INOVASI UNTUK NEGERI

www.infosumsel.id

Network



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel



Social media

 **WEBSITE:** @infosumsel.id
 **facebook:** @infosumsel.id  **twitter:** @id_infosumsel
 **Instagram:** @infosumsel_id  **YouTube:** info sumsel

Palembang
Jl. Puncak Sekuning, Lorong Sahabat
Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30126

Telp : 0711-7442344
Email : infosumsel.redaksi@gmail.com



Penampakan progres pembangunan Banten International Stadium.

KAWAL PEMBANGUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pembangunan di Banten mengalami perkembangan signifikan. Di usianya yang baru berusia 21 tahun, perbaikan dari segala sektor terus digenjot dengan kerja bersama antara eksekutif, dan legislatif demi mencapai kesejahteraan masyarakat di Tanah Jawara.

Di sisa jabatan yang hanya hitungan bulan, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy menginginkan, pembangunan terus berjalan meski terjadi kekosongan jabatan hingga pemilu mendatang. Untuk itu, keduanya meminta kepada DPRD Banten agar sama-sama melakukan pengawasan, dan menjalankan program yang telah disusun bersama melalui Rencana Pamban-

gunan Daerah Tahun 2023-2026.

WH, sapaan akrab Wahidin Halim, menerangkan, perbandingan capaian indikator makro tahun 2021 dan 2020. Capaian indikator itu meliputi IPM, LPE, penduduk miskin, TPT, tingkat inflasi dan gizi ratio.

"Pemerintah Provinsi Banten memasuki periode akhir RPJMD 2017-2022, sejumlah persoalan dan permasalahan pembangunan di Provinsi Banten satu per satu telah dituntaskan. Kita saat ini

masih dilanda pandemi COVID-19," ungkap Gubernur Banten.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama kita semua pembangunan Provinsi Banten terus berjalan dengan baik. Sampai dengan 2021, Pemerintah Provinsi Banten telah merealisasikan berbagai capaian pembangunan," tambahnya.

Gubernur pun memaparkan indikator keberhasilan Provinsi Banten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari makro ekonomi.



Ketua DPRD Banten, Andra Soni

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021 sebesar 72,72 point, meningkat dibanding Tahun 2020 sebesar 72,45 point. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) triwulan IV 2021 sebesar 4,62 persen, lebih tinggi dibanding LPE Nasional yang mencapai 3,51 persen.

"Angka pengangguran masih tinggi meski terjadi penurunan. Pengangguran terbuka 2021 sebesar 8,98 persen, lebih baik dibanding Tahun 2020 sebesar 10,64 persen. Angka kemiskinan 2021 sebesar 6,50 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan Nasional sebesar 9,71 persen. Gini Ratio 2021 sebesar 0,363, lebih baik dari Gini Ratio Nasional sebesar 0,384," ungkapnya.

Selanjutnya WH pun paparkan sejumlah capaian. Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemprov Banten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Banten juga peringkat dua penghar-

gaan pencegahan korupsi dari KPK, provinsi terinovatif dari Kemendagri, peringkat pertama manajemen kepegawaian dari BKN, serta provinsi informatif dari Komisi Informasi.

Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur terdapat sejumlah proyek strategis yang telah dilakukan. Antara lain revitalisasi Banten Lama, lingkungan serta akses jalannya, pembangunan stadion Banten Interna-

tional Stadium, pembangunan Jembatan Bogeg, pembangunan Jembatan Ciberang serta akses jalan menuju Wisata Negeri di Atas Awan.

Selain itu, pembangunan Masjid Negeri di Atas Awan yang merupakan sumbangan para ASN Pemprov Banten, kondisi jalan Provinsi mantap 98 persen dari 762 km, 1.823 penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan jalan lingkungan sepanjang 42,69 km yang merupakan usulan DPRD Provinsi Banten.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, peran legislatif dalam pembangunan selain pengawasan, juga menyalurkan pokok-pokok pikiran (Pokir) dari masyarakat. Terutama dalam menyusun RPJMD Tahun 2023-2026.

Andra Soni menerangkan,



**Wakil Ketua
DPRD Banten,
Fahmi Hakim**

dalam pembahasannya mengenai pokok-pokok pikiran, DPRD Banten untuk rencana pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026, terdapat beberapa hal yang dirumuskan oleh legislatif. Seperti bantuan beasiswa kepada siswa tidak mampu pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, sampai penyediaan perlengkapan jalan.

Andra Soni meminta kepada seluruh elemen pemerintah di Banten untuk bersiap menghadapi digitalisasi karena

Susun Tata Ruang

Saat ini, Pemprov dan DPRD Banten sedang menyusun Raperda RTRW 2022-2024. Raperda usulan Pemprov Banten itu baru diserahkan dalam Rapat Paripurna, Selasa (15/2/2022). Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menerangkan, Raperda RTRW itu diusulkan untuk mengatasi permasalahan tata ruang wilayah Provinsi Banten selama 20 tahun ke depan.

"Seiring dengan dinamika pembangunan nasional dan daerah, maka rencana tata ruang wilayah Provinsi Ban-

kata Andika saat membacakan pidato Gubernur Banten Wahidin Halim tentang pengantar Raperda RTRW 2022-2042 pada rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim.

Tujuan tersebut, kata Andika, akan dapat terwujud apabila seluruh tahapan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dike-



Gubernur Banten, Wahidin Halim

perkembangan teknologi yang semakin maju. Sehingga wajib siap dengan segala perubahannya. Dirinya juga menyampaikan bahwa DPRD Banten siap dan bekerja sama semua yang telah dirangcang oleh OPD.

"Yang pasti itu semua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ujarnya.

ten 2022-2042 yang disusun bertujuan untuk mengatasi permasalahan aktual tata ruang wilayah Provinsi Banten selama 20 tahun ke depan dan mengakomodir berbagai harapan masyarakat selaras dengan tujuan penataan ruang nasional dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional,"

luarkan oleh pemerintah.

Rencana tata ruang wilayah provinsi, kata Andika, mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antarwilayah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

"Sebagai matra spasial, maka rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten disu-

sun berdasarkan kepentingan jangka panjang dan mampu meningkatkan daya saing wilayah Banten dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Andika mengatakan, untuk mengnyinergikan dan mengakomodir kebijakan nasional dan dinamika pembangunan yang berkembang cepat di Provinsi Banten, telah dilakukan pengintegrasian rencana tata ruang wilayah dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Andika menyatakan pula, dengan

dalam pengembangan wilayah.

Adapun isu-isu strategis terkait penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Banten yang perlu menjadi prioritas, antara lain percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang perlu disesuaikan dalam rencana tata ruang daerah.

Selanjutnya, meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui pengembangan wilayah berdasarkan potensi dan sumber daya ekonomi wilayah. Tidak kalah pentingnya, kata Andika, juga terkait dengan pelestarian lingkungan

Andika juga menyebut degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai isu strategis terkait penyelenggaraan tata ruang di Provinsi Banten yang tidak bisa diabaikan.

“Perubahan kawasan iklim dengan upaya pelestarian fungsi konservasi, cagar alam optimalisasi situ/waduk, danau, sempadan sungai, sempadan pantai dan lainnya juga termasuk ke dalam isu strategis dimaksud,” kata Andika.

Wakil Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim yang memimpin rapat paripurna tersebut kemudian mengumumkan



Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy

rencana tata ruang wilayah yang akan dibahas ini fungsi pengendalian dapat lebih ditingkatkan dalam rangka menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi. Berikutnya, guna menghindari penggunaan lahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan berfungsi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang kawasan

hidup dengan mempertahankan kawasan lindung di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.

Berikutnya, kata Andika, isu strategis lainnya terkait ini adalah sinergi dan optimalisasi penataan ruang wilayah perbatasan antarkabupaten/kota dan kerja sama pembangunan di wilayah perbatasan.

bahwa pengajuan raperda oleh Gubernur Banten melalui Wakil Gubernur Banten tersebut akan ditanggapi oleh seluruh fraksi di DPRD Banten pada agenda rapat paripurna DPRD berikutnya.

“Melalui pandangan fraksinya, nanti fraksi-fraksi di DPRD Banten akan memutuskan apakah Raperda tersebut akan dilanjutkan diagenda untuk dibahas atau sebaliknya,” kata Fahmi pula. •

LIMPAHAN PERHATIAN UNTUK JAMBI

Potensi ekonomi Provinsi Jambi sudah terkenal sejak masa purba dalam catatan pengelana dunia yang menyebutnya sebagai Zabag, sekarang Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kini perhatian untuk Jambi ternyata melimpah ruah.



Satu contoh saja limpahan perhatian itu: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkuat kapasitas dan kapabilitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jambi. Antara lain melalui pelatihan, sarana dan prasarana hingga memfasilitasi hulu dan hilir produk UMKM.

“UMKM di Jambi sudah berada di level yang baik, namun perlu pemerataan sehingga dibuatlah pelatihan untuk mereka, tidak hanya pelatihan namun juga disediakan sarana dan prasarana penunjang produksi UMKM di Jambi,” kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jambi, Jumat, 21 Januari 2022.

Penguatan kapasitas bagi UMKM di Jambi oleh BUMN tersebut di mulai dari penyediaan permodalan bagi pelaku UMKM mulai dari permodalan kecil pra sejahtera dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kemudian Kementerian BUMN turut memberikan pelatihan

kepada pelaku UMKM agar usaha dan bisnis yang dilaksanakan oleh pelaku UMKM di Jambi dapat berkembang dan bersaing dengan baik dengan kompetitor yang lebih besar.

Pelatihan tersebut di antaranya pelatihan digitalisasi bagi pelaku UMKM yang akan dilaksanakan oleh PT Telkom. Kemudian pelatihan peningkatan kapasitas oleh PT BRI dan dan pelatihan lainnya dari Instansi BUMN di Jambi. Serta Kementerian BUMN akan menyediakan rumah pengemasan atau packaging bagi pelaku UMKM di Jambi yang di sediakan di rumah BUMN.

"Rumah BUMN ini milik bersama seluruh instansi BUMN, maka di sini akan kita sediakan fasilitas bagi pelaku UMKM seperti mesin pengemasan dan mesin vacuum untuk mengeringkan produk keripik," kata Arya. Tidak hanya penguatan di sektor hulu, namun di sektor hilir Kementerian BUMN akan melaksanakan kegiatan bazar UMKM yang dilaksanakan dua minggu sekali di kantor BUMN di Provinsi Jambi secara bergiliran, tanpa pengenaan biaya alias gratis.

Ia juga berharap seluruh instansi BUMN di Provinsi Jambi dapat bersinergi dengan lebih baik dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Sehingga UMKM di Provinsi Jambi dapat berkembang dengan lebih baik dan terjadi pemerataan kapasitas terhadap pelaku UMKM di Jambi.

Selain itu Kementerian BUMN turut menyerap aspirasi pelaku UMKM di Provinsi Jambi. Dimana Kementerian BUMN memberikan solusi terhadap kendala yang dialami oleh pelaku UMKM. Seperti kendala pemasaran, pengemasan, produksi hingga permodalan.

Harapan Arya agar segenap BUMN di Jambi urun rembuk boleh jadi karena melihat pencanangan (kick off) Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bandara Sultan Thaha, Jambi pada Rabu, 19 Januari 2022. Di balik acara itu, ada BUMN Angkasa Pura II.

Bahkan kegiatan ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Perhubungan, juga Pemprov Jambi, dan Bank Indonesia. Peluncuran Gernas BBI di Bandara Sultan Thaha Jambi pada Rabu (19/1/2022), disaksikan langsung Menteri Koordinator Kemaritiman dan Inves-

tasi Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Campaign Manager Gernas BBI periode Januari 2022.

Menkomarves mengatakan, memasuki tahun ke-3 penyelenggaraan Gernas BBI yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo pada Mei tahun 2020, hingga saat ini sudah mencapai 17,2 juta UMKM yang sudah onboarding atau merambah ke ekosistem digital, dari target 30 juta

jasa pemerintah, sehingga diharapkan semakin memberdayakan para pelaku UMKM lokal.

Acara Gernas BBI 2022 ini juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BNP Sofyan Djalil, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, dan Gubernur Jambi Al



UMKM onboarding pada tahun 2023.

"Kita buktikan kalau kita semua bekerja kompak, hasilnya akan baik. Kita ingin UMKM kita makin maju, untuk itu mari kita terus dorong UMKM lokal semakin baik. Karena ini dapat menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi ketergantungan barang impor, dan meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah," kata Luhut.

Dia pun mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi yang telah berkolaborasi dengan LKPP, untuk mengadakan e-katalog bagi produk-produk UMKM lokal dalam pengadaan barang dan

Haris. Secara virtual, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga ikut menyaksikan melalui jaringan internet.

"Kick Off di Bandara Sultan Thaha ini mengawali seluruh rangkaian kampanye Gernas BBI 2022 mulai dari Januari hingga Desember 2022 di seluruh Indonesia. AP II sendiri akan menggelar Gernas BBI 2022 di tujuh bandara," ungkap Direktur Utama Angkasa Pura Muhammad Awaluddin.

Sedangkan Menhub mengungkapkan, pada tahun ini, kegiatan Gernas BBI dikolaborasikan dengan kampanye kendaraan listrik ramah lingkungan

agar penggunaannya semakin masif. "Ini kedua kalinya kami ditunjuk sebagai campaign manager Gernas BBI. Tahun ini kami semakin kompak, dalam upaya bersama mempromosikan produk-produk UMKM buatan dalam negeri yang dikolaborasikan dengan gerakan penggunaan kendaraan listrik," kata Menhub.

Para pelaku UMKM di Indonesia harus terus didorong agar produknya semakin kreatif sehingga semakin diminati dan dicintai masyarakat. "UMKM menjadi bagian yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Hari ini ada sekitar 1.100 UMKM yang hadir di Jambi. Kita harapkan banyak transaksi dan banyak kreasi UMKM yang bisa dikembangkan," tutur Menhub.

sebagai tempat promosi produk-produk UMKM lokal.

Menhub mengungkapkan komitmennya untuk terus menggalakkan penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah bagi lingkungan. Bagian dari upaya bersama mengurangi dan mengendalikan efek gas rumah kaca yang menjadi isu global.

Untuk itu, pada tahun ini Kemenhub menggelar side event Gernas BBI yaitu Touring Kendaraan Listrik dari Jakarta-Jambi yang berlangsung selama dua hari dengan titik pemberhentian di Lampung dan Palembang. "Ini juga dilakukan dalam rangka mendorong industri otomotif nasional untuk berkreasi dan mengambil peluang memproduksi kendaraan listrik dalam negeri," ucap Men-

hub. UMKM yang 50 persen diantaranya atau 500 UMKM berasal dari Provinsi Jambi. Diharapkan paling sedikit 100 UMKM dapat onboarding melalui pelatihan yang diselenggarakan dan hasil transaksi penjualannya dapat mencapai target Rp6 miliar rupiah.

Oleh sebab itu, ke depan perlu dilakukan upaya bersama untuk mencintai produk lokal, mengembangkan UMKM dan mempromosikannya, sehingga UMKM Jambi bisa naik kelas, mempunyai kualitas yang bagus dan produknya bisa diterima. Terkait dengan upaya mengembangkan UMKM di Jambi, Bank Indonesia di Jambi, menyiapkan program go digital.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi, Suti Masniari



Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap Gernas BBI, Kemenhub telah berkoordinasi dengan semua operator prasarana dan sarana transportasi, baik di bandara, terminal, pelabuhan, stasiun, dan di fasilitas lainnya. Koordinasi untuk turut mengkampanyekan Gernas BBI ini dan memberikan space minimal 30 persen dari total yang ada untuk UMKM. Juga mewajibkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal dalam proyek infrastruktur transportasi yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Maka, modifikasi tampilan Bandara Sultan Thaha, Jambi menjadikannya juga

hub.

Gubernur Jambi Al Haris, turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memilih kota Jambi sebagai penyelenggaraan peluncuran Gernas BBI Tahun 2022. "Diharapkan kegiatan ini dapat semakin menggeliatkan para pelaku UMKM di Provinsi Jambi dan sekitarnya, serta menghasilkan produk-produk yang semakin kreatif," kata Gubernur.

Kegiatan Gernas BBI yang dipusatkan di Provinsi Jambi kali ini, akan dilaksanakan dari Januari hingga Maret 2022, dan saat ini telah terdaftar kurang lebih 1.100

Nasution di sela acara di Bandara Sultan Thaha itu mengungkapkan target untuk memberikan pelatihan digital bagi seribu UMKM di Provinsi Jambi dalam tiga bulan. Melalui pelatihan tersebut diharapkan UMKM Jambi dapat masuk ke dalam marketplace dan ekspor, sehingga usahanya semakin berkembang. "Target kita transaksi antara Rp6-7 miliar dalam tiga bulan itu," ujar Suti Masniari Nasution.

Begitu melimpah perhatian untuk Jambi kali ini. Tentu agar Jambi lebih baik dan maju dibandingkan dengan masa lalu. ●



JAMBI, KOPI KOERINTJI, DAN PELABUHAN TALANG DUKU

Pada peluncuran Gernas BBI ini, juga berlangsung pelepasan secara simbolis ekspor produk kopi arabika asal Kabupaten Kerinci, Jambi ke Korea Selatan melalui Pelabuhan Talang Duku, Jambi. Sebenarnya kopi dari Kerinci ini sudah banyak diekspor ke negara lain, seperti Belgia dan negara tetangga di kawasan Scandinavia, juga ke Jepang.

Nah, soal kopi itu, kualitasnya memang sudah teruji. Antara lain sudah mendapat sertifikat indikasi geografis Kopi Arabika Sumatera Koerintji. Kabupaten Kerinci adalah penghasil kopi arabika terbaik di Indonesia. Pada Festival Kopi 2017 di Jakarta, Kopi Kerinci dinobatkan sebagai Kopi Terbaik se-Indonesia sehingga menjadi wakil Indonesia di Festival Kopi Internasional 2018 di Vienna, Austria.

Kopi ini memiliki citarasa lima kopi terbaik Indonesia dalam satu tegukan. Lebih tepatnya dari jenis Sigarar Utang, Gayo, Andung Sari, S795, dan P88. Kopi asal Jambi ini memiliki skor sertifikasi kopi specialty sebesar 86.25. Inilah yang membuat kopi alam koerintji menjadi kopi specialty grade.

Uji sertifikasi ini dilakukan oleh pusat penelitian dan pengembangan kopi dan kakao Indonesia yang berlokasi

di Jember, Jawa Timur, serta Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia pada 2015 lalu. Rahasia kenikmatan kopi arabika Kerinci adalah ditanam pada ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, di punggung Gunung Kerinci. Selain itu, jenis tanah vulkanik yang subur juga membuat biji kopi (green beans) Kerinci lebih padat dan citarasa yang tinggi.

Tak mengherankan jika kopi koerintji kini menjadi primadona bagi para petani kopi di Kabupaten Kerinci. Para petani kopi di daerah pegunungan yang memiliki luas wilayah sekitar 3.355,27 kilometer persegi (km²) tersebut kini berlomba-lomba menanam kopi unggul jenis Arabika. Tingginya minat petani kopi di Kerinci menanam kopi jenis Arabika tak terlepas dari keberhasilan pengembangan agroindustri kopi kualitas ekspor tersebut selama tiga tahun terakhir.

Malah para petani kopi di Kerinci berhasil mengembangkan kopi jenis Arabika melalui kerja sama dengan lembaga nirlaba, yakni lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam dan luar negeri. Dua LSM yang sudah lebih tiga tahun mendampingi para petani kopi Kerinci mengembangkan kopi jenis arabika, yaitu LSM Rikolto asal Belgia dan LSM Green Development

(Greendev), anggota Konsorsium Sumatera Sustainable Support (SSS) Pundi Sumatera.

Sedangkan Pelabuhan Talang Duku (berjarak 20 km arah timur dari Kota Jambi), Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Pelabuhan yang berada di sisi Sungai Batanghari ini dapat disandari kapal berkapasitas hingga 750 dwt. Pemerintah Kota Jambi telah pula mempersiapkan rencana area datar seluas 560 ha di Kecamatan Jambi Timur yang relatif dekat dengan kawasan pelabuhan, dengan peruntukan area pembangunan kawasan industri berorientasi ekspor.

Pelabuhan ini menunjang arus ekspor barang dari pedalaman Jambi. Tentu saja termasuk kopi koerintji itu. Dari Jambi, tercatat barang-barangnya sudah menjangkau Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan Korea. Tentu saja pelabuhan Singapura juga.

Jenis kapal yang sandar pun bervariasi mulai dari kapal motor, motor tempel (outboard motor), speed boat, motor boat, ketek (small craft), sampai kapal motor tunda (tug boat) dan tongkang (barge). Paling ramai di provinsi ini. Mengingat Jambi di masa lalu dengan nama Zabag, Muara Sabak sekarang. ●

AYO ATASI KESENJANGAN LITERASI DIGITAL

Salah satu upaya memulihkan dan mendongkrak ekonomi hingga pelosok nusantara adalah program digitalisasi. Bagaimana mengatasi kesenjangan digital antardaerah?

Kerap mendengar belum tentu memahami. Apalagi berhasil menerapkannya. Begitu pula tentang digitalisasi.

Ini memang terkait dengan revolusi industri 4.0. Pilar utamanya adalah teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi telah memberi banyak kemajuan bagi kehidupan manusia. Terlebih semakin meningkatnya pemanfaatan komputer dan internet dalam membantu memudahkan berbagai pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Lewat komputer dan perangkat lain yang menjadi produk pengembangannya termasuk gawai (gadget), segala jenis informasi bisa diakses dan disebarluaskan dengan mudah melalui jaringan internet.

Dalam perkembangannya, tidak semua informasi yang tersebar luas di internet positif. Tak sedikit pula berisi informasi negatif, contohnya penyebaran berita bohong, radikalisme, ujaran kebencian, dan penipuan. Diperlukan kebijakan dan kemampuan dari setiap pengguna gawai dalam mengendalikan informasi yang mereka dapat di jaringan internet.

Pemerhati teknologi informasi asal Amerika Serikat, Paul Gilster, memunculkan istilah baru yakni literasi digital. Ini

kemudian menjadi sebuah istilah baku dalam bukunya *Digital Literacy* yang terbit pada 1997. Sedangkan UNESCO memperkuat istilah literasi digital. Menurut Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, literasi digital berhubungan dengan kecakapan (life skill) karena tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital.

Menurut Yudha Pradana dalam *Atribusi Kewargaan Digital dalam Literasi Digital* (2018), terdapat empat prinsip dasar dalam literasi digital. Pertama adalah pemahaman di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang tersaji di internet sebagai media komunikasi, baik secara implisit maupun eksplisit.

Kemudian terjadi saling ketergantungan dan saling melengkapi terhadap informasi yang tersaji. Lalu terdapat pula peran sosial di dalamnya. Berikutnya adalah kurasi atau kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk diolah sebagai pesan positif.

Saat ini, kemampuan masyarakat

dalam memahami informasi di ranah digital yang berkembang dalam jaringan internet sudah semakin maju. Mereka sudah mulai mampu menyaring informasi mana saja yang layak untuk dikonsumsi dan apa saja yang kemudian dikategorikan sebagai informasi negatif.

Hal ini diketahui dari hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1-5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abriyani Pangerapan mengungkapkan, pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 dilakukan melalui survei tatap muka kepada 10.000 responden di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Karakteristik responden adalah pengguna internet berusia 13–70 tahun. Dari survei tersebut ditemukan bahwa budaya digital (digital culture) mendapatkan skor tertinggi, 3.90.

Diikuti etika digital (digital ethics) (3.53), dan kecakapan digital (digital skill) sebesar 3.44. Kemudian keamanan digital (digital safety) mendapat skor terendah, 3.10 atau sedikit di atas sedang. Pengukuran indeks literasi digital ini selain untuk mengetahui status literasi digital di Indonesia juga untuk memastikan upaya peningkatan literasi digital masyarakat makin tepat sasaran.

"Kita ingin terus mempercepat dan mengawal terus tingkat literasi digital masyarakat, mengimbangi dengan perkembangan teknologi digital yang cepat dan makin strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini," ujar Dirjen Pangerapan dalam acara Peluncuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 di Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022.



Panel Ahli Katadata Insight Center, Mulya Amri menjelaskan, bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, pada kerangka indeks 2021 terdapat perubahan dalam pengelompokan unsur pembentuk penyusun indeks. "Ini adalah upaya untuk terus memastikan Indonesia memiliki alat ukur yang ajeg dan kini kita sudah punya roadmap atau peta jalan yang bisa dijadikan acuan baik dalam pengukuran maupun upaya peningkatan literasi," kata Mulya.

Terkait masih rendahnya skor keamanan digital, Mulya berpendapat, ini berhubungan kesadaran masyarakat akan minimnya pemahaman dari keamanan dalam mengunggah data pribadinya ke publik. "Kami menemukan misalnya, masih banyak yang tidak menyadari bahaya dari mengunggah data pribadi," ujar Mulya.

Seluruh informasi mengenai kegiatan literasi digital dapat diikuti melalui literasidigital.id. Sedangkan hasil survei indeks literasi digital dapat dibaca dan diunduh melalui status.literasidigital.id. Sementara itu, pihak Kominfo bersama lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Universitas Oxford sedang menggodok pengukuran kecakapan digital dan literasi digital untuk keperluan pertemuan G20.

"Tujuannya, kita mendorong pengukuran literasi digital dan kecakapan digital itu dapat berlaku untuk semua negara anggota G20. Jadi, ini sangat relevan dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan dalam menggalakkan literasi digital di Indonesia," kata Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi.

Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara G20 2022, Indonesia telah menetapkan literasi digital sebagai isu utama yang akan dibahas bersama negara-negara peserta. Pengukuran literasi digital yang nantinya diajukan dalam KTT G20 akan menjadi tolok ukur dari negara untuk menyiapkan masyarakatnya menghadapi realitas baru di era digital.

Jadi, literasi digital juga berkaitan dengan pergaulan antarbangsa di berbagai bidang: ekonomi, bisnis, politik, hingga pertahanan dan keamanan. Namun, masalah di dalam negeri adalah kesenjangan literasi digital antardaerah.

Beberapa daerah memiliki indeks literasi digital yang sangat tinggi. Namun

ada daerah-daerah yang literasi digitalnya sangat rendah.

Hasil survei Kemenkominfo dan beberapa media yang mencakup 34 provinsi antara 4 Oktober hingga 24 Oktober 2021 memang menunjukkan kenaikan indeks. Maka, boleh dikatakan, Indonesia memang mengalami peningkatan literasi digital.

Namun, survei yang sama juga menunjukkan kesenjangan literasi antar daerah. Dari sisi ini, yang memiliki skor tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 3,71. Sedangkan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara belum masuk dalam 10 besar daerah dengan

6. Sulawesi Tenggara	3,43
7. Bali	3,43
8. Sumatera Selatan	3,44
9. Nusa Tenggara Barat	3,45
10. Maluku	3,46

Indeks penilaian tersebut juga menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki, usia muda, berpendidikan tinggi, dan tinggal di daerah urban cenderung memiliki Indeks Literasi Digital di atas rata-rata nasional.

Dari laporan survei ini juga terungkap waktu yang paling banyak digunakan untuk mengakses internet adalah pukul 7-10 pagi dan 7-9 malam. Sedangkan penggunaan internet banyak dilakukan



literasi digital tertinggi. DKI hanya mendapat skor 3,51 atau sedikit di atas rata-rata nasional.

Berikut 10 daerah dengan skor literasi tertinggi 2021:

1. DI Yogyakarta	3,71
2. Kepulauan Riau	3,68
3. Kalimantan Timur	3,62
4. Sumatera Barat	3,61
5. Gorontalo	3,61
6. Papua Barat	3,61
7. Nusa Tenggara Timur	3,60
8. Kalimantan Barat	3,58
9. Aceh	3,57
10. Kalimantan Utara	3,57

Sedangkan Maluku Utara menjadi provinsi dengan skor literasi digital terendah 2021, yaitu 3,18. Berikut 10 daerah dengan skor terbawah:

1. Maluku Utara	3,18
2. Riau	3,35
3. Papua	3,37
4. Banten	3,37
5. Jambi	3,41

untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, menggunakan media sosial, serta mencari informasi.

Untuk akses informasi, laporan ini menunjukkan WhatsApp dan Facebook masih menjadi primadona. Padahal, dua media tersebut dianggap paling sering menyajikan berita bohong atau hoaks.

Dari berbagai informasi hasil survei itu tampak sejumlah tantangan untuk mengatasi kesenjangan literasi digital antardaerah. Juga kesenjangan literasi digital menurut gender maupun berdasarkan wilayah desa-kota.

Lebih dari itu, tampak pula bahwa internet of things, salah satu aspek penting revolusi industri 4.0 yakni berbagai perangkat yang dikaitkan dengan internet, masih didominasi oleh hal-hal yang jauh dari produktivitas ekonomi. Ringkasnya, penggunaan internet untuk meningkatkan penghasilan atau bisnis masih minim atau belum meluas. •



Selamat Hari Pers Nasional

KEMERDEKAAN MASIH SETENGAH TIANG

Era disruptif membawa lebih banyak tekanan sekaligus peluang baru. Industri pers nasional dituntut untuk beradaptasi dengan cepat, mempelajari kompetensi baru dan inovatif. Di saat yang sama, isu klasik kemerdekaan pers masih menjadi persoalan fundamental yang menggantung. Ia tetap menjadi sorotan utama setiap kali Hari Pers Nasional dirayakan.

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Bangun mengakui, pemerintah saat ini memang tidak diskriminatif dalam memberi dukungan terhadap industri pers nasional. Pemerintah bermaksud agar pers nasional tetap bertahan dan mampu menunjukkan

eksistensinya dalam menghadapi perubahan, terutama di masa pandemi.

"Support ke industri pers sama dengan support untuk bidang lain, yang tujuannya agar semua sektor ekonomi dapat bertahan di masa pandemi," kata Hendry Bangun kepada Info Indonesia, Selasa (8/2/2022).

Meskipun pemerintah tidak secara langsung menangani isu-isu pers, tetapi terdapat beberapa bantuan berarti yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan media Tanah Air. Misalnya, penundaan pajak perusahaan hingga kuota iklan layanan pemerintah dari anggaran pemulihan ekonomi nasional.

al (PEN).

Sementara untuk menjamin kebebasan pers, pemerintah sudah membentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Polri. Pada intinya, SKB tersebut dapat melindungi jurnalis atau karya-karya jurnalistik yang dihasilkan oleh suatu media.

"Dewan Pers mendapat kewenangan untuk menentukan apakah sebuah berita yang diadukan produk jurnalistik atau bukan. Artinya, di sini pemerintah mengedepankan UU Pers bila ada pengaduan masyarakat terhadap pers," ujarnya.

Dia mengingatkan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bukanlah senjata untuk memperkarakan jurnalis.

Sebab, UU tersebut sudah memiliki tafsir sendiri yang menutup potensi kriminalisasi atas karya jurnalistik.

Meski demikian, pemerintahan Jokowi masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditangani dalam hal menjunjung tinggi kebebasan pers di Tanah Air. Demikian dikatakan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito.

Dia menyebut contoh kasus belum maksimalnya akses internet di Papua. Minimnya infrastruktur internet di sana tentu menghambat kerja para jurnalis yang meliput di wilayah paling timur Indonesia itu.

Tidak hanya itu, Sasmito menganggap pemerintah masih menutup keran kebebasan pers di Papua. Masih terdapat kebijakan pemerintah yang melarang masuknya jurnalis asing di wilayah rawan konflik itu. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan janji politik Presiden Jokowi.

"Catatan pemerintah sendiri, di tahun 2006 sampai 2020-an itu ada 14 jurnalis asing yang ditolak ke Papua. Belum lagi ada stigma terhadap teman-teman jurnalis di Papua dan sebagainya. Ini akan menjadi persoalan," kata Sasmito.

Masih menurut Sasmito, kebebasan pers di era Jokowi cukup buruk karena ada banyak jurnalis yang dikriminalisasi memakai UU ITE. Ia menyebut beberapa wartawan seperti Muhammad

Arsul, Diananta Sumedi, dan Muhammad Sadli Saleh harus menjalani masa kurungan meskipun tulisan mereka sudah ditetapkan sebagai karya jurnalistik oleh Dewan Pers.

Dalam pandangannya, SKB Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE yang diteken Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung, tidak diterapkan

untuk melindungi pers nasional agar kualitas jurnalismenya lebih baik, dan bisa bertahan di tengah pandemi serta disrupsi digital.

"Banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya menghapus pajak langganan berita buat teman-teman media dan sebagainya, dan itu sebenarnya akan lebih baik kalau ada riset yang



maksimal di lapangan. Memerjarakan jurnalis dengan UU ITE masih kerap terjadi hingga saat ini.

Sasmito mendesak kepolisian turut berlaku adil dalam melindungi kalangan pers. Kasus-kasus kekerasan polisi terhadap wartawan mesti cepat ditindaklanjuti.

Sasmito juga turut berkomentar soal perkembangan industri media. Menurutnya, pemerintah punya banyak cara

dilakukan pemerintah di bidang jurnisme. Sayangnya, risetnya masih sangat kecil," ujar Sasmito.

Apa-apa Pidana

Dari pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat, pekerja media masih kerap mengalami kriminalisasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, sampai masuk ranah gugatan perdata.

Advocat dan Researcher LBH Pers, Ahmad Fathanah, mengatakan, regulasi pemerintah yang kerap dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pers adalah UU ITE. "Orang-orang yang tidak paham konteks hukum pers langsung mengatur dengan ranah pidana. Padahal (sengketa pemberitaan) ada mekanismenya sendiri," kata Ahmad.

Penggunaan UU ITE untuk mengkriminalisasi wartawan jelas-jelas mengesampingkan UU Pers yang bersifat *lex specialis*. Dia ingatkan bahwa aparat penegak hukum memiliki nota kesepahaman dengan Dewan Pers terkait sengketa pers. Untuk menjaga kebebasan pers, pihak-pihak yang terlibat sengketa pers harus mengedepankan UU Pers dalam proses penyelesaian masalahnya.

"Sebenarnya kepolisian punya kewenangan mengajukan pelapor

dibawa ke Dewan Pers," ujarnya.

LBH pun menilai pemerintah tidak memberikan perlindungan maksimal bagi wartawan. Terlihat di masa pandemi COVID-19, pemerintah dan DPR malah mengesahkan UU Omnibus Law. Padahal, UU tersebut berpotensi merugikan para pekerja termasuk wartawan.

LBH Pers meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan para wartawan di masa pademi. Misalnya, Jokowi membuat suatu kebijakan yang terkait upah wartawan. "Seharusnya merujuk pada UMP. UMP itu kan upah standar bagi semua sektor jenis pekerjaan atau Jokowi membuat suatu kebijakan khusus terkait upah bagi pekerja pers," ujar Ahmad.

Ada pula catatan positif dari LBH Pers. Belakangan, pemerintah kerap melibatkan insan pers di setiap agenda pembangunan nasional. Hal ini menjadi jalan awal untuk menuju kebebasan pers, sehingga indeks demokrasi Indonesia kembali membaik.

"Soal mendahulukan pembangunan infrastruktur dan ekonomi ketimbang menjaga aspek kebebasan sipil termasuk kebebasan pers, saya pikir tidak ya. Karena pembangunan itu untuk masyarakat luas juga. Yang bisa kita lihat adalah bagaimana pers dilibatkan dalam pembangunan nasional," ujarnya.

Sebatas Komitmen

Plt Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami berpendapat, selama hampir dua periode menjabat sebagai presiden, sebenarnya Jokowi telah menjamin kebebasan pers. Hal itu ditandaidan-

gan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Dewan Pers bersama Polri tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers pada tahun 2017.

Namun, MoU itu tercoreng dengan masih adanya kriminalisasi terhadap wartawan. Kasus kriminalisasi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan menjadi bukti nyata. Aparat penegak hukum yang berada di daerah tidak memahami secara mendalam makna dari UU Pers.

"Untuk itu, komitmen pemerintah ke depan yang menjamin kebebasan pers perlu dibuktikan, agar pekerja pers tetap menjaga independensi dan objektivitas," Athiqah.

Menurut Athiqah, kebebasan pers sangat berkaitan erat dengan demokrasi di Indonesia. Pers merupakan pilar keempat dalam demokrasi. Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pers memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa tetap kondusif.

Merujuk pada survei yang dilakukan Reporters Without Borders (RSF), indeks kebebasan pers Indonesia naik ke posisi 119 pada 2020 dari posisi 124 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, survei yang dilakukan Freedom Institute dan V-Dem Institute tahun 2020 juga menunjukkan indeks kebebasan pers di Indonesia meningkat.

Athiqah mengatakan, kebebasan pers sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Kebebasan pers juga menjadi indikator penting dalam menilai demokrasi suatu negara.

"Kebebasan pers menjadi salah satu indikator dalam menilai kondisi demokrasi global, baik yang menunjukkan gejala stagnasi atau kemunduran," katanya.



Sedangkan peneliti politik lainnya dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menilai, kebebasan pers di periode kedua Presiden Jokowi mengalami sedikit penurunan. Sebetulnya, perbedaan sudut pandang dalam pemberitaan pers adalah hal yang dinanti. Tapi kini, perbedaan sudut pandang terutama dari pihak yang kritis terhadap pemerintah justru mengalami perlawanan.

Untuk mencegah resistensi itu, fungsi Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam penyelesaian masalah karya jurnalistik harus diperkuat.

"Hal ini bertujuan untuk melindungi profesi jurnalis dari adanya ancaman kriminalisasi oleh pihak lain yang kurang berkenan dengan pemberitaan media," tuturnya.

Dikuasai Oligarki

Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, menilai, saat ini Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi. Salah satu penanda penting dari kemunduran demokrasi ini adalah tergerusnya kebebasan sipil, termasuk diantaranya kebebasan pers.

Kata Wijayanto, tergerusnya kebebasan pers ditandai oleh beberapa hal. Salah satu indikator serius tentang perlindungan dan kebebasan pers, dalam hal ini aktor yang paling penting ialah jurnalis. Belakangan banyak jurnalis yang mengalami kriminalisasi karena produk pemberitaannya. Bahkan sampai dituntut ke meja hijau menggunakan UU ITE.

Akhir-akhir ini juga marak kasus pereetasan website yang dipicu ketidakpuasan terhadap artikel jurnalistik. "Jenis lainnya ialah teror siber yang mengarah pada jurnalis. Misalnya akun media sosial jurnalis diretas gara-gara produk pemberitaannya dianggap tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu," kata Wijayanto.

Selain itu, terdapat halangan kebebasan pers dalam bentuk yang tidak kasat mata, yakni ekonomi sosial dan politik media. Contoh paling jelas adalah media-media besar yang dimiliki oleh segelintir konglomerat. Mereka berasal dari kalangan profesional atau

pemimpin partai politik.

Konglomerat yang berasal dari kalangan profesional ini rawan didekati oleh kekuasaan atau sebaliknya, sehingga pemberitaan di medianya menjadi lunak apabila berkaitan dengan kinerja pemerintahan.

"Jadi, konglomerasi media oleh

dan kekuasaannya.

"Di Indonesia, media menjadi salah satu referensi oligarki yang paling konkret. Karena kita bisa melihat siapa pemilik medianya, dari partai mana, apakah dekat dengan kekuasaan apa tidak, lalu bagaimana hubungan mereka dengan kekuasaan. Ini terlihat jelas,"



Plt Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami



Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto

orang-orang yang ada di parpol dan menjadi bagian kekuasaan hari ini tentu saja itu melemahkan kebebasan pers. Ditambah lagi mereka atau media yang tadinya oposisi kemudian merapat kepada kekuasaan. Kemudian semua ditarik untuk mendukung kekuasaan, baik menggunakan cara halus ataupun tidak," terang Wijayanto.

Dia menegaskan bahwa salah satu penyebab tergerusnya kebebasan sipil adalah oligarki atau persengkokolan antara mereka yang kaya dan berkuasa untuk mempertahankan kekayaan

tegus dia.

Dia setuju dengan anggapan yang menyebut pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode sangat fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Masalah laten seperti hak asasi manusia (HAM) hingga kebebasan pers tidak masuk prioritas penanganan pemerintah.

"Pengabaian itu berarti tidak memberikan dukungan terhadap kebebasan pers. Mulai dari mendukung jurnanisme itu sendiri ataupun industri pers secara umum," ujarnya. •



Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak:

“MAU SAYA TOLAK JUGA BAGAIMANA COBA?”

Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) sudah memiliki panglima setelah sempat kosong selama dua bulan.

Pangkostrad baru itu adalah Letjen TNI Maruli Simanjuntak.



Dengan pangkat Mayjen TNI, Maruli Simanjuntak, resmi menjabat Pangkostrad setelah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., memimpin acara serah terima jabatan (sertijab) di Aula Jenderal Besar AH Nasution Lantai III Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad). Dalam upacara pada Senin, 31 Januari 2022 itu, berlangsung sertijab 14 14 jabatan strategis TNI AD, meliputi jabatan Pangkotama dan Kabalakpus TNI AD serta Dandenmabesad.

Selain penyerahan tongkat Pangkostrad kepada Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., sertijab Pangkotama lainnya adalah jabatan Dankodiklat AD diserahkan dari Letjen TNI A.M. Putranto, S.Sos., kepada Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A., Pangdam III/Siliwangi dari Mayjen TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., kepada Mayjen TNI Kunto Arief Wibisono, S.I.P., Pangdam IX/Udayana dari Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., kepada Mayjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M., Pangdam XIV/Hasanuddin dari Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, S.H., kepada Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H., Pangdam XVII/Cenderawasih dari Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A., kepada Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M.M., Pangdam XVIII/Kasuari dari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr(Han), kepada Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos., dan Danjen Kopassus dari Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M.M., kepada Brigjen TNI Widi Prasetyono. Demikian informasi dari Dispen TNI dan Dispenad.

Berlangsung pula sertijab Kabalakpus TNI AD antara lain Kapuspalad dari Mayjen TNI Sigid Witjaksono, S.I.P., M.Si., kepada Brigjen TNI Eko Erwanto, jabatan Danpusintelad dari Brigjen TNI Sudarji kepada Kolonel Inf Asep Abdurachman, S.E., M.M., Kadisbintalad dari Brigjen TNI Edison, S.E., M.M., kepada Brigjen TNI Hindro Martono, Kadisjarahad dari Brigjen TNI Dr. Rachmat S., S.I.P., M.M., M.Tr(Han) kepada Brigjen TNI R.L. Simandjuntak dan Kadisinfohtahtad dari Brigjen TNI Drs. Winarto, M.Hum., kepada Kolonel Chb Fitri Taufiq Sahary, S.E., M.M.

Sedangkan jabatan Dandenmabesad diserahkan dari Brigjen TNI Haryono, S.Sos., M.Si., kepada Brigjen TNI Ardiheri.

Pada kesempatan yang sama juga berlangsung penandatanganan berita acara serah terima Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Pengurus Gabungan Kostrad dan Kodiklatad, Ketua Persit KCK Pengurus Daerah masing-masing Kodam, Ketua Persit KCK Cabang BS Kopassus dan Ketua Persit KCK Pengurus Cabang masing-masing Balakpus, serta Ketua Persit KCK Cabang Denmabesad PD Mabesad.

Dalam sambutannya Kasad menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pejabat yang telah menjalankan tugasnya di jabatan

kepada pejabat yang menduduki jabatan barunya. Antara lain agar para perwira itu berani mengambil keputusan, dapat melakukan terobosan maupun gebrakan baru yang bermanfaat, mampu mengembangkan inovasi dan imajinasi, memiliki visi dan misi, serta harapan dan cita-cita yang setinggi mungkin untuk memajukan organisasi.

Dari sekian perwira tinggi yang menduduki jabatan baru, tak pelak lagi Maruli Simanjuntak adalah salah satu perwira yang paling menarik perhatian publik. Terlebih, selain rekam jejak karirnya yang meyakinkan, ia juga merupakan menantu dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Soal hubungan kekeluargaan itu,



lama. Menurut Kasad, di samping melaksanakan tugas pokoknya juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Salah satunya seperti yang telah dilakukan Mayjen TNI Maruli Simanjuntak saat menjabat Pangdam IX/Udayana, telah melakukan gerakan penghijauan di wilayah Kodamnya sehingga daerah yang tadinya merupakan padang tandus, kini bisa hijau dan menghasilkan air berkat uluran tangan prajurit yang ada di sana. Kasad berharap upaya yang telah dilakukan Mayjen TNI Maruli tersebut dapat dilanjutkan pejabat selanjutnya.

Kasad juga menyampaikan moti-

pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dikenal sebagai sosok cerdas, akademik, rendah hati dan memiliki kemampuan intelijen yang baik. "Saya heran bila ada mantu Jenderal naik pangkat pasti heboh. Padahal harusnya lihat juga yang bersangkutan berkemampuan yang baik ya," ujarnya, akhir Januari 2022 lalu.

Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pangkostrad baru. Antara lain, kata dia, meningkatkan kemampuan militer dan akademik Sumber Daya Manusia (SDM) Kostrad.

Selain itu, meningkatkan pengetahuan kekinian seperti IT, dan situ-

asi dan kondisi negara yang dilanda pandemi Covid 19. "Termasuk meningkatkan kemampuan intelijen serta interoperabilitas prajurit dan perwira," ucapnya.

Sedangkan dari dalam parlemen, Anggota Komisi I DPR-RI Christina Aryani menilai Maruli Simanjuntak layak mengemban jabatan Pangkostrad karena rekam jejaknya yang teruji dalam tugas-tugas yang diemban selama ini.

"Dalam jabatan sebagai Pangdam

merupakan jabatan yang sangat strategis. "Kami percaya Pangkostrad baru akan mampu melakukan tugasnya dengan profesional," tutur Politikus Partai Golkar ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, TNI adalah milik negara dan politik yang dijalankan adalah politik negara. Dia menuturkan bahwa tantangan pertahanan dan keamanan ke depan bukan hal mudah.

"Sehingga kami berharap Pangko-

Dia berpendapat bahwa penunjukan Maruli Simanjuntak itu mengakhiri kekosongan jabatan Pangkostrad selama lebih dari dua bulan dan telah melewati proses sebagaimana mestinya di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). "Kami meyakini keputusan diambil berdasarkan pertimbangan matang sesuai kebutuhan Kostrad sebagai komando utama tempur TNI AD terbesar, sesuai dengan tantangan pertahanan dan keamanan ke depannya," tandasnya.

Yang juga layak dipertimbangkan, salah satu rekam jejak Maruli Simanjuntak adalah kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo. Karena menantu Menko Luhut ini pernah menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) pada 2018 sampai 2020, dan wakil komandan Paspampres TNI pada 2017-2018.

Selain itu, para pengamat juga menilai status dia sebagai menantu Luhut Pandjaitan, juga memberi pengaruh tertentu, sedikit atau banyak. Ia menikahi putri sulung Luhut, Paulina Uli boru Pandjaitan, pada 1999, dan mereka dikaruniai anak perempuan semata wayang, Faye boru Simanjuntak.

Sedangkan menurut Maruli, jabatan Pangkostrad merupakan tanggung jawab besar. "Mau jadi Pangkostrad pun saya tidak tahu, saya tidak pernah terucap untuk mengatakan itu, jadi saya bekerja saja," ujarnya di Media Center Korem 163/WSA di Denpasar, Bali, Senin, 24 Januari 2022

Menurut dia, jabatan itu melekat dengan tugas dan kewajiban. "Iya mau saya tolak juga berkaitan (dengan Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan), bagaimana coba. Saya juga tahu persis Presiden (Jokowi) itu bagaimana bekerjanya, kebetulan saya bertahun-tahun dengan beliau," ujarnya.

Jarang pula yang melihat latar keluarga asal Maruli Simanjuntak. Namun, Darius Simanjuntak, 84, ayah Maruli, mengaku bersyukur kepada Tuhan atas pengangkatan sang anak menjadi Pangkostrad. "Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas diangkatnya Maruli Simanjuntak jadi Pangkostrad. Sedikitpun kami tidak menyangka karir militer anak kami



IX Udayana, ia memiliki kinerja baik utamanya menyangkut tata kelola, penggunaan dan pelaporan anggaran. Dalam kunjungan kerja saya dan rekan-rekan Komisi I ke Bali tahun lalu, saya menilai yang bersangkutan tegas yang tidak neko-neko," kata Christina.

Ia menjelaskan, Pangkostrad tentu

strad yang baru mampu mengelola tantangan dengan baik sesuai tupok-sinya yaitu membina kesiapan operasional jajaran komandonya serta menyelenggarakan operasi keamanan pada tingkat strategis, selaras dengan kebijakan, dan arahan Panglima TNI dan KSAD," imbuhnya.

sampai berada di puncak itu, karena kami ini adalah orang yang ekonominya pas-pasan,” ujar Darius awal Februari 2022.

Sedangkan sejak awal karirnya, sebagian besar wilayah tugas Maruli Simanjuntak adalah satuan tempur, khususnya Kopassus TNI AD dan Detasemen Tempur Cakra di Kostrad. Jabatan strategis pertama yang dia emban adalah komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002. Usai menjabat selama kurang lebih tiga tahun, dia dipercaya menjabat Perwira Pembantu Madya Operasi Kopassus TNI AD dari 2005-2008.

Kemudian, dia bertugas sebagai komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus TNI (2008-2009), dan dia memperoleh promosi jabatan sebagai komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD pada 2009-2010.

Perwira AD kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970 itu kemudian mengisi posisi wakil komandan Grup 1 Kopassus TNI AD pada 2010-2013, dan lanjut bertugas sebagai komandan Grup 2 Kopassus TNI AD pada 2013-2014.

Selanjutnya ia menjabat Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus TNI AD pada 2014. Pada tahun yang sama hingga 2016 Maruli bertugas sebagai komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden TNI.

Grup A Pasukan Pengamanan Presiden TNI bertanggung jawab menjaga, mengawal, dan mengamankan presiden dan pasangan resminya (ibu negara atau suami presiden), dan keluarga intinya 24 jam sehari, tujuh hari sepekan. Di manapun figur-figur penting berada dan dalam keadaan atau kepentingan apapun, menjadi medan operasi mereka.

Ia kemudian menjabat komandan Korem 074/Warastratama (2016-2017), wakil komandan Pasukan Pengamanan TNI (2017-2018), kepala staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro pada 2018, dan komandan Paspampres TNI pada 2018-2020. Posisi komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI ini “secara tradisional” diisi perwira tinggi TNI yang berlatar belakang pasukan komando/khusus

dari ketiga matra TNI.

Kemudian dia menjadi panglima Kodam IX/Udayana selama lebih dari setahun, yaitu dari November 2020 sampai Januari 2022. Dalam SK Panglima TNI Andika Perkasa Maruli Simanjuntak akan menerima kenaikan pangkat satu tingkat dari mayor jenderal ke letnan jenderal.

Salah satu prestasinya adalah saat menjabat komandan Korem 074/Warastratama. Dalam jabatan itu ia menerima anugerah komandan Korem terbaik Bidang Program Upaya Khusus Ketahanan Pangan Tingkat Nasional 2016. Penghargaan tersebut saat itu diberikan langsung Kepala Staf TNI AD (saat itu) Jenderal TNI Mulyono (2015-2018) pada Apel Komandan Korem dan Komandan Kodim seluruh Indonesia di Sekolah Calon Perwira TNI AD

ran dana. Sebagai Pangdam, Maruli Simanjuntak pun patuh mengisi laporan kekayaan pejabat negara (LHKPN). Tercatat pada 31 Desember 2021 sebagai panglima Kodam IX/Udayana, ia tercatat memiliki kekayaan sebanyak Rp51.654.737.058.

Tidak hanya di lingkungan militer, dia juga menorehkan prestasi di luar lingkungan kerjanya sebagai prajurit. Ia merupakan atlet judo nasional yang pernah berkompetisi sampai tingkat dunia terutama saat menjadi perwira pertama, saat dia menyabet dua gelar juara pada Kejuaraan Judo Militer ASEAN di Filipina untuk kelas 71 kilogram dan kelas bebas pada 1997. Ia pun diadai sebagai pemain terbaik.

Berbekal pengalamannya itu, dia pun dipercaya mengisi posisi sebagai ketua umum PB Persatuan Judo Selu-



di Bandung, Jawa Barat.

Kemudian, Kodam IX/Udayana di bawah kepemimpinan dia juga menerima berbagai penghargaan sepanjang 2021. Beberapa penghargaan itu di antaranya Kodam IX/Udayana dinilai sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan yang memiliki realisasi anggaran tertinggi berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran 2020.

Kodam IX/Udayana saat itu masuk dalam Kategori Pagu Besar dan dinilai memiliki kinerja baik dalam tata kelola anggaran, termasuk di antaranya terkait penggunaan dan pelapo-

ruh Indonesia (PB PJSI) periode 2021-2026 pada November 2021. Ia berencana mencetak banyak atlet judo berprestasi di tingkat dunia, terutama pada kompetisi SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, serta bertekad membawa atlet judo Indonesia lolos kualifikasi Olimpiade 2024 di Paris.

Toh sejumlah pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan panglima baru Kostrad. Para pengamat menyebutkan antara lain ancaman siber, dampak pandemi Covid-19, dan kapasitas dan kemampuan prajurit dalam menangani konflik bersenjata di dalam negeri. Nah, selamat bertugas Jenderal!!!! •



PLTS Terapung Cirata

INOVASI YANG MENJADI MODEL PENGEMBANGAN

Mulai memasuki tahap pengembangan teknis (engineering) pada Agustus 2021, apa kabar Pembangkit Listrik Tenaga Surya terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat? Selesai pada November 2022 nanti dan menjadi contoh proyek sejenisnya.

Dua tahun berlalu sejak kesepakatan Indonesia dan Uni Emirat Arab membangun PLTS Cirata berlalu. Momen itu melibatkan langsung Presiden Joko Widodo dan putra mahkota Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, pada Januari 2020.

Salah satu dari kesepakatan bisnis itu adalah pengembangan PLTS Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat. Perusahaan energi baru terbarukan (EBT)

Masdar, yang berbasis di Abu Dhabi, UEA, bermitra dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI) membangun PLTS Terapung Cirata berkapasitas 145 Mega Watt Peak (MWP).

Nilai investasi di pembangkit ini mencapai Rp1,8 triliun. PLTS Terapung Cirata pun memecahkan rekor pembangkit bertenaga surya terbesar di Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN, melampaui Cadiz Solar Powerplant di Filipina yang berkapasitas 132,5 MW.

Di bidang teknologi, UEA memang maju pesat. Selain EBT, negeri petrodolar di Timur Tengah itu pun sudah memulai misi angkasa luar dengan mengirim satelit ke Planet Mars.

Namun, kembali berpijak ke bumi, proyek PLTS Cirata kerja sama Indonesia UEA itu terus berlanjut dengan realisasi. Pada awal 2022 ini tersiar kabar model pengembangan PLTS di bendungan sungai dapat diterapkan lebih luas di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kami sudah melakukan di PLTS

Cirata, proyek kerja sama dengan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) yang bisa direplikasi di seluruh sungai di Indonesia,” ujar Erick dalam peringatan HUT Ke-2 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Selasa, 8 Februari 2022.

Ia mengatakan proyek PLTS tersebut mampu menghasilkan listrik hingga 145 Megawatt (MW) dan berpotensi mengurangi emisi sebesar 214 ribu ton. Selain yang pertama di Indonesia dan sekaligus terbesar di ASEAN, PLTS Cirata merupakan alternatif penggunaan area perairan sebagai sumber energi.

Erick mengatakan dengan menggunakan area perairan sebagai sumber energi, tidak hanya sektor pertanian yang mendapatkan manfaat. “Tentu industri lainnya juga, sekaligus membuka peluang industri baru, penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih besar, harga energi yang lebih terjangkau serta bermanfaat bagi kegiatan sosial dan ekonomi lainnya,” sambungnya.

Di sisi lain, harga jual listrik dari PLTS Terapung Cirata yang hanya US\$5,81 sen per kWh telah menjadi acuan bagi pengembangan PLTS di Indonesia. Memang masih lebih mahal dari listrik PLTU (batu bara) saat ini yang berkisar sekitar 3 sen dolar per kWh.

Namun, untuk jika membangun PLTU baru, maka harga jual listriknya akan kalah oleh PLTS baru. Terlebih dalam kondisi harga jual batu bara yang melonjak sepanjang tahun lalu hingga awal 2022 ini. Simpulannya, jika sama-sama membangun PLTU dan PLTS sekarang, maka, harga listriknya akan lebih murah yang bertenaga cahaya.

Peluangnya, menurut Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chrisnawan Anditya, pemanfaatan energi surya di RI masih sangat rendah meskipun harga pembangkit EBT semakin ke sini semakin murah.

PLTS dengan kapasitas di atas 10 MW, kata dia, membuat harganya menjadi lebih murah, yakni di kisaran US\$ 5 sen kWh, turun jauh dari harga yang mulanya ada di kisaran US\$ 10 sen per kWh. “Tadinya US\$ 10 sen, kini sudah ke arah US\$ 5 sen (per kWh) dengan

masuknya Cirata, Bali US\$ 5,5 sen-US\$ 5,9 sen,” tandasnya

Tak mengherankan jika Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan penyediaan energi bersih melalui pemanfaatan energi hijau, khususnya energi surya, menjadi salah satu priori-

nyebutkan tren penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) terus meningkat dari waktu ke waktu seiring kemajuan teknologi. Ini membuat harga listrik bersih kian murah ketimbang bahan bakar fosil.

Kuntoro mengatakan kemajuan teknologi akan membuat keseimbangan persaingan usaha antara EBT dan



tas untuk mencapai target penurunan gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030.

Tidak hanya itu, ia mengatakan pemanfaatan energi surya juga dapat mewujudkan target nol emisi (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat. Dadan meminta PLN dapat mendorong pengembangan EBT, termasuk PLTS terapung yang memiliki potensi besar di PLTA yang sudah ada dan waduk.

Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto me-

energi fosil. “Tadinya, PLTU lebih murah daripada energi baru terbarukan, maka karena kemajuan teknologi energi baru terbarukan juga akan menjadi jauh lebih murah daripada PLTU,” ujarnya dalam seminar transisi energi dan sumber daya mineral yang dipantau di Jakarta, Senin, 7 Februari 2022.

Jadi, Kuntoro mengapresiasi upaya PT PLN (Persero) yang sekarang sedang membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat, karena harga listrik dari pembangkit itu hanya empat sen dolar AS per kWh. Menurut menteri era Kabinet Reformasi Pem-

bangunan itu, pembangkit listrik berbahan bakar fosil kini telah tertinggal dari sisi teknologi, sehingga secara komersial akan sulit bersaing dengan EBT.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan salah satu yang menjadi penggerak transisi energi global adalah biaya teknologi energi hijau yang semakin turun dan semakin rendah dari waktu ke waktu. Menurutnya, harga panel surya telah mengalami penurunan sebesar 90 persen dalam satu dekade terakhir pada rentang 2010 sampai 2020.

Adapun harga turbin angin juga turut mengalami penurunan sebesar 48

pakan perusahaan patungan antara PT PJBI (51 persen), unit usaha PT PLN (Persero), dan Masdar (49 persen), unit usaha Mubadala, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab.

Sedangkan pembiayaannya berasal dari pendanaan dari tiga bank internasional. Bank yang terlibat mendanai proyek tersebut ialah Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale dan Standard Chartered Bank. Kesepakatan antara sindikasi tiga bank itu dengan PLN tercapai pada Agustus 2021 sehingga pembangunannya dapat terealisasi.

Bagi PLN, kehadiran PLTS Terapung

mengungkapkan, potensi pemanfaatan Saguling untuk instalasi PLTS Terapung juga didukung dengan telah hadirnya PLTA Saguling yang berkapasitas 700,72 MW. "Tunggu saja, nanti di Saguling ada solar panel yang floating. Jadi ketika siang hari saat musim kemarau jaringan di sini bisa dimanfaatkan untuk diisi dari solar panel yang floating. Saguling ini menunggu waktu saja seperti PLTS Cirata dan yang lainnya," kata Ahsin akhir tahun lalu.

Ahsin mengungkapkan, pemanfaatan PLTS Terapung di Saguling bisa saja menyamai kapasitas PLTS Terapung Cirata. Tak hanya di Saguling, Ahsin menilai, pengembangan PLTS



persen. Sedangkan, dalam lima tahun, harga battery storage mengalami penurunan sebanyak 40 persen.

Badan Energi Terbarukan Internasional (Irena) memproyeksikan harga panel surya akan turun 55 persen pada 2030 dan 45-55 persen untuk turbin angin. "Selain harga teknologi yang semakin turun, akses pada teknologi ini semakin terbuka dan semakin luas," jelas Fabby.

Untuk PLTS Cirata, PLN merupakan pembeli listrik PLTS Cirata. Sedangkan PT PJB (Pembangkitan Jawa Bali), selaku induk dari PT PJB Investasi (PJBI) dan Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PT PMSE). PMSE meru-

Cirata diyakini akan menjadi revolusi pengembangan energi baru dan terbarukan di dalam negeri. Terlebih di masa transisi energi ini akan mengimbangi 214 ribu ton emisi karbon dioksida. Tambahan pula, kontribusi PLTS Cirata dalam pencapaian target bauran energi baru terbarukan nasional sebesar 23 persen pada 2025.

Nah, bagaimana peluang replikasi di kawasan lain? Menyusul di Waduk Cirata, PT Indonesia Power (IP), anak usaha PLN menargetkan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat.

Direktur Utama IP M. Ahsin Sidqi

Terapung di kawasan waduk berpotensi dilakukan pada waduk lainnya yang sudah terinstal PLTA yang diope-
rasikan oleh Indonesia Power.

Alhasil, tampak bahwa kombinasi PLTA dan PLTS akan menjadi prioritas. Kombinasi ini akan saling mengisi energi jika kondisi hujan atau sinar matahari dinilai kurang untuk mengisi daya PLTS.

Di musim kemarau, ketika terik matahari, PLTS dapat memitigasi operasi PLTA yang kerap terganggu surutnya air. Sedangkan di musim penghujan, yang kerap kurang cahaya matahari, PLTA beroperasi penuh dan PLTS tetap berproduksi. Itu inovasinya. ●



INOVASI EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK BERSKEMA BOL

Pengembangan kendaraan bertenaga listrik di Indonesia semakin melaju dengan peta jalan yang jelas. Yakni membangun ekosistem terintegrasi.

Jadi, tidak hanya membuat kendaraan listrik. Tapi juga produksi baterai listrik serta industri penunjang terkait. Dalam hal ini, Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn), Gogoro Inc, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk., telah menandatangani komitmen kerja sama membangun ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia.

Total nilai investasi mencapai delapan miliar dolar AS, sekitar Rp114 triliun. Sedangkan skema kerja samanya memilih sistem Build-Operate-Localize (BOL). Kesepakatan kerja sama ini ditandatangani secara virtual oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta dan Taipei pada Jumat 21 Januari 2022.

Melalui nota kesepahaman tersebut, Foxconn bersama Gogoro, IBC, dan Indika akan menjajaki kerja sama investasi ekosistem kendaraan listrik yang menyeluruh dan lengkap di Indonesia. Katakan saja produksi baterai listrik. Baterai listrik saja mengandung komponen setidaknya sel baterai,

modul baterai, dan baterainya sendiri. Di hilirnya, ekosistem ini akan berujung ke pengembangan industri kendaraan listrik roda empat, kendaraan listrik roda dua, dan bus listrik.

Cakupan kerja sama juga menjangkau pengembangan industri penunjang EV yang meliputi energy storage system (ESS), battery exchange/swap station, baterai daur ulang, serta riset dan pengembangan (R&D) di bidang baterai elektrik dan EV. Alhasil, program komprehensif ini akan menghasilkan kapitalisasi pasar dengan nilai total lebih dari US\$100 miliar di Indonesia pada 2030.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan di Taiwan pada bulan Oktober 2021. Kala itu, Foxconn dan Gogoro berminat untuk mengembangkan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

"Hari ini kita memasuki era baru. Pemerintah Indonesia secara sungguh-sungguh akan mengawal rencana investasi ini, dengan mitra BUMN maupun pengusaha nasional di Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, Indonesia sangat fokus mendorong investasi berkelanjutan terutama mengedepankan green energy dan

green industry," ucap Bahlil.

Ia mengatakan akan mengawal komitmen investasi tersebut, termasuk memastikan kelancaran realisasi investasi perusahaan asal Taiwan itu. Pemerintah akan menangani seluruh perizinan, atau urusan-urusan dalam negeri, termasuk insentif investasi. "Foxconn dan Gogoro hanya perlu membawa teknologi, modal dan sebagian pasarnya. Saya yakinkan hari ini, investasi ini dapat tereksekusi untuk kemajuan dan kebangkitan kita bersama," ujar Bahlil.

Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi pilihan skema BOL. "Skema ini tidak hanya membawa investasi dan multiplier effects kepada UMKM dan perusahaan lokal, namun juga akan meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia dengan adanya riset dan pengembangan (R&D) serta transfer pengetahuan dan teknologi kendaraan listrik," ujarnya.

Ia mengatakan kolaborasi investasi ini akan mendukung komitmen pemerintah Indonesia pada Glasgow Climate Pact, yang ditandatangani pada 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP-26) tahun lalu. Komitmen Indonesia adalah mencapai nol emisi karbon pada 2060 dan meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi pada 2040. ●



Booster Ekonomi Pedesaan

PROGRAM DESA BRILIAN TERUS BERJALAN

Pandemi Covid-19 belum habis-habis. Justru karena itu program Desa Brilian semakin relevan menjadi booster ekonomi terutama di pedesaan.

Sebagai bank yang berfokus terhadap UMK, sejak 2019 BRI yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan bertujuan mendukung swadaya kelola dan kemandirian desa mengimplementasikan program Desa Brilian. Tak sangka, pada 2020 justru musibah pandemi tiba-tiba menjelma.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia selama hampir dua tahun memberi sejumlah pembelajaran tentang pentingnya usaha mikro berkesinambungan (sustainable). Arah penyesuaian di bidang perekonomian antara lain men-

cakup digitalisasi, penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil (UMK), hingga kemudahan akses distribusi produk unggulan menjadi prioritas bagi pemerataan pemenuhan konsumsi dan produksi dalam negeri.

Nah, itu semua sudah pas dengan posisi Bank BRI untuk mengemban peranan utama sebagai booster, penguat upaya kesinambungan dan pemulihan ekonomi di masa dan pasca pandemi. Misalnya, dalam menunjang program pemerintah yang menargetkan 30 juta pelaku usaha berada dalam ekosistem digital pada 2024. Sementara ini Kement-

terian Koperasi dan UKM RI mencatat saat ini sekitar 16,4 juta pelaku usaha sudah onboarding di ekosistem digital dan diyakini akan terus bertambah dengan cepat.

Selain itu, juga dilakukan penguatan kelembagaan atau klusterisasi yang memungkinkan UMK mencapai skala ekonomi lebih tinggi melalui integrasi rantai bisnis (ekosistem). Sehingga, UMK pun akan mendapat keuntungan, termasuk pada aktivitas pembelian, produksi, dan pengelolaan administrasi yang lebih efisien.

Data Kementerian Koperasi dan UKM

mencatat, terdapat lebih dari 64 juta pelaku usaha yang didominasi UMK. Konsep klusterisasi diyakini akan mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan pemberdayaan dan informasi guna meningkatkan skala kapasitas produksi usaha.

Seiring dengan itu, pemerintah juga menggalakkan sektor ekspor non-migas, yang didominasi sejumlah produk primer seperti hasil pertambangan, pertanian, dan industri olahan. Langkah itu menjadi upaya kestabilan ekspor yang mencatat rata-rata pertumbuhan terkontraksi mencapai 8,6 persen. Pada 2020, tercatat impor migas maupun non-migas memperlihatkan penurunan, yang mengindikasikan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dari impor juga mengalami keterbatasan. Terlebih, kini varian baru Covid-19 bermunculan, membuat setiap negara menerapkan kebijakan buka-tutup pintu yang berbeda untuk mobilitas barang dan masyarakat.

Jadi, apa titik temu program penyesuaian ekonomi saat dan pasca pandemi dengan Desa BRilian? Ya, tentu saja harus mengenal lebih dulu program dari bank BUMN dan merupakan yang terbesar di Indonesia ini.

Program Desa BRilian merupakan upaya Bank BRI mendorong inovasi berkelanjutan bagi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada September 2020, BRI melakukan seleksi terhadap 531 desa usulan dan memilih 125 desa dari berbagai daerah di Indonesia.

Selanjutnya, pada 2021, jumlah desa usulan ditingkatkan menjadi 1000 desa. Peningkatan program ini dilakukan karena melihat tingginya antusias masyarakat di desa untuk lebih berkembang dan mengikuti pelatihan yang diadakan BRI. Alhasil, pada Februari 2022, hampir 1.200 desa telah mendapatkan pendampingan program inkubasi desa, yang mencakup pengembangan potensi produk unggulan desa binaan. Setiap tahun akan terlihat desa mana yang terbaik dan layak mendapat penghargaan. Sebagai contoh, pada 2021 terpilih 25 Desa BRilian terbaik dalam dua kali pemilihan.

Sedangkan ciri Desa BRilian yang menjadi binaan BRI adalah memiliki seluruh atau kombinasi dari empat aspek utama. Mulai dari BUMDes aktif seba-

gai penggerak ekonomi desa, digitalisasi yang terimplementasi di desa yang menggunakan produk BRI (BRILink, Web Pasar, Stroberi). Juga aspek inovasi sebagai desa kreatif yang memecahkan masalah kemasyarakatan dan sosial desa. Terakhir adalah sustainability sebagai desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui

inovatif memotivasi orang di sekitarnya untuk maju

Menyebarkan informasi pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh BRI (influencer BRI)

Memperkuat posisi BRI sebagai Bank yang peduli kepada desa dan masyarakat desa

Sebagai salah satu tools mantri dalam



sektor usaha unggulan desanya.

Arah Program Desa BRilian sangat terukur, yaitu:

Meningkatkan kualitas pengelolaan desa yang menginspirasi untuk memajukan desa dan BUMDes

Bentuk penghargaan yang akan menampilkan desa berkepedulian sosial, menggerakkan perubahan, dan berperan

membina dan mendekatkan diri (engagement) kepada seluruh komponen masyarakat di Desa

Untuk mengarah pada target itu, desa yang lolos seleksi dalam Program Desa BRilian akan mendapat edukasi dan pendampingan. Literasi dasar yang pasti diberikan mencakup inklusi keuangan yaitu pengenalan produk dan jasa

perbankan dan manajemen keuangan dasar (akuntansi sederhana).

Literasi bisnis yang mencakup peningkatan kapasitas manajerial, legalitas, budaya inovasi, pemahaman industri dan pasar, kepemimpinan, pola pikir jangka panjang, skala usaha serta diberikan kebutuhan para pelaku UMKM sesuai dengan tema kegiatan BRIncubator (Kegiatan Pemberdayaan BRI) yang terdiri dari Go Modern, Go Digital, Go Online, Go global.

Untuk Kepala Desa dan Anggota BPD fokusnya adalah pemberian literasi dalam penyusunan RPJMDes. Untuk Pengurus BUMDes fokusnya adalah di literasi inovasi, sociopreneur, digitalisasi dan laporan keuangan dasar serta akuntabilitas keuangan dan penggunaan produk/layanan BRI. Untuk ibu-ibu PKK dan komunitas lain adalah untuk inklusi keuangan, manajemen keuangan, dan survei online UMKM Naik Kelas.

Dengan adanya literasi ini, diharapkan desa-desa bisa menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan yang sesuai dengan potensi desa. Termasuk mengenai transparansi sistem keuangan desa dan menciptakan pemimpin yang transformatif dan kolaboratif. Nantinya desa-desa yang menerapkan arahan dan pendampingan selama mengikuti Program Desa BRilian diharapkan layak dijadikan percontohan

untuk desa lainnya.

Nah, Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari menyebutkan, hal yang perlu mendapat perhatian dalam program-program itu adalah perbaikan pangkalan data (database) dan digitalisasi sebagai enabler utama dalam pembentukan konsolidasi. Misalnya, penanganan 64 juta pelaku usaha yang didominasi UMK sebagaimana catatan Kementerian Koperasi dan UKM.

Supari mengemukakan, data 64 juta pelaku usaha itu perlu klusterisasi untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan pemberdayaan dan informasi guna meningkatkan skala kapasitas produksi usaha. "Selain itu, dalam kerangka penguatan kelembagaan usaha mikro perlu pendampingan hingga kluster usaha tersebut menjadi 'naik kelas'," kata Supari.

Bank BRI sendiri sudah memetakan lebih dari 10 ribu kluster usaha. Ini adalah hasil identifikasi dan verifikasi periodik terhadap perkembangan setiap kluster. Upaya itu bertujuan mengetahui kemajuan dari hasil pemberdayaan yang secara harian dilakukan oleh tenaga pemasar mikro BRI atau dikenal sebagai Mantri BRI yang daya jelajahnya hingga pelosok.

Lebih dari itu, Bank BRI sudah memiliki rekam jejak panjang dalam perjalanan pemberdayaan yang komprehensif,

mulai pemberdayaan dasar hingga membuka pasar bagi pelaku usaha binaan. Dalam rangka mendukung skala bisnis kluster usaha binaan, lanjut Supari, BRI secara rutin mengadakan pameran yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan kluster usaha kepada masyarakat luas.

Tak sampai di sana, BRI juga mengkonsolidasikan kluster binaan kedalam sebuah 'outlet' pemberdayaan yang menampung produk dari seluruh Indonesia. "Ke depannya, outlet ini akan berkembang menjadi sebuah platform berbasis teknologi yang dapat menyambungkan para kluster usaha binaan dengan pasar yang lebih luas dan besar," kata Supari.

Digitalisasi platform yang mengkonsolidasikan kluster usaha binaan BRI itu akan membentuk korporatisasi usaha mikro. Sehingga, skala ekonomi yang lebih besar, ekosistem usaha mikro terbentuk, dan dukungan terkait pengembangan melalui pemberdayaan dan pembiayaan juga dapat terpenuhi. "Ke depan masih banyak yang harus dikerjakan untuk mewujudkan alternatif model korporatisasi melalui journey konsolidasi berbasis teknologi," ujar Supari.

Semuanya relevan dengan peran BRI menjadi booster pemulihan ekonomi di masa dan pasca pandemi. Apalagi di kawasan pedesaan. ●





BRI MEMANG BOOSTER EKONOMI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI semakin fokus menegaskan komitmennya dalam memberdayakan UMKM dan ultra mikro (UMi). Kedua segmen tersebut memang merupakan pemacu atau booster pemulihan ekonomi yang selama ini terdampak krisis akibat pandemi.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa keseriusan perseroan dalam memberdayakan pelaku UMKM terlihat dari total portofolio penyaluran kredit sepanjang 2021. Total kredit dan pembiayaan BRI secara konsolidasi tercatat menembus Rp1.042,87 triliun atau tumbuh 7,16 persen year-on-year (yoy).

Secara rinci, segmen mikro termasuk UMi masih mendominasi penyaluran kredit, yakni sebesar Rp483,89 triliun atau tumbuh 12,98 persen yoy. Kemudian, disusul oleh segmen kecil dan menengah Rp240,35 triliun atau tumbuh 3,55 persen yoy. Sisanya, segmen korporasi sebesar Rp168,27 triliun atau tumbuh 2,37 persen yoy. Terakhir, segmen konsumen tercatat sebesar Rp150,35 triliun atau tumbuh 3,97 persen yoy.

Sunarso menambahkan, proporsi kredit UMKM BRI terus meningkat. Saat ini, porsi kredit UMKM BRI telah mencapai 83,86 persen atau setara Rp874,60 triliun. Ia juga memproyeksikan pada 2024, porsi pembiayaan BRI di segmen UMKM bisa mencapai 85 persen

dari total portofolio kredit BRI.

"Terutama memang kami ingin fokus di UMKM. Jadi, ini suatu angka yang sangat membanggakan. Kemampuan menyalurkan kredit BRI yang baik tersebut juga didukung oleh ketersediaan likuiditas yang sangat memadai dan permodalan yang sangat kuat. Loan to deposit ratio (LDR) BRI secara konsolidasian mencapai 83,53 persen dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 27,25 persen," terangnya. Hal ini menunjukkan bahwa BRI memiliki likuiditas dan kecukupan modal yang sangat cukup untuk terus tumbuh secara jangka panjang.

Dengan berfokus kepada segmen UMKM dan UMi, BRI dapat membantu pemulihan ekonomi ke depan. Komitmen tersebut dipertegas oleh BRI lewat pembentukan Holding UMi melalui aksi korporasi rights issue senilai Rp95,92 triliun. Proses rights issue tersebut dilakukan dalam rangka penguatan ekosistem usaha UMi nasional. Holding ini pun melibatkan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM yang masuk kedalam BRI Group.

Kinerja segmen mikro di porsi kredit UMi sendiri secara konsolidasian mencapai Rp202,12 triliun. Artinya, porsi kredit segmen UMi mencapai 19,39 persen dari total kredit BRI. Sementara itu, Pegadaian sebesar Rp55,42 triliun dan PNM sebesar Rp33,29 triliun.

Sinergi Telah Berjalan Untuk mendorong segmen usaha UMi agar terus

menjadi penggerak ekonomi, Sunarso menyebut sinergi yang dijalankan yakni dengan menekan biaya dana sehingga ketiga entitas dapat melayani masyarakat semurah mungkin. "Maka sinerginya yang dijalankan adalah membuat murah sumber dana, dengan menjadikan BRI sebagai pencari dana dan kemudian bisa disalurkan lewat Pegadaian dan PNM," terangnya.

Tahapan BRI untuk mensinergikan, yakni melalui proses empowering people. Strategi pertama ini akan dilakukan PNM dengan menyentuh kelompok usaha kaum yang belum terjangkau jasa perbankan atau unbankable. PNM akan memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Setelah itu, proses kedua adalah integrasi. Perkembangan usaha dan kebutuhan modal dari pelaku usaha dapat dilayani oleh BRI dan Pegadaian. Pelaku usaha UMi dalam tahap ini memiliki pilihan dalam memperoleh pinjaman. Terakhir adalah upgrade skala usaha agar naik kelas, misalnya segmen UMi menjadi segmen mikro, atau mikro ke kecil, dan usaha kecil menjadi usaha menengah.

"Fokus BRI memang menaikkan kelas pelaku usaha. Hal itu menjadi journey yang terstruktur dan tersistematis dalam satu ekosistem. Selain itu, BRI juga sudah menyiapkan aplikasi UMi Corner. Jadi, seluruh akses dalam melayani nasabah dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi," pungkasnya. ●

Transisi Energi

MENGHINDARI MASA DEPAN SURAM

Transisi energi sudah menjadi keharusan global agar bumi tetap layak huni.
Bagaimana dengan lapangan kerja?

Pada mulanya adalah mitigasi iklim dengan tambahan pandemi. Maka, negara-negara di seluruh dunia memprioritaskan energi terbarukan berbiaya rendah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemulihan setelah pandemi global. Cukup jelas bahwa pilihan teknologi berkelanjutan menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang lebih luas, seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara yang telah menjadi penggerak awal dalam mentransisikan sektor energi mereka ke bagian yang lebih tinggi dari energi terbarukan.

Muncul pertanyaan, bagaimana

dampak upaya penyesuaian global terhadap lapangan kerja yang juga hilang akibat perubahan cara hidup manusia dalam produksi dan konsumsi energi berubah? Menjelang perubahan itu, ringkasnya di masa transisi energi, muncul berbagai kajian untuk lebih memahami dampak langsung pada pekerjaan akibat transisi energi dengan kekhawatiran atas hilangnya pekerjaan di sektor energi konvensional, yang akan menjadi penting dalam menginformasikan pengambilan keputusan di seluruh dunia.

Salah satu kajian gabungan akademisi

dari Finlandia, Chile, dan Spanyol yang terbit di Journal Elsevier memfokuskan dampak total bidang ketenagakerjaan bersih akibat percepatan penyerapan energi terbarukan dengan mengasumsikan dunia memperoleh 100 persen energinya dari sumber terbarukan pada 2050, sesuai dengan tujuan ambisius Perjanjian Paris. Alhasil, kajian itu memprediksi, pekerjaan energi langsung yang terkait dengan sektor listrik, panas, transportasi, dan desalinasi (menawarkan asin air laut) meningkat secara substansial dari sekitar 57 juta pada 2020 menjadi hampir 134 juta pada 2050.



Rantai nilai dalam teknologi terbarukan dan berkelanjutan ditemukan lebih padat karya daripada bahan bakar fosil ekstraktif. Ringkasnya, transisi energi global akan berdampak positif pada stabilitas masa depan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.

Di negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik, pangsa pekerjaan yang diciptakan, menurut kajian Manish Ram dan rekan itu, menurun dari delapan persen pada 2020 menjadi enam persen pada 2050 dari pangsa pekerjaan energi global. Negara pengekspor batu bara seperti Indonesia dan Australia, turut andil dalam penurunan pangsa lapangan kerja. Namun, transisi ke energi terbarukan, masih menurut kajian Ram dan rekan, menghasilkan peningkatan lapangan kerja dari 4 juta pada 2020 menjadi delapan juta pada tahun 2050 di seluruh wilayah.

Tapi, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Nah, rupanya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas juga memiliki prediksi, Bappenas memperkirakan, transisi energi akan menciptakan setidaknya 1,8-2,2 juta tambahan lapangan kerja baru

dalam empat dekade mendatang.

"Dengan menuju net zero emisi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan hampir sekitar 1,8-2,2 juta lapangan kerja tambahan pada 2060," kata Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam dalam webinar Indonesia's Green Jobs Conference, Selasa, 8 Februari 2022.

Namun, Medrilzam menegaskan, tambahan tenaga kerja baru tersebut bisa tercapai jika ada intervensi. Intervensi setidaknya mencakup lima aspek, yakni menendorong energi terbarukan teknologi kendaraan listrik (EV), dan efisiensi energi, pemanfaatan lahan dan peningkatan pengelolaan limbah.

Dari kelima aspek tersebut, menurut dia, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan paling banyak bersumber dari peningkatan pengelolaan limbah serta pengembangan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya. Pemanfaatan lahan juga berpotensi menciptakan banyak tenaga kerja baru.

Medrilzam pun memperkirakan kegiatan 3R (Rewetting, Revegetation, dan Revitalization) dalam rangka restorasi ekosistem gambut mampu menciptakan 91

ribu tenaga kerja baru. Ini terutama untuk menunjang aktivitas konstruksi, pemeliharaan sekat kanal, aktivitas penanaman dan revitalisasi mata pencaharian. Selain itu, aktivitas perkebunan berkelanjutan berpotensi menciptakan sekitar 700 ribu lapangan kerja baru.

"Konteks ekonomi hijau ini memang diharapkan bisa menciptakan investasi hijau yang multiplier effect-nya menciptakan tujuh hingga sepuluh kali lipat lapangan kerja baru, bahkan lebih besar dari pola-pola konvensional," kata Medrilzam.

Selain itu, ia juga menegaskan dalam kajiannya, ekonomi sirkular akan memberikan benefit yang lebih banyak lagi. Penerapan ekonomi sirkular bisa menyumbang tambahan Rp 593-638 triliun kepada produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2030. "Ini kemungkinan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau jika kita melakukannya konsisten," kata Medrilzam.

Menurut dia, penerapan ekonomi sirkular (daur ulang) tentunya berdampak positif bagi lingkungan. Model ekonomi berkelanjutan ini diperkirakan bisa menurunkan emisi CO2 sampai



126 juta ton dan mengurangi timbulan limbah sebesar 18-52 persen.

Sebelumnya, pada akhir 2021 lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan transisi energi harus mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Peralihan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di masa mendatang serta membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals

Desember 2021.

Arifin menekankan proses peralihan ini harus dioptimalkan oleh Indonesia untuk diimplementasikan dalam membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas layanan penyediaan energi. "Jika ini serius dijalankan akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat," ungkapnya.

Pemerintah mengungkapkan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil cukup menyulitkan pendanaan dalam mengadopsi teknologi ramah



(SDGs) yang tengah digalakkan.

"Transisi energi ini sangat penting bagi Indonesia. Apalagi kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses ini bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Apakah kita melakukan face out (menghapuskan) maupun face down (mengurangi) PLTU, transisi akan segera datang," kata Arifin dalam webinar bertajuk Action for Implementing People-Centred Clean Energy Transitions, Senin, 6

lingkungan. Untuk itu, Arifin berharap the Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions (bentukan IEA, International Energy Agency) dapat menjadi forum dalam mendapatkan peluang pendanaan agar pemanfaatan EBT bisa berjalan.

IEA, International Energy Agency, Badan Energi Internasional yang berbasis di Paris dalam kerangka Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)

membentuk the Global Commission yang terdiri atas para menteri dan ahli untuk mencari cara terbaik agar masyarakat terlibat dalam transisi energi di seluruh dunia. Perdana Menteri Denmark menjabat sebagai penasihat, Menteri Energi dan Iklim Denmark sebagai ketua Komisi, dan Executive Director IEA sebagai ketua Sidang Pertemuan Komisi.

Komisi ini dibentuk karena meningkatnya tren kebijakan Net Zero Emission (NZE) dalam transisi energi serta dampak-dampaknya. Komisi bertujuan menanggulangi dampak sosio-ekonomi dari transisi energi, meningkatkan keterlibatan publik, memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi kepada para pengambil kebijakan, dan membahas isu-isu krusial seputar transisi energi.

Fokus kerja Komisi adalah pada dampak transisi energi pada masyarakat yang mencakup menggali pertimbangan strategis mengenai target komitmen transisi energi (misalnya NZE), memitigasi dampak bagi masyarakat termasuk dunia usaha, sektor-sektor terkait, dan dinamika kawasan, mendalami dampak strategi/kebijakan terkait energi bersih (carbon tax, subsidies reform, dsb.), serta kaitannya dengan pengembangan infrastruktur energi.

Mitigasi itu mencakup terutama generasi milenial yang lahir antara 1980-1990 dan generasi sesudahnya. Untuk itu, Menteri Arifin menyarankan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para milenial. Pertama, terlibat secara langsung dalam memberikan sumbangsih mengembangkan EBT. Kedua, melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan energi bersih untuk mendukung ketahanan energi jangka panjang.

Selanjutnya, menciptakan inovasi-inovasi di bidang EBT yang langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. "Bisa biomassa dari limbah menjadi berkah atau memanfaatkan tanaman setepat untuk menjadi bahan bakar, seperti bioetanol," Arifin.

Banyak lagi sebenarnya. Setidaknya, ada lima bidang inti cakupan transisi energi: Pembangkit energi, pengelolaan panas bumi dan surya, energi penggerak transportasi, dan desalinisasi. Cabang dari bidang inti itu alangkah banyaknya. Tinggal daya inovasi yang lebih menentukan •

MENGANTISIPASI TENGGELAMNYA SI HITAM

Laporan Bank Dunia bertajuk “Mengelola Penutupan Tambang” yang terbit sebelum pandemi Covid-19 menggambarkan ekonomi di Asia, Eropa Timur, dan Afrika menghadapi penutupan tambang batu bara. Kehilangan pekerjaan yang besar sudah terjadi di Cina, dengan negara-negara penghasil batu bara besar lainnya di Asia kemungkinan akan mengikuti.

Pelajaran dari pengalaman Federasi Rusia (Rusia), Ukraina, Polandia, dan Rumania, yang dilengkapi dengan data tentang dampak penyesuaian industri batubara di Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan Cina, menunjukkan bahwa hilangnya pekerjaan di industri batu bara memang tak terelakkan karena industri berkontraksi. Mereka yang paling menanggung beban adalah para penambang batu bara, keluarganya, dan masyarakat, khususnya masyarakat tempat batu bara menjadi monindustri, industri tunggal.

Ini adalah pengulangan yang terjadi selama setengah abad terakhir. Perubahan besar-besaran pada industri batu bara di seluruh Eropa, dan baru-baru ini di Amerika Serikat dan Cina, telah mengakibatkan sebanyak empat juta pekerja batu bara kehilangan pekerjaan. Penggerak perubahan ini ditemukan dalam mekanisasi tambang, kebijakan pemerintah, dan persaingan dari bahan bakar lain di permintaan pasar energi hilir. Dampak penggunaan batu bara terhadap polusi udara dan air mengharuskan dampak ini dimitigasi dengan menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit polusi.

Pergeseran dari batu bara muncul, karena biaya bahan bakar alternatif menurun dan ketersediaannya meningkat. Di berbagai negara, pergeseran ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk peningkatan penggunaan tenaga nuklir, peningkatan ketersediaan gas alam dan, baru-baru ini, peningkatan penggunaan energi terbarukan.

Karena kekhawatiran komersial berdampak pada penggunaan batu bara, industri batu bara beralih ke peningkatan

tan penggunaan mekanisasi agar tetap kompetitif. Hasil keseluruhannya adalah penutupan tambang yang kurang efisien dengan konsolidasi di sekitar operasi mekanisasi yang lebih efisien, berbiaya lebih rendah. Berbagai pengaruh pendorong perubahan ini terhadap respons kebijakan domestik terhadap transisi energi tidak menghalangi penutupan tambang batu bara yang tak terhindarkan. Dalam semua studi kasus penutupan tambang, kehilangan pekerjaan, dan dampak sosial ekonomi berikutnya yang ditanggung oleh keluarga dan masyarakat di wilayah yang bergantung pada batu bara, adalah signifikan.

Perubahan ini juga berdampak pada pemilik dan investor di industri batubara. Masing-masing pemangku kepentingan ini dapat memberikan dampak sosial politik dan ekonomi yang cukup besar pada proses penu-

tambang.

Hilangnya pekerjaan pertambangan secara substansial mengurangi aliran pendapatan melalui ekonomi lokal ini —mempengaruhi ritel, layanan makanan, dan sektor lain yang bergantung, serta layanan sosial. Memang, hilangnya mesin ekonomi dominan ekonomi lokal memperlihatkan kerapuhan basis ekonomi yang sempit di banyak wilayah pertambangan batu bara. Karakteristik unik komunitas pertambangan batu bara—seperti isolasi geografis, disparitas upah, dan identitas pertambangan batu bara—menjadi tantangan bagi upaya pemulihan. Beberapa dekade kemudian setelah tambang ditutup, banyak daerah yang bergantung pada batu bara terus tertinggal secara sosial dan ekonomi.

Bank Dunia melihat ihwal penutupan tambang ini, sebagian besarnya adalah masalah mitigasi dampak pada manusia dan komunitas. Dalam menyoroti perhatian utama bagi warga dan masyarakat, Bank dunia menawarkan pendekatan penutupan tambang yang mengadopsi prinsip-prinsip “Transisi yang Adil untuk Semua” agar dapat mencapai hasil yang berarti bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Transisi yang Adil untuk Semua dalam penutupan tambang batu bara mencakup antara lain:

1. Dialog dan konsultasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk menentukan ruang lingkup, skala, dan waktu penutupan;

2. Perencanaan yang memadai di awal yang terjaga melalui dialog dan pemantauan partisipatif selama berbagai tahap penutupan dan transisi;

3. Penyediaan dukungan pendapatan sementara bagi pekerja dan keluarganya yang melengkapi program perlindungan sosial lain yang ada; dan

4. Penerapan kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang menawarkan layanan, program, dan insentif untuk mendorong dan memungkinkan pekerjaan kembali di antara pekerja yang diberhentikan. ●



tupan. Tantangannya datang dalam menyeimbangkan beragam kebutuhan semua kelompok.

Peluang sektor ekonomi alternatif yang sempit di banyak wilayah pertambangan batu bara memerlukan mitigasi yang cermat terhadap dampak penutupannya. Pertambangan batubara sering terkonsentrasi di daerah yang jauh dari populasi utama dan pusat ekonomi tempat prospek pekerjaan alternatif dapat ditemukan. Akibatnya, kota dan wilayah tempat batubara menjadi industri tunggal (mono-industri) menghadapi dampak yang berlipat ganda dan merusak akibat penutupan



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Surya Paloh.

TIMBANG TIMANG ANIES BASWEDAN

Menimbang belum tentu menimang Anies Rasyid Baswedan. Sedangkan Anies bilang menunggu azan. Ini memang soal Calon Presiden.

Sekadar kilas balik, dua tahun lebih empat bulan, terhitung sejak Anies Rasyid Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia Indonesia (GPMI) DKI sempat bermaksud mengelat deklarasi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Capres 2024 di Jalan Inspeksi Kali Mookevar, Semanan, Jakarta Barat, Minggu, 16 Februari 2020.

Ternyata gayung deklarasi itu

kurang mendapat sambutan. Malah suami dari Fery Farhati Ganis menolaknya. Ketua GPMI DKI Jakarta, Syarif Hidayatullah mengatakan kala itu alasan Anies Baswedan menolak deklarasi Capres karena ingin fokus mengurus DKI Jakarta.

Alhasil, acara GPMI tetap berjalan. Tapi, tanpa menu utama Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024. Belakangan Syarif yang terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar GPMI nasional.

Nah, di penghujung akhir 2021,

tepatnya 26 Desember, di rumah dunia Kota Serang, puluhan aktivis Jaringan Warga Banten Relawan Anies (Jawara) mendeklarasikan Anies Baswedan for Presiden 2024. Selanjutnya, gema dukungan Anies Baswedan Presiden 2024 agaknya akan terus merembet ke berbagai daerah mulai dari Jawa, menyeberang ke Sumatera Barat, dan NTB, menggaungkan mantan Rektor Universitas Paramadina itu sebagai calon orang nomor satu di Indonesia pada 2024.



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Prabowo Subianto.

Kali ini, suara Anies tampak sulit menolak. Namun, tetap diam, dan terkesan ayah dari Mutiara Annisa Baswedan, Mikail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan itu masih mempertimbangkan banyak hal.

Toh semakin diamnya Anies bisa saja menjadi isyarat tidak menolak adanya deklarasi untuk maju sebagai salah satu calon dalam Pilpres 2024. Terlebih salah satu jajak pendapat pada akhir 2021 menempatkan namanya di urutan tiga besar setelah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Survei terbaru Indikator Politik pada 6-11 Desember 2021 menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih kokoh di puncak tertinggi elektabilitas calon presiden pada simulasi Pilpres 2024. Ketiganya memiliki elektabilitas tert-

inggi jika responden mendapatkan pertanyaan semi terbuka dengan menampilkan 33 ataupun 19 nama tokoh.

Pada simulasi 33 nama, elektabilitas Prabowo berada di angka 22,4 persen, lalu disusul Ganjar 18 persen dan Anies 15,8 persen. Elektabilitas ketiganya jauh dibandingkan tokoh-tokoh lain seperti Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 6,1 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 4,1 persen, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 3,6 persen, Wakil Presiden KH Maruf Amin 2,7 persen.

Di bawahnya lagi, ada Mensos Tri Rismaharini 2,3 persen, Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti 1,4 persen, Ketua DPR Puan Maharani 1,3 persen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,3 persen, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh 1,2 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 1,1 persen. Selanjutnya Ketua

Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo 1,0 persen.

Ketika ditanya awak media ihwal relawan yang mendukungnya untuk Capres 2024. Anies hanya mengacungkan jempol sambil mengakhiri tanya jawab bersama wartawan. Anies langsung berjalan menuju lift dan meninggalkan tempat. Begitu salah satu reaksi Anies yang terekam pada Oktober 2021 lalu.

Sedangkan Prabowo, yang berada di urutan teratas jajak pendapat Indikator Politik, jelas punya tiket untuk maju sebagai Capres 2024 dari Partai Gerindra. Sementara Ganjar melejit elektabilitasnya memepet Prabowo, malah beberapa survei pada awal Januari 2021 mengalahkan Prabowo, statusnya masih menunggu putusan partai PDI Perjuangan. Jadi, hingga awal 2022 ini, Gubernur Jawa Tengah itu belum memegang tiket untuk maju sebagai Capres.

Nah, Anies malah non-partai. Selain tak punya tiket Capres, ia juga bukan anggota partai politik. Tetapi yang perlu dicatat, Anies punya modal mungkin logistik untuk memungkinkan pencapresan dirinya di 2024 itu bisa terjadi.

Dalam dinamika politik sepanjang 2021, sejumlah partai tampak tertarik pada figur Anies. Antara lain Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga Partai

kata dia, memang Nasdem.

"Jika melihat kedekatan antara Ketum NasDem, Surya Paloh dan Anies, saya rasa kemungkinan bergabung makin tinggi," ungkap Ali, Rabu, 19 Januari 2021

Menurut dia, Anies Baswedan bisa mendapat perhatian lebih bagi NasDem dan Surya Paloh. Selain mendapat dukungan dari NasDem, Anies Baswedan sangat berpeluang bisa menang pada Pilpres 2024.

peran HM Jusuf Kalla bisa memainkan Anies untuk Capres 2024. Bukanlah Anies dicalonkan Gubernur pada Pilkada 2018 ada peran besar dari Pak JK yang berasal dari Sulawesi Selatan (Sulsel)?

Dalam perkembangan terbaru, Anies malah berkunjung ke Sulsel pada Jumat-Sabtu, 20-21 Januari 2021. Agenda utamanya adalah hadir dua pesta pernikahan, putra politisi H Andi M Nurdin Halid dan putri Kapolda



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Demokrat (PD). Salah satu contoh saja, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh malah sempat berujar, membuka kemungkinan Anies menjadi Capres dari Nasdem.

Di mata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an, langkah yang sangat mungkin bagi Anies Baswedan saat ini ialah gabung ke partai politik untuk memuluskan jalan menuju Pilpres. Salah satu partai potensial,

"NasDem dan Surya Paloh setidaknya bisa berhitung untuk menentukan capres dari partainya. Jadi, Anies bisa sangat mungkin masuk NasDem demi maju Pilpres 2024," imbuhnya.

PKS pun diprediksi mendukung Anies Capres 2024. Sementara Demokrat walaupun masih mencapreskan AHY, kemungkinan realitas politik menjelang 2024 bisa berubah dari AHY ke Anies. Jangan lupa pula,

Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran.

Usai menghadiri acara mapacci (malam menjelang akad nikah) di rumah Nurdin, ia menemui Relawan Mileanies (Milenial untuk Anies) Sulsel di Pantai Losari, Makassar. "Kalau belum waktunya, jangan bunyikan suara azan. Belum masuk waktu azan, jangan azan dulu. Semua muadzin tahu prinsip itu," kelakar Anies di hadapan relawan.

Pernyataan Anies disampaikan menjawab pertanyaan sejumlah relawan meminta kesediaannya maju calon Presiden 2024. "Insyaallah, apapun yang dijalani, kita jalankan sebaik-baiknya, kita kerja bersama. Kalau subuh, taqlim saja dulu," katanya.

Toh mantan Rektor Universitas Paramadina itu berterima kasih atas kehadiran para relawan dan sahabatnya di Makassar. "Alhamdulillah bisa silaturahmi sama sama di sini, terima kasih terbaik hati menyambut di Makassar perasaan persaudaraan yang kuat," katanya.

Anies pun mengaku senang bisa ngobrol dan berdiskusi di Pantai Losari. "Apa harapan keinginan teman teman Sulsel ikhtiar kita untuk kemajuan Indonesia bisa dimudahkan," tandasnya.

Namun, di sisi lain, ada kelompok pro Anies yang menginginkannya maju di 2024 bukan sebagai Capres, melainkan Cagub Jakarta lagi. Lebih dari itu, serangan terhadap figur Anies juga bermunculan. Setidaknya, dua kali dalam rentang waktu tiga bulan (21 September 2021 dan 2022) oleh orang yang sama.

Pertama saat Giring Ganesha menjadi Plt Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam sebuah video di akun Twitter PSI, @psi_id, Selasa, 21 September 2021. Pada tayangan video itu, Giring menjelaskan, dalam krisis, seorang pemimpin adalah panglima yang mengambil tanggung jawab dan menyampaikan kepada publik secara transparan situasi dan pilihan-pilihan yang dia ambil dalam merespons situasi.

Mantan Vokalis Band Nidji itu kali kedua menyindir yang pesannya hampir sama ketika dia berbicara melalui akun twitter PSI September 2021. Kali ini Giring menyampaikannya di hadapan Presiden Jokowi ketika menghadiri acara HUT ke-7 PSI, dan dalam jabatan Ketua Umum PSI.

Pesan Giring, dia tak ingin Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Yang berbeda, kali ini Giring tidak menyebut nama siapa pembohong tersebut.

"Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama

dalam menilai kegagalan Gubernur Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi," kata Giring.

Giring kemudian menuding APBD Jakarta yang begitu besar dibelanjakan Anies untuk kepentingan sebagai calon presiden 2024. Anies dinilai mengabaikan desakan masyarakat untuk membatalkan rencana balapan mobil Formula E.

Di tengah penderitaan masyarakat, Anies disebut Giring menyerah dan tidak bisa mengatasi situasi. Anies disebut Giring mengaku tidak ada dana untuk mengatasi COVID-19 dan meminta pemerintah pusat mengambil alih

seorang kandidat Capres 2024, yang justru pesannya tak elok, murahan dan mungkin bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Terlepas pro dan kontra terhadap pernyataan Giring tentang Anies di hadapan Presiden Jokowi, ada hal negatif dan positif bagi Giring dan Anies. Positifnya bagi Giring, pernyataan itu perlu disebut, sebab PSI di bawah kepemimpinannya harus menjadi pembeda. Apalagi 2024 semakin dekat di depan mata, perlu langkah yang jelas dan tegas.

Salah satunya, membuat pernyataan tentang Anies yang gagal dan tidak selesai menurut Giring. Sedangkan negatifnya, PSI di era Giring perlu



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Makassar.

penanganan COVID-19 Jakarta. Kata Giring, Anies pembohong.

Tak berselang lama, ucapan Giring tentang Anies di hadapan Presiden Jokowi mendapat balasan Anies dengan mengundang Grup Band Nidji tanpa Giring di Jakarta International Stadium (JIS). Asal tahu saja, JIS adalah salah satu proyek pembangunan yang mendapat banyak sambutan positif dari kalangan muda termasuk pemilih pemula.

Sedangkan DPP Partai Priboemi, Heikal Safat, menyatakan pidato Giring di acara HUT ke-7 PSI dan dihadiri Presiden Jokowi itu sangat tendensius. Heikal menegaskan, pernyataan eks vokalis Nidji itu menyudutkan salah

semakin ekstra hati-hati terutama para calegnya di kantong-kantong pemilih yang pro Anies.

Hal positif bagi Anies. Semakin Giring menyindir Anies itu bisa menguntungkan langkah Anies mendapat pinangan Parpol. Apalagi Anies dianggap 'royal' dan mau melakukan pendekatan kepada kelompok, terutama Parpol yang mendukungnya.

Sementara negatifnya, jika ucapan Giring mendapat persetujuan para konstituen, bisa saja Anies gagal maju sebagai Capres maupun bertahan sebagai petahana Gubernur DKI Jakarta.

Silakan timbang, silakan timang. Seperti kata Anies, tentunya sebelum tiba adzan. ●



11 TEMUAN SAINS DAN TEKNO BERLANJUT TAHUN INI

Perkembangan sains dan teknologi sepanjang 2021 masih didominasi oleh dampak pandemi Covid-19. Tahun ini, boleh jadi sama saja. Namun, meski pandemi belum usai, masih banyak temuan sains dan teknologi yang penting maupun menarik. Boleh jadi akan lebih menarik jika berlanjut pada tahun ini.

Berikut beberapa antaranya:

1. Vaksin Covid-19

Pengembangan vaksin Covid-19 sebenarnya langsung pandemi pada 2020. Namun, peluncuran vaksin mulai mengglobal pada 2021. Vaksin Pfizer dan Moderna Covid-19 beredar untuk penggunaan darurat bagi orang dewasa dalam waktu singkat, diikuti oleh vaksin sekali pakai Johnson & Johnson pada Februari 2021.

Vaksin Covid-19 kini telah tersedia untuk anak-anak berusia lima tahun. Periode pengembangan hingga penerapan vaksin tercepat sebelum ini adalah vaksin Gondongan pada 1960-an yang memerlukan waktu empat tahun.

2. Pengembangan jantung buatan dari titanium

Para ilmuwan telah mencoba

mengembangkan jantung buatan selama lebih dari 50 tahun sekarang. Harap maklum, penyakit kardiovaskular (CVDs) merenggut sekitar 17,9 juta jiwa di seluruh dunia setiap tahun dan merupakan penyebab utama kematian secara global. Nah, tim peneliti Australia telah menciptakan BiVACOR, jantung titanium yang memanfaatkan teknologi cakram pemintalan.

Memang cara kerjanya tak persis seperti jantung manusia tetapi mencoba melampaui evolusi dengan mekanisme yang lebih baik untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Teknologi ini memiliki pompa melingkar yang tergantung di antara magnet di jantung buatan yang terbuat dari titanium. Sebuah percobaan manusia penuh belum dilakukan. Hingga saat ini, obat tersebut hanya diuji sementara pada pasien transplantasi jantung dan telah menjalani uji coba pada hewan. Kita tunggu perkembangannya tahun ini.

3. Temuan baru di Mars

Tiga misi tiba di Mars pada Februari 2021, memanfaatkan penyelarasan orbit Bumi-Mars, sesuatu yang terjadi setiap 26 bulan sekali. Satelit Hope (Al Amal) milik Uni Emirat Arab bertujuan mempelajari iklim Mars masa lalu dan sekarang dari orbit dengan memantau perubahan harian, bulanan, dan tahunan Planet Merah itu. Sedangkan Badan Antariksa Nasional China (CNSA) Tianwen-1 menyurvei permukaan Mars dari orbit dan kemudian meletakkan rover Zhurong di Utopia Planitia besar di Mars. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan China untuk bergerak di permukaan Mars.

Seiring dengan itu, pendarat Perseverance NASA, yang didasarkan pada desain Curiosity tetapi dilengkapi dengan serangkaian instrumen untuk mengebor dan menyimpan sampel batuan, akan menghabiskan beberapa tahun ke depan melintasi Kawah Jezero. Ini akan mengumpulkan hingga 43 sampel batuan yang akan dikirim kembali dalam cache dalam misi Pengembalian Sampel yang masih direncanakan.

Salah satu terobosan sains terbesar di Mars adalah tes untuk melihat apakah kita bisa terbang melalui atmosfer Mars. Helikopter Ingenuity, yang datang bersama Perseverance sebagai misi demonstrasi teknologi, adalah rotocraft kecil seperti drone. Tercatat, perangkat ini telah menempuh lebih dari dua km. Perjalanan Perseverance dibantu oleh Helikopter Ingenuity yang mengintai di depan dan menyoroti potensi bahaya atau objek yang menarik

dengan kamera yang dilengkapi.

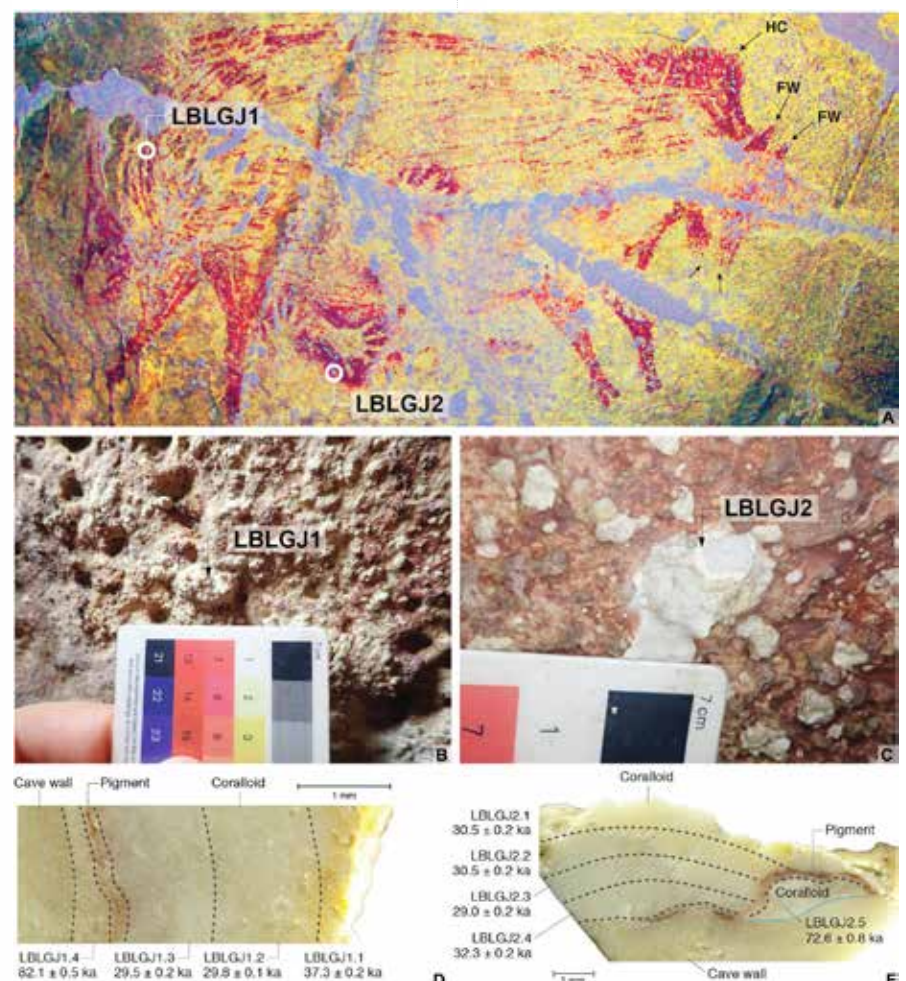
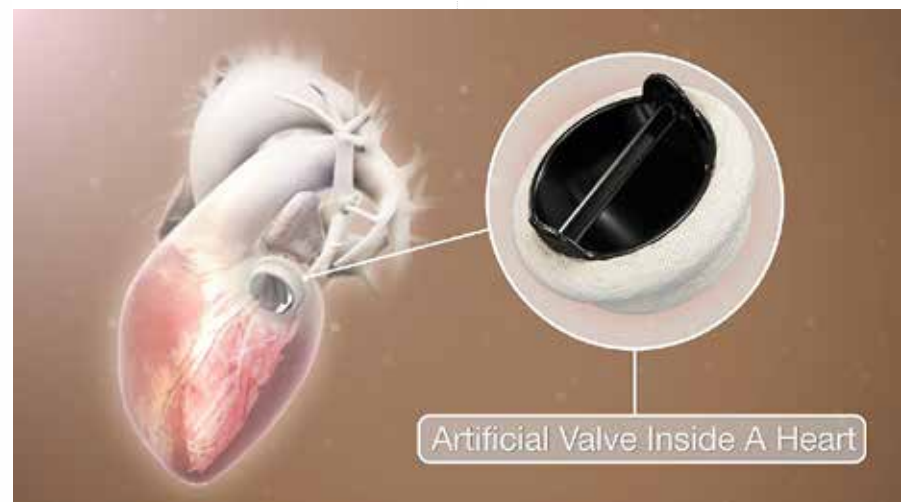
Catatan pentingnya. Pada 2021 di Mars, UEA belajar cara mengorbit, Cina belajar cara mendarat, dan NASA belajar cara terbang.

4. Vaksin malaria untuk anak

Malaria masih merupakan salah satu penyakit paling berbahaya di planet ini yang membunuh sekitar setengah juta orang setiap tahunnya.

Lebih dari setengahnya adalah anak-anak di bawah usia lima tahun.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Oktober 2021 menyetujui vaksin malaria pertama di dunia untuk anak-anak, yang juga merupakan vaksin pertama melawan penyakit parasit apa pun. Mosquirix — nama merek obat itu — menghabiskan lebih dari USD 750 juta untuk dikembangkan dan diuji sejak 1987.



Vaksin baru ini melawan lima patogen malaria yang paling mematikan dan diberikan dalam empat rangkaian suntikan. Terobosan ilmiah ini dapat mencegah sekitar 5,3 juta kasus malaria setiap tahun.

5. Peluncuran Teleskop James Webb

Teleskop Luar Angkasa James Webb, teleskop ruang angkasa terbe-

butuhkan enam bulan lagi untuk membuka instrumennya, menyelaraskan, dan mengkalibrasi.

Pekerjaan untuk membuat teleskop dimulai pada 1996 oleh NASA, Badan Antariksa Kanada dan Badan Antariksa Eropa, dan menelan biaya sekitar USD 500 juta. Peluncurannya sempat tertunda beberapa kali.

Selama beberapa dekade beri-

Angkasa Hubble. Jadi, umat manusia akan segera dapat melihat kemungkinan tanda-tanda kehidupan di planet lain, menyaksikan kelahiran bintang, dan menemukan bagaimana galaksi awal terbentuk.

6. Upaya menemukan ET

Peneliti Cambridge dalam sebuah makalah pada Agustus 2021 berspekulasi tentang keberadaan dunia yang termasuk dalam kategori planet Hycean yang dapat mendukung kehidupan. Dunia yang mereka bicarakan akan berukuran sekitar 2,6 kali ukuran Bumi, dengan atmosfer yang kaya Hidrogen, panas dan tertutup lautan. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia seperti itu tetapi makhluk lain akan melakukannya.

Karena lebih mudah mendeteksi biosignatures dari planet Hycean (seperti metil klorida dan dimetil sulfida) daripada dari planet mirip Bumi (seperti oksigen, metana, dll.), maka dimungkinkan untuk mendeteksi dan mengonfirmasi kehidupan ekstra-terestrial di dua planet berikutnya. atau tiga air mata. Banyak exoplanet yang sudah kita ketahui akan termasuk dalam kelas planet Hycean.

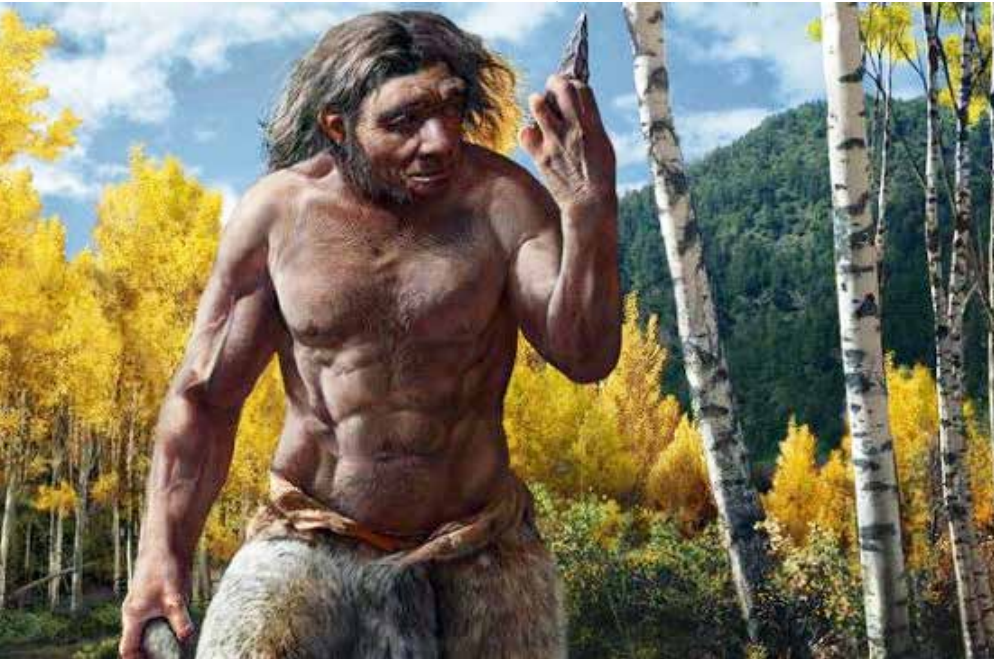
7. Pengeditan gen CRISPR

Konsep pengeditan gen berkembang pesat dan pada Juni 2021, editor gen CRISPR Cas-9 disuntikkan langsung ke aliran darah pasien dengan penyakit bawaan yang langka. Biasanya, sel diambil dari pasien dan CRISPR mengerjakannya di laboratorium sebelum gen yang diedit dikembalikan ke dalam tubuh. Ini adalah proses yang memakan waktu dan mahal dan seringkali, pasien seringkali harus menjalani kemoterapi setelahnya.

Kasus mengenai kondisi amiloidosis transthyretin yang sebelumnya tidak dapat diobati ini berlangsung cepat dan berhasil. Teknologi pengobatan itu bahkan memperlihatkan penurunan protein destruktif yang menumpuk di jaringan dan organ pada penyandang penyakit ini.

8. Spesies baru manusia purba

Sekitar 90 tahun lalu, sebuah fosil



sar dan terkuat yang pernah dikembangkan, mulai beroperasi pada bulan Desember. Perangkat ini akan melakukan perjalanan hampir satu juta mil selama 30 hari ke tempat yang stabil di luar angkasa, dan kemudian mem-

kutnya, perangkat ini akan melacak orbit bumi mengelilingi matahari. Bagian alam semesta yang sebelumnya tidak dapat dilihat sekarang dapat diamati dan dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan Teleskop Luar

tengkorak ditemukan di China dan kemudian disembunyikan oleh satu keluarga sampai seorang petani memberikannya ke museum universitas pada 2018. Para peneliti dari China menganalisisnya dengan menggunakan penanggalan seri uranium, dan fluoresensi sinar-X. Hasilnya, ini adalah spesies baru manusia purba.

Tengkorak itu memiliki tempurung kepala besar yang dapat menampung otak besar, alis tebal dan rongga mata hampir persegi ini membedakannya dari spesies Homo lainnya. Homo longi atau 'manusia naga', sebagaimana spesies baru ini diberi nama, sebelumnya dianggap sebagai manusia Pleistosen akhir, bergabung dengan Homo sapiens dan Neanderthal. Namun, perdebatan masih berlanjut tentang apakah itu harus disebut spesies baru, dan kita perlu menunggu fosil bijih untuk mengisi lubang dalam sejarah manusia purba.

Terobosan sains terkait, melibatkan ahli paleontologi Neanderthal dari Madrid. Terbentuklah model 3D (tiga dimensi) dari struktur telinga Neanderthal dengan klaim bahwa mereka mungkin memiliki kapasitas untuk berbicara dan mendengar seperti Homo sapiens, spesies manusia modern. Maka, konsep tentang spesies manusia purba pasti bergeser saat lebih banyak data terkumpul.

9. Lukisan hewan tertua

Temuan arkeologi mengungkap temuan lukisan gua yang menggemakan di Sulawesi Selatan. Temuan ini diterbitkan pada Januari 2021 di Science Advances, dan menjadikannya sebagai seni lukis hewan tertua di dunia yang berasal dari 45.500 tahun silam.

Sketsanya menggambarkan seekor babi gemuk sedang menyaksikan dua makhluk lain yang sedang bertarung. Sebenarnya ini sudah terungkap pada 2017, laporan yang disuguhkan Griffith University dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas), mengungkapkan usianya yang ternyata sangat tua dari temuan sejenis lainnya di dunia.

"Babi adalah hewan yang paling sering digambarkan pada gambar ca-

das zaman es di pulau ini, kemungkinan mereka memiliki nilai penting baik sebagai makanan maupun sebagai ide kreatif dan ekspresi seni," terang Maxime Aubert, salah satu anggota peneliti

10. Prosesor kuantum terkuat

Pada November 2021, IBM meluncurkan Eagle 127-qubit. Ini adalah prosesor kuantum paling kuat yang pernah ada. Komputer kuantum ini dapat melakukan dalam hitungan detik apa yang dibutuhkan superkomputer terbaik saat ini untuk diproses dalam beberapa hari atau minggu.

Teknologinya menggunakan hukum fisika kuantum untuk kemamp-

kan peningkatan tajam pada gajah Afrika tanpa gading setelah bertahun-tahun melakukan perburuan. Ini karena pemburu membunuh begitu banyak gajah dengan gading raksasa selama Perang Saudara Mozambik dari 1977 hingga 1992, sehingga betina tanpa gading besar lebih mungkin untuk mewariskan gen mereka. Sebelum perang, sekitar 20 persen tidak memiliki gading dan sekarang sekitar setengah dari gajah betina tidak memiliki gading.

Selain membunuh hewan, salah satu cara tidak langsung evolusi hewan terpengaruh oleh manusia adalah bagaimana mereka menghadapi



uan pemrosesan luar biasa yang dapat merevolusi meteorologi, keamanan siber, manufaktur, pertahanan nasional, dan banyak lagi.

Sedangkan perusahaan Quantinuum meluncurkan platform keamanan siber berbasis cloud yang disebut Quantum Origin, produk komersial pertama di dunia yang dibangun dari komputasi kuantum. Komputasi kuantum tentu saja meaju pesat dengan temuan ini.

11. Pengaruh manusia pada evolusi hewan

Manusia telah mempengaruhi evolusi hewan secara langsung dan tidak langsung. Penelitian telah menunjuk-

kenaikan suhu yang disebabkan oleh pemanasan global. Sebuah studi di Trends in Ecology and Evolution menemukan bahwa kelelawar telah menumbuhkan sayap yang lebih besar dan kelinci yang menumbuhkan telinga lebih panjang, keduanya cenderung membuang lebih banyak panas ke udara sekitarnya.

Science Advances menerbitkan lebih banyak bukti tentang hal ini. Kemungkinan besar sebagai akibat dari kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan, 77 spesies burung dari petak terpencil di hutan hujan Amazon diamati memiliki bobot lebih rendah dan memiliki sayap lebih panjang selama 40 tahun. ●



► Kunjungan ke Sumatera Selatan

MENYIAPKAN ENERGI MASA DEPAN

Momentum menyiapkan masa depan dengan transisi energi dan mengandalkan energi terbarukan tersirat dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumatera Selatan. Salah satu cara untuk memulihkan iklim yang sudah kelebihan beban karbon, limbah pembakaran.

Pagar Alam itu kota kecil saja. Berpenduduk sekitar 143 ribu jiwa di areal seluas 633 km persegi lebih, justru kota ini ideal menjadi model pengembangan wilayah yang berorientasi lingkungan. Malah Presiden Jokowi menyebut Kota Pagar Alam, Sumsel, akan menjadi kota pertama di Indonesia yang menggunakan energi hijau dan sebagai kota zero emission.

"Ini akan menjadi kota dengan zero emission yang pertama, kalau bisa nanti ditindaklanjuti ke penggunaan listrik yang lainnya. Pagar Alam akan

menjadi kota pertama di Indonesia yang menggunakan energi hijau," kata Jokowi dalam Apresiasi Kota Pagar Alam sebagai Kota Energi Hijau, Senin, 24 Januari 2021.

Berlokasi sekitar 298 kilometer dari Palembang, Ibu Kota Sumatera Selatan, Pagar Alam memiliki Gunung Dempo, puncak tertinggi di Sumatera Selatan, yang juga berpotensi menjadi sumber listrik panas bumi maupun tenaga air. Pada kenyataannya, Kota Pagar Alam memanfaatkan tiga pembangkit EBT yakni Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Green La-

hat dengan kapasitas 9,99 Megawatt, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai dengan kapasitas 55 Megawatt, dan PLTP Rantau Dedap dengan kapasitas 91,2 Megawatt.

Presiden juga telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Sumatera Selatan untuk mulai melakukan perencanaan terkait bantuan untuk pengembangan energi hijau di Kota Pagar Alam. "Saya tadi sudah menyampaikan kepada Pak Menteri BUMN, kepada Pak Gubernur Sumatera Selatan dan juga Pak Walikota Pagar Alam agar mulai direncanakan



(pengembangan energi hijau). Pemerintah pusat akan bantu di tempat-tempat yang bisa dibantu,” ungkapnya.

Jokowi optimistik Pagar Alam akan menjadi kota yang dapat dicontoh oleh seluruh daerah di Indonesia dalam bidang energi baru dan terbarukan (EBT). “Sebuah brand baru energi hijau. Saya yakin, insyaallah seluruh Tanah Air akan melihat ke Kota Pagar Alam, di mana keindahan alam hijau, energinya juga EBT, orang akan merasakan betapa yang namanya tanpa polusi itu didambakan,” jelasnya.

Terlebih lagi, Pagar Alam seperti wilayah yang terlupakan. Baru mendapat kunjungan Kepala Negara setelah 70 tahun Presiden Soekarno datang ke kota itu pada 1952. Ini menjadi kesan pula untuk Presiden.

“Sore hari ini saya betul-betul merasa berbahagia sekali karena bisa hadir di Kota Pagar Alam, di mana 70 tahun yang lalu Bung Karno pernah ke sini yaitu di tahun 1952 dan di titik yang sama, di sini, alhamdulillah,” ujar Presiden di Lapangan Merdeka, Kota Pagar Alam.

Kedatangan Kepala Negara ke Kota Pagar Alam juga meninggalkan kesan

mendalam bagi masyarakat yang turut menyambut hangat. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, bahkan menyebut bahwa kedatangan Presiden Jokowi sangat dinantikan oleh masyarakat.

“Bapak memang sudah dinantikan di Kota Pagar Alam ini, di mana kerinduan ini sudah sangat dalam sebab kota ini pernah dihadiri Presiden (Soekarno) di titik yang sama 70 tahun yang lalu pada 1952. Kerinduan itu terjawab tat kala Bapak hadir di sini. Masyarakat gegap gempita menyambut Bapak sejak turun dari Bandara Atung Bungsu tadi,” ucap Herman.

Gubernur Herman berharap, Presiden Jokowi merasa nyaman saat berada di kota yang memiliki udara yang sejuk tersebut. Selain itu, Kota Pagar Alam juga dikenal memiliki penduduk yang ramah serta penuh dengan sejarah. “Kota yang penuh sejarah, dibangun warganya karena lahir banyak jenderal di sini, karena punya etos kerja yang baik,” ungkap Herman.

Beriringan dengan kunjungan ke Kota Pagar Alam, Presiden Jokowi melewati Kabupaten Lahat menuju Kabupaten Muaraenim, salah satu lumbung

energi lawas Sumatera Selatan, batu bara. Di wilayah Tanjung Enim, tepian sungai, Jokowi meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) program transformasi pemanfaatan batu bara yang lebih ramah lingkungan dengan hilirisasi menjadi energi gas cair dimetil eter (DME). Mudah-mudahan, gasifikasi batu bara.

Presiden meminta proyek ini selesai dalam waktu 30 bulan dan tidak boleh mundur. “Semua yang berkaitan dengan ini saya pastikan selesai yang sesuai disampaikan oleh Air Products & Chemical Inc (APCI) yakni 30 bulan (proyek selesai). Jangan ada mundur-mundur lagi,” ujar ayah Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ini.

Proyek gasifikasi batu bara ini akan dibangun oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bekerjasama dengan dan Air Products & Chemical Inc (APCI). Total investasi dari APCI sebesar USD2,1 miliar atau setara Rp 30 Triliun. Presiden Jokowi juga mengungkapkan, hasil api dari DME atau gasifikasi batu bara ini mirip dengan LPG. Jika ini berjalan dan berproduksi maka dipastikan akan mengurangi subsidi LPG dari APBN Rp7

triliun per tahun.

"Kalau semua LPG nanti disetop, dan semua nanti pindah ke DME, duitnya gede sekali hingga Rp 60-70 triliun. Itu akan bisa dikurangi subsidi-dia dari APBN," katanya.

Sedangkan Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam Tbk Rafli Yandra mengatakan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) akan mengubah enam

impor berkurang. "Ini perintah udah enam tahun yang lalu saya sampaikan. Tetapi memang kita ini, sudah berpuh-puluh tahun nyaman dengan impor," ujarnya.

Ia menjelaskan, memang selama ini ada yang nyaman dengan impor dan menjadikan impor sebagai zona nyaman. Padahal negara dan rakyat sangat dirugikan dengan kebiasaan impor, sebab tidak adanya lapangan pekerjaan.



juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahun. "Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar," ujar Rafli.

Presiden Joko Widodo mengatakan, hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) menjadi momentum menekan ketergantungan impor dan memperbaiki neraca perdagangan. Neraca perdagangan mampu ditekan bila

"Sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor tidak berpikir bahwa negara itu dirugikan. Rakyat dirugikan karena tidak terbuka lapangan pekerjaan. Bayangkan tadi disampaikan oleh Menteri Investasi akan membuka lapangan pekerjaan 11.000 sampai 12.000 di sini," jelasnya.

Presiden mengatakan sudah berkali-kali dirinya menyampaikan pentingnya proyek hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam agar Indonesia

mampu mengurangi impor. "Kita memiliki bahan bakunya, raw material-nya (bahan mentah), yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan LPG, tadi saya sudah melihat bagaimana api dari DME untuk masak, api dari LPG untuk masak, sama saja," sambung Presiden.

Impor untuk LPG, kata Presiden, setiap tahun mencapai Rp80 triliun dari kebutuhan yang sebesar Rp100 triliun. Untuk bisa dikonsumsi masyarakat, pemerintah juga harus menyalurkan subsidi hingga Rp60 triliun-Rp70 triliun. "Apakah ini mau kita teruskan? Impor terus?" ujarnya.

Karena itu Presiden mendorong program hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Kalau ini dilakukan, ini saja, yang di Bukit Asam (PT Bukit Asam Tbk) yang kerja sama dengan Pertamina (PT Pertamina Persero) dan Air Product (Air Products & Chemicals) ini, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu Rp7 triliun," jelas Presiden.

Jika impor dapat terus dikurangi, kata Presiden, maka neraca barang dan jasa yang terekam dalam neraca transaksi berjalan akan terus membaik. Karena itu, proyek hilirisasi batu bara ini diharapkan dapat mengurangi impor gas.

"Ini yang terus kita kejar. Selain bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena tidak impor, memperbaiki neraca transaksi berjalan kita juga karena tidak impor," kata Presiden Jokowi.

Dia berharap semakin banyak investasi yang bisa dibuka di Indonesia. Sehingga semakin banyak lapangan kerja yang tercipta secara langsung berdampak pada masyarakat.

"Kalau ada lima Investasi seperti yang ada dihadapan kita ini, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung, yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat. Inilah Kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus," katanya.

Kota Pagar Alam dan Kabupaten Muara Enim mengapit Kabupaten Lahat. Peluang besar tentunya, juga untuk kota dan kabupaten lainnya di masa depan. ●



INVESTASI AS TERBESAR KEDUA SETELAH FREEPORT

Proyek gasifikasi batu bara di Kabupaten Muara Enim rupanya merupakan investasi dari Amerika Serikat. Malah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut proyek ini merupakan investasi terbesar kedua dari AS, setelah PT Freeport Indonesia.

Investor atau penanam modalnya adalah Air Products and Chemicals Inc. Proyek ini, kata Menteri Bahlil, akan mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) atau gas layaknya gas LPG.

"Ini investasi cukup besar, Pak Presiden. Investasi kedua terbesar setelah Freeport untuk tahun ini," ungkapnya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara ground-breaking proyek hilirisasi batubara di Muara Enim, seperti yang dikutip dari YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Senin, 24 Januari 2022.

Bahlil mengungkapkan, realisasi kerja sama investasi Air Products and Chemicals, serta PT Bukit Asam dan PT Pertamina ini mencapai Rp33 triliun. Dia menegaskan, target realisasi penanaman modal ini kurang dari tiga

tahun. "Bapak Presiden, kami sampaikan bahwa realisasi investasi Rp33 triliun waktunya seharusnya 36 bulan. Tapi, kami rapat dengan dengan Air Products minta 30 bulan," tuturnya.

Investasi ini juga ditargetkan bisa menghasilkan hingga 13.000 lapangan pekerjaan dari sisi konstruksi atau sisi hulu, serta 12.000 lapangan pekerjaan di sisi hilir oleh PT Pertamina. Setelah mulai berjalan, proyek gasifikasi tersebut diperkirakan bisa menciptakan 3.000 lapangan pekerjaan tetap secara langsung.

Sementara itu, proyek ini juga diperkirakan bisa melibatkan secara tidak langsung tenaga kerja seperti kontraktor dan sub-kontraktor yang berjumlah hingga 3-4 kali lipat lebih banyak dari yang sudah ada. Bahlil menegaskan 95 persen dari tenaga kerja yang dipekerjakan dalam proyek ini adalah tenaga kerja asal Indonesia.

"Ini lapangan pekerjaannya semuanya dari Indonesia. Air Products [and Chemicals] sudah saya panggil, tenaga kerjanya 95 persen dari Indonesia. Lima persennya itu hanya di masa konstruksi. Masa produksinya, nanti akan melibatkan PT Bukit Asam

dan PT Pertamina," ujarnya.

Selain menciptakan nilai tambah komoditas, output dari proyek gasifikasi batu bara ini diharapkan mengurangi impor gas LPG. Bahlil menyebut impor gas LPG Indonesia setiap tahunnya bisa mencapai 6-7 juta ton secara rata-rata. Jadi, proyek hilirisasi batu bara ini ditargetkan bisa menghasilkan output dimetil eter (DME) 1,4 juta ton per tahunnya, atau setara dengan satu juta ton LPG.

Dengan begitu, hilirisasi bisa mendorong efisiensi belanja negara untuk subsidi sekitar Rp6 triliun sampai dengan Rp7 triliun. "Jadi, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak dukung hilirisasi untuk melahirkan substitusi impor," katanya.

Bahlil menceritakan bahwa total nilai investasi yang ditandatangani antara Indonesia dan Air Products and Chemicals Inc adalah senilai US\$15 miliar atau Rp210 triliun. Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak ditandatangani saat lawatan sejumlah pejabat pemerintahan ke Uni Emirat Arab, November 2021 lalu.

Kunjungan Presiden ke Sumatera Selatan memang merintis masa depan. Semoga tak ada yang ketinggalan. ●

SEJARAH BARU DI PERTAMINA MANDALIKA CIRCUIT

Uji coba sudah berlangsung di sirkuitnya. Pacuan sepeda motor sesungguhnya segera berlangsung Maret 2022.



Sejarah baru tertoreh di Pertamina Mandalika Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tak kurang dari dua lusin pembalap MotoGP (motorcycle grand prix), ajang balap sepeda motor paling bergengsi di dunia, sudah menjajal lintasan sirkuit yang menurut rencana akan menjadi salah satu tempat lomba resmi tahun ini juga.

Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah balap grand prix pada 1997.

Balapan Grand Prix saat itu nama resminya Marlboro Indonesia Grand Prix dan berlangsung di Sirkuit Sentul, Bogor. Seperempat abad kemudian baru berulang.

Nah, uji coba MotoGP di sirkuit Mandalika itu menjadi penyempurna latihan yang sebelumnya dilaksanakan di sirkuit Sepang, Malaysia. Seri pertama balapan MotoGP akan berlangsung di sirkuit Losail, Qatar pada tanggal 6 Maret 2022. Berikutnya, berlangsung GP

Mandalika Indonesia pada 20 Maret 2022.

Jadi, sirkuit Mandalika akan menggelar seri kedua MotoGP 2022 dari keseluruhan 21 seri, selain daripada MotoGP Qatar di sirkuit Losail yang menjadi seri pembukanya. Lanjut kemudian di sirkuit KymiRing di Finlandia, negara berikutnya yang akan menggelar race pada musim 2022 ini.

Memang, bendera merah sempat berkibar, pertanda ada yang kurang



beres dalam tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika hari pertama, Jumat, 11 Februari 2022 itu. Penghentian sementara terjadi setelah satu jam tes berlangsung. Pihak penyelenggara mengibarkan bendera merah sehingga tes terhenti selama kurang lebih dua jam.

Tak urung banyak berita burung tersebar di media sosial yang membuat kritik pun tertuju ke Sirkuit Mandalika. Antara lain, ada yang menganggap sirkuit tidak memadai karena banyak lumpur, genangan hingga kerikil.

Toh penyelenggara, Mandalika GP Association (MGPA) segera menjelaskan apa yang terjadi sehingga bendera merah akhirnya berkibar. Rupanya penyelenggara ingin membersihkan lintasan yang kotor akibat hujan yang mengguyur Sirkuit Mandalika semalaman.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, menjelaskan rumor itu semua itu tidak benar. Pembersihan lintasan dilakukan untuk sisa-sisa parutan ban yang terdapat di garis tikungan.

"Tadi, di pagi hari, kami berhenti karena di beberapa tikungan ada sisa-sisa parutan ban sehingga Dorna

(Sports, penyelenggara MotoGP) meminta kami membersihkan," ucap Priandhi, Jumat, 11 Februari 2022.

Ia menyayangkan banyaknya narasi negatif yang tersebar di media sosial dengan melihat adanya bendera merah berkibar. Menurut Priandhi, bendera merah wajar di MotoGP untuk menghentikan balapan sementara, tetapi itu tidak selalu berarti negatif.

"Saya rasa bendera merah standard ya. Kalau kami mau menutup trek, satu-satunya yang bisa kami kasih tau pembalap, ya, (bendera) merah. Artinya, jangan dulu dilanjutkan. Bukan berarti merah ada genangan oli di tengah lintasan," tandasnya.

Akhirnya sesi pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika pada hari pertama pun tuntas sekitar pukul 17.40 Wita. Para rider menyelesaikan uji cobanya menjelajahi sirkuit. Setelah lintasan dibersihkan dari debu, pasir, dan pecahan karet ban, latihan digelar dengan kembali lancar.

Cuaca yang cerah dan cukup terik, membuat para rider harus mampu beradaptasi. Espargaro bersaudara (Pol dan Aleix) menjadi yang tercepat di hari pertama ini. Sempat ada beberapa crash yang dialami rider, tapi serius dan mereka mampu kembali melanjutkan latihan di sirkuit.

Pol, sang adik, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 32,466 detik, dengan menjalani 69 putaran. Rider Honda itu berhasil menorehkan waktu mengguguli catatan sang kakak, Aleix yang berada di tempat kedua dengan

waktu 1 menit 32,937 detik.

Catatan waktu Pol Espargaro berhasil mengalahkan rekor putaran tercepat Mandalika saat ini yang dipegang oleh Toprak Razgatlioglu. Juara dunia World Superbike itu berhasil mencatatkan waktu 1 menit 32,877 detik pada Superpole Race pertama Mandalika pada November 2021 silam.

Posisi ketiga ditempati oleh rider KTM, Brad Binder. Dia menorehkan waktu terbaik 1 menit 32,943 detik. Melengkapi lima besar disusul Alex Rins dengan selisih 0,592 detik dari Pol Espargaro dan Fabio Quartararo punya jarak 0,642 detik.

Rider Ducati yang berdigdaya di Sirkuit Sepang tak bisa masuk lima besar di hari pertama tes MotoGP Mandalika. Posisi enam hingga 10 secara berurutan ditempati oleh Jack Miller, Maverick Vinales, Joan Mir, Andrea Dovizioso, dan Jorge Martin.

Sedangkan juara dunia delapan kali MotoGP, Marc Marquez berada di posisi ke-17. The Baby Alien hanya bisa mencatatkan waktu terbaik 1 menit 33,776 detik.

Pebalap tercepat dari tes pramusim MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika relatif merata dari enam pabrikan. Honda, Aprilia, Suzuki, Yamaha, KTM, dan Ducati yang utama.

Kesaksian Ketua IMI yang juga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dari beberapa unggahan yang viral di media sosial, para pembalap terlihat antusias dalam menghadapi pramusim di Mandalika ini. Salah satunya adalah



pembalap MotoGP, Aleix Espargaro yang beberapa kali membuat ungahan di akun Instagramnya dengan menunjukkan momen saat ia berkeliling menikmati keindahan alam dan keramahan masyarakat di sekitar Mandalika.

"Sirkuit ini sebelumnya telah menjadi buah bibir dan setelah ini tentu kita harapkan akan lebih bergema lagi, sehingga memancing penonton mancanegara untuk hadir bulan depan. Kalau misalnya belum ada kesempatan

yang optimal. Karakter Mandalika yang fast and flowing memungkinkan pembalap untuk mendapatkan itu.

Uji coba pramusim di Mandalika ini adalah pramusim terakhir yang dilakukan sebelum memasuki seri pertama balap MotoGP. Pramusim ini pun dianggap sebagai ajang unjuk gigi para pembalap MotoGP dan motor barunya dengan melakukan serangkaian uji tes seperti kecepatan maksimal motor (time attack), maupun lomba (long run).

la bilang, banyaknya belokan di lintasan membuat Sirkuit Mandalika menjadi salah satu daya tarik sirkuit yang terletak di daerah kawasan Kuta Lombok itu. "Trek Sirkuit Mandalika sangat lebar, dengan banyak perubahan arah di kecepatan tinggi, begitu menarik untuk dicoba," imbuh kakak dari Pol Espargaro tersebut.

Sebelumnya, peninjau lapangan MotoGP, Simon Crafar, sempat menjajal sirkuit sepanjang 4,3 km ini bersama rider Ducati, Jack Miller, dengan



tahun ini, masih ada tahun-tahun ke depan," kata Bamsoet, Jumat, 11 Februari 2022.

Dia bilang, IMI telah memberikan usaha maksimal sesuai kapasitas mereka. Ia mengatakan, IMI selalu melakukan komunikasi dengan semua stakeholder MotoGP, mulai dari FIM, Dorna, ITDC, dan MGPA.

"Semua ingin tes pramusim ini berjalan baik dan lancar. Serta puncaknya adalah bulan depan Pertamina Grand Prix of Indonesia berlangsung hebat," ucapnya.

Siapa pun yang tercepat di Mandalika selama pramusim nanti, tambahannya, adalah hasil dari pengembangan

Testimoni Aleix Espargaro sebagai salah satu rider tercepat di hari pertamalah yang lebih layak simak. Pebalap dari Tim Aprilia Racing ini mengaku terkesan dengan keindahan Sirkuit Mandalika.

Namun, ia juga menyebutkan Sirkuit Mandalika sebagai lintasan yang aneh. Ia menilai Sirkuit Mandalika memiliki karakteristik yang berbeda dari kebanyakan sirkuit, terutama di Eropa.

"Saya menunggang motor di Sirkuit Mandalika, saya juga sudah berkeliling di sana. Itu sirkuit yang indah, namun aneh. Karena berbeda dari sirkuit-sirkuit yang biasa ada di Eropa," ucap Aleix Espargaro kepada Sky Sports Italia.

mengendarai mobil. Crafar terkesan dengan tantangan yang tersedia di Sirkuit Mandalika. Mantan rider MotoGP 500cc itu menyamakan sirkuit baru ini dengan beberapa trek top Eropa seperti Hockenheim di Jerman, serta Monza di Italia.

Usai uji coba, para pecinta MotoGP mungkin merasa lama menantikan balapan sesungguhnya dengan kecepatan melebihi 300 km/jam itu di lintasan Pertamina Mandalika Circuit. Terlebih lagi, sebagian tiket masuknya, terutama kategori VIP hospitality suite premiere class, sudah ludes sebelum lomba dimulai. Sampai jumpa Maret nanti. ●

BALAPAN LANCAR TERBANTU MARSHALL

Beriring dengan lomba pacu motor, senantiasa ada petugas yang membantu kelancaran di arena. Mereka dikenal sebagai marshall.

Mungkin terkesan sepele. Namun, fungsi marshal amat penting dalam pergelaran MotoGP. Terlebih jika terjadi insiden di arena adu pacu.

Donny Mahardjono, instruktur marshal dari Ikatan Motor Indonesia (IMI), menjelaskan, setidaknya terdapat lima kategori marshal yang bertugas pada sesi tes pramusim maupun saat balapan MotoGP Mandalika pada Maret 2022 mendatang. "Ada Flag Marshal, Track Marshal, Rescue Marshal, Pit dan Grid Marshal, dan terakhir Moto Taxi," ujar Donny, Jumat, 11 Februari 2022.

Berdasarkan informasi dari merekalah, para steward atau juri yang bertugas bisa mengambil dan menentukan keputusan. Seperti pengibaran bendera red flag tanda arena sirkuit harus dikosongkan sebagaimana terjadi pada uji coba hari pertama pramusim di Pertamina Mandalika Circuit.

Di sirkuit Pertamina Mandalika, yang terlibat dalam pengerahan para marshall adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika)/The Mandalika melalui Mandalika Grand Prix Association (MGPA), selaku bagian dari ITDC Group, dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) pusat maupun NTB. Dalam kegiatan ini, IMI bertugas sebagai instruktur pelatihan.

Sejumlah 338 marshal ini terdiri dari 198 orang marshal WSBK 2021 yang telah melakukan pendaftaran ulang pada 28-30 Januari 2022 lalu, 69 orang merupakan rekrutan marshal baru, 51 orang anggota Brimob, dan 20 orang dari Badan SAR Nasional (Basarnas). Marshal yang direkrut berasal dari masyarakat Lombok khususnya

warga sekitar Sirkuit.

Proses perekrutan warga lokal ini melibatkan komunitas otomotif NTB dan Karang Taruna Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Sementara, anggota Brimob dan Basarnas direkrut untuk bertugas sebagai radioman.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, anak usaha ITDC, Priandhi Satria mengungkapkan, pemenuhan kebutuhan marshall

wan senior olahraga otomotif ini.

Salah seorang marshall, Ki Agus menuturkan bahwa dirinya mengikuti perekrutan dan pelatihan ini dikarenakan memiliki hobi pada bidang otomotif. "Di samping punya hobi pada bidang otomotif, saya ingin mengembangkan nama Lombok Tengah dengan menjadi relawan marshall di Sirkuit Mandalika," ujar Agus.

Marshal lainnya Erisdayanti men-



berkualitas merupakan hal yang krusial dalam penyelenggaraan sebuah event balap otomotif. "Oleh sebab itu, di bawah koordinasi IMI (Ikatan Motor Indonesia, red) Pusat dan IMI NTB secara bersama-sama juga telah memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan marshall yang kami rekrut," ujar pria yang akrab disapa Andhi ini.

Ia menambahkan, para marshall ini sifatnya sebagai relawan atau volunteer. "Kami ingin menumbuhkan jiwa memiliki dan bangga pada wilayah mereka sendiri. Sehingga, mereka memiliki andil yang besar dalam jalannya sebuah perhelatan balap. Ini adalah event internasional yang patut dibanggakan bersama," kata mantan warta-

gaku hal serupa bahwa di samping dapat menikmati balap secara langsung, ia sudah lama mengimpikan menjadi bagian di dalamnya. "Saya bangga menjadi marshall lokal yang bisa berpartisipasi dalam sebuah event yang seru ini serta berada di wilayah sendiri," terang Erisdayanti.

Seluruh marshall ini juga disiapkan untuk ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia, 18-20 Maret 2022 nanti. Untuk itu, ITDC telah membuka perekrutan marshall baru. "Kami telah menambah perekrutan marshall baru sebanyak 100 orang untuk bersiap saat penyelenggaraan race pada Maret mendatang. Sehingga akan ada lebih dari 400 marshall bertugas saat race day," jelasnya. •



SABAR DULU, TAMAN MINI SEDANG RENOVASI

Sempat beredar di media sosial video tentang kondisi terkini sejumlah spot di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur. Terkesan ada beberapa lokasi yang terbengkalai. Ternyata sedang renovasi.

Maka ramai pula komentar negatif maupun positif beredar. Terlebih kawasan wisata ini belum lama beralih pengelolaannya dari Yayasan Harapan Kita yang didirikan Presiden kedua RI Soeharto, kepada pemerintah yang kini dipimpin Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Agak mengherankan juga jika mengingat pada libur tahun baru 2022 yang belum sebulan berlalu, kunjungan ke TMII justru mulai menanjak.

Angkanya meningkat dibandingkan dengan saat libur Natalan 2021. Tercatat sekitar 31 ribu pengunjung berkeliling di kawasan yang menyediakan paviliun rumah adat dari seluruh Indonesia itu pada Sabtu-Minggu, 1-2 Januari 2022.

"Dibandingkan dengan libur Natal minggu lalu, jumlah pengunjung TMII di Tahun Baru 2022 ini mengalami peningkatan. Saat Natal minggu lalu, jumlah pengunjung TMII 12.500 orang, sedangkan pada Sabtu, 1

Januari 2022, jumlah pengunjungnya 15.471 orang dan hari ini tercatat ada 16.137 pengunjung," ungkap Kepala Humas TMII Adi Widodo, Minggu, 2 Januari 2022.

Meski mengalami peningkatan, Adi menyatakan bahwa angka kunjungan tersebut masih jauh dari kapasitas 75 persen yang ditetapkan oleh pemerintah. "Masih jauh di bawah jumlah pengunjung yang diizinkan yakni 45.000 pengunjung," tambahnya.

Namun, angka yang masih jauh

dari kapasitas itu berkaitan dengan pembatasan pengunjung melalui penjualan tiket masuk secara online. "Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, khusus tanggal 31 Desember 2021, 1 dan 2 Januari 2022, TMII hanya melayani pembelian tiket online melalui tamanmini.com, minimal H-1 sebelum kedatangan," ungkap Direktur Eksekutif TMII I Gusti Putu Ngurah Sedana.

Sedana juga mengungkapkan, TMII pun melakukan perubahan jam operasional selama masa libur Tahun Baru yaitu mulai pukul 06.00 WIB hingga 15.00 WIB. Di masa sebelum wabah Covid-19 merajalela, kawasan ini bisa ingar-bingar hingga tengah malam.

Adi Widodo mengakui, pembatasan ini mengurangi angka kunjungan. "Sistem online ini banyak dikeluhkan warga yang tidak memiliki HP untuk bisa membeli tiket online. Ditambah lagi adanya aturan ganjil genap kendaraan di obyek wisata membuat kunjungan ke TMII agak sedikit menurun. Namun yang pasti kita sebagai pengelola objek wisata tetap mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah adanya kerumunan dan menekan penyebaran Covid-19," ujarnya.

Tambahan pula, semua pengunjung TMII harus menjalani pemindaian aplikasi PeduliLindungi ketika hendak masuk area TMII. Setiap pengunjung yang masuk baik menggunakan kendaraan bermotor atau jalan kaki, diwajibkan scan barcode yang sudah disiapkan oleh masing-masing petugas.

"Secara umum, semua pengunjung sudah mematuhi protokol kesehatan dan tetap mengunduh aplikasi PeduliLindungi untuk bisa masuk ke TMII dan petugas yang ada baik didalam maupun diluar area TMII juga terus melakukan pengawasan terhadap proses pengunjung," tandasnya.

Nah, belum sebulan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, beredarlah video yang mengesankan sejumlah spot TMII terbengkalai. Netizen pun mendadak membicarakan soal ini.

Namun, Adi pula yang mengungkap-

kan kesan terbengkalai itu lantaran TMII sedang mengalami renovasi. "TMII memang sedang direnovasi. Detail rencana silakan hubungi PUPR. Perpres Nomor 116 tahun 2021 sebagai dasarnya," kata Adi, Kamis, 20 Januari 2022.

Penegasan datang dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. "Saat ini proses penataan ulang kawasan sudah berlangsung dan kita berharap 'wajah baru' TMII nantinya akan dapat memberikan pengalaman berwisata bagi wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan," ujar Menteri Sandi, Senin, 24 Januari 2022.

Sandi juga menyinggung soal pengambilalihan TMII oleh pemerintah tentu bukan ingin membuat TMII

"Kalau melihat spot rekonstruksi, ini kita sudah mulai. Kita kerja cepat betul. Pengelolaan untuk ke depan jadi satu destinasi kebanggaan baru Indonesia, The Ultimate Showcase of Indonesia Beauty," ungkap Direktur Utama TWC EdySetijono dalam Coffee Morning di TMII, Rabu, 26 Januari 2022.

Menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), para pemangku kepentingan hingga tim arsitek kenamaan Han Awal yang dipimpin Yori Antar, Edy meyakinkan kelak TMII akan kembali mendapat ruhnya seperti semangat awal almarhum bu Tien Soeharto di tahun 80-an. "Kita semua komponen yang terlibat dalam revitalisasi ini menjunjung tinggi semangat almarhumah Bu Tien dan Presiden Kedua Soeharto,



terbengkalai. Ia mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program atau penataan ulang TMII, terutama dalam menyambut penyelenggaraan berbagai event internasional seperti Presidensi G20 Tahun 2022, ASEAN Summit, dan MotoGP di Kawasan Mandalika.

Sejak Juli 2021, Badan Usaha Milik Negara bidang pariwisata PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC) yang mengembangkan amanah pengelolaan TMII. Program awalnya adalah restorasi dan revitalisasi TMII untuk menjadi etalase megah Indonesia.

TMII sebagai destinasi yang luar biasa. Kita ingin mengembalikan ruhnya," ujarnya.

"Semua yang ada di TMII akan mengacu pada masterplan Pemerintah dan telah disetujui oleh semua stakeholder. Itu yang akan menjadi dasar pengembangan," dia menambahkan.

Saat ini, perombakan besar-besaran memang telah dimulai di TMII. Namun, semangat untuk mengenalkan Indonesia lewat TMII tak akan hilang dan tetap dijadikan atraksi utama untuk wisatawan. "Tak lagi taman hiburan, tapi central hub komunikasi



bangsa kita. TMII ini gerbang masuk tamu negara dan wisatawan untuk mengenal Indonesia,” ujarnya.

Terkait desain dan konsep, PT TWC dan KemenPUPR selaku pemilik proyek mempercayakan pada sosok Yori Antar dari firma arsitek Han Awal. Sekadar mengingatkan, Yori juga terlibat dalam revitalisasi Gelora Bung Karno (GBK) saat Asian Games 2018 lalu.

Sang Arsitek juga sudah mengungkapkan desain dasar dan konsep di balik restorasi dan revitalisasi TMII yang dipercayakan padanya. “Dalam perencanaan revitalisasi dan restorasi TMII ini, kita akan mengembalikan

marwah TMII dengan memperkuat narasi agar TMII ini jadi showcase premium Indonesia,” kata Yori.

Mengacu pada kata taman dalam nama TMII, Yori ingin membuka lebih banyak ruang hijau. Ia pun berkaca pada konsep TMII di awal tahun 80-an. “Yang pertama kami visikan bagaimana mengembalikan kata taman, harus lebih indah. Jadi, 30 persen bangunan, 70 persen ruang hijau,” tuturnya.

Makin ke sini, Yori melihat TMII kian menjauh dari konsep awal. Dulu antaranjungan, terkoneksi dan tiada pagar. Kini malah dipagar dan menutupi anjungan yang jadi atraksi utama.

“Kedua bagaimana TMII jadi showcase premium bagi masyarakat lewat taman hijau, juga bisa memberi nilai tambah wawasan dan kebudayaan Indonesia. Lihat rumah gadang di sini, nanti jadi ingin ke Padang,” Yori mencontohkan.

Yori juga menunjukkan maket TMII sebagai gambaran tampilan pasca renovasi. Mulai dari akses masuk TMII, jalur utama hingga tugu api yang dikelilingi tumbuhan dan kontur hijau. Nantinya, kata dia, TMII akan dibagi ke 4 zona khusus.

“Showcasenya jadi empat bagian, pertama narasi Indonesia klasik di koridor utama dengan memindahkan pedestrian di tengah. Zaman kejayaan kerajaan-kerajaan kita di masa lalu yang sangat menginspirasi dunia,” ujar Yori.

Kedua ada Zona Archipelago yang berpusat di danau dengan lanskap Sabang sampai Merauke. Menurut Yori, zona ini akan dibuat paling megah dan atraktif.

“Zona Archipelago, zona yang dikelilingi anjungan-anjungan arsitektur kita. Kita akan ada air mancur menari, ring of fire dan tentunya musik-musik tradisional Indonesia dari Sabang sampai Merauke, panggung pertun-





jukan dan seluruh area ini akan diolah jadi ruang hijau untuk ruang publik," dia menjelaskan.

Nantinya setiap anjungan akan dibuat bebas dari pagar dan mendapat akses terbuka ke danau. Rencananya, area ini akan dibebaskan dari kendaraan bermotor dan hanya terbuka khusus pejalan kaki.

"Khusus pejalan kaki, enggak boleh ada mobil. Promenade keliling. Dilakukan tidak dengan menebang pohon, tapi kita akan tambahkan," kata dia.

Kemudian juga ada Zona Indonesia kini yang menampilkan sisi modern, serta Zona Jendela Dunia yang menampilkan ikon-ikon wisata dunia. Jadi tak terbatas hanya Indonesia saja.

Dengan konsep empat zona itu Yori berharap kelak TMII bisa menjadi representasi Indonesia versi mini di mata dunia. Sementara bagi masyarakat, bisa jadi ruang publik kekinian. "TMII itu museum terbuka buat bangsa Indonesia dan inspirasi dunia, kita berharap tamu-tamu dunia bisa terkagum-kagum," kata dia.

Dalam proses pembangunannya, proyek restorasi dan revitalisasi ini mendapat suntikan dana hampir senilai Rp 1 triliun. Anggaran besar itu mencakup borongan tiga Dirjen

berbeda di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Renovasi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII dengan alokasi sebesar Rp1,13 triliun," ujarnya saat rapat bersama DPR, Selasa, 25 Januari 2022.

Menurut Menteri Basuki, renovasi tersebut meliputi sejumlah wahana dan fasilitas. Mulai dari penanganan jalan kawasan TMII, penataan area gerbang utama, renovasi joglo (Sasono Utomo, Sasono Langen Budoyo, Sasono Adiguno) dan renovasi museum. Renovasi juga akan menyasar penataan lanskap pulau-pulau di Danau Archipelago, renovasi Museum Theater Garuda, Museum Telkom dan Keong Mas, struktur parkir (elevated) serta revitalisasi Danau Archipelago.

Sedangkan PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney sebagai induk Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung mengemukakan tampilan TMII akan dibuat lebih modern dan inspiratif. "Mengu-sung konsep Indonesia Opera yang merepresentasikan keragaman dan kekayaan potensi daerah dan budaya Indonesia," kata Direktur Utama InJourney Dony Oskaria, Senin, 24 Januari 2022

Ke depannya, kata dia, TMII akan tetap menjadi pusat rekreasi edukasi. "Menampilkan kebhinekaan, edukasi pulau-pulau archipelago Indonesia, kereta gantung yang menyenangkan, anjungan-anjungan rumah adat nusantara yang mempesona, serta keong emas yang melegenda akan dikembalikan menjadi kebanggaan kita semua," kata Dony.

Menurut Dony, InJourney terus berkomitmen untuk mendorong kebangkitan sektor pariwisata, salah satunya dengan merevitalisasi TMII. Melalui anak usahanya, PT TWC, InJourney memastikan TWC agar dapat mengembangkan dan membuat TMII berubah lebih baik tanpa menghilangkan identitas, karakter, kebhinekaan serta keindahan Indonesia.

Nah, menurut eksekutif yang lama berkarir di Chairul Tanjung Corporation ini, renovasi TMII akan tuntas pada Oktober 2022. "Diharapkan akan selesai pada Oktober 2022 untuk beberapa area utama. Tentunya dalam proses ini akan melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensi dan memahami esensi dari keberadaan TMII pada awalnya," kata Dony.

Kita tunggu Oktober 2022. Semoga TMII semakin mempesona. ●

TAMAN MINI INDONESIA INDAH DARI MASA KE MASA

Gagasan awal pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bermula dengan kesan Ibu Negara kala itu Tien Soeharto mengunjungi Disneyland, Amerika Serikat pada 1971. Namun, ide membangun TMII yang luasnya mencapai 150 hektar dengan anggaran Rp10,5 miliar dari APBN ditentang berbagai kalangan.

Pada 1971, banyak aksi protes terjadi di mana-mana. Banyak kritik dan perlawanan, demonstrasi digelar untuk menolak rencana pembangunan itu. Karena dianggap menyedot banyak uang rakyat.

Namun, Soeharto pasang badan saat isu tersebut dikritik. Beberapa ucapannya tercatat dalam buku Jejak Langkah Soeharto, oleh tim Dokumentasi Presiden RI.

"Saya akan menghantam siapa saja yang mencoba melanggar konstitusi, dan saya akan mendapat dukungan ABRI. Kalau ada seorang ahli hukum mengatakan Presiden tidak bisa menindak orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, maka Supersemar (Surat Perintah Sebelas

Maret 1966) bisa saya gunakan sebagai alasan mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

Tepat pada 20 April 1975, Presiden Soeharto meresmikan TMII. Sekitar 10 ribu undangan hadir di acara peresmian itu, termasuk Istri Presiden Filipina Imelda Marcos dan istri Presiden Singapura Benyamin Sheares, Yeo Seh Geok Sheares.

Selanjutnya, supaya pengembangan TMII memiliki landasan hukum, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres Nomor 51 Tahun 1977. Keppres itu menjelaskan TMII merupakan milik negara Republik Indonesia yang tercatat di Kemensetneg yang pengelolannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita, ungkap Mensesneg Pratikno.

Adapun Yayasan Harapan Kita dimiliki oleh Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto. "Berarti sudah hampir 44 tahun Yayasan Harapan Kita mengelola milik negara ini," lanjut Pratikno.

Ibu Negara saat itu memiliki dasar pemikiran mewujudkan Taman Mini sebagai sumbangan bagi rakyat, bangsa dan negara dalam bentuk warisan nasional (national heritage) budaya bangsa Indonesia untuk dilestarikan.

Maksud dan tujuan dibangunnya Taman Mini antara lain:

1. Membangun, mempertebal rasa cinta tanah air.
2. Memupuk, membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun tiap daerah terdiri dari berbagai suku (Bhineka Tunggal Ika) mempunyai



cara hidup yang berbeda-beda.

3. Menghargai, menjunjung tinggi kebudayaan bangsa Indonesia dengan jalan menggali dan menghidupkan kembali kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kepada kita.

4. Memperkenalkan kebudayaan, kekayaan alam dan lain sebagainya kepada sesama bangsa kita, di antara daerah-daerah.

5. Menarik wisatawan dan meningkatkan kegiatan pariwisata;

6. Mempromosikan setiap daerah seluruh tanah air;

7. Menghidupkan kerajinan rakyat di seluruh daerah, menampung dan mengatur pemasarannya.

8. Ikut aktif membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun dengan mempersembahkan suatu tempat rekreasi yang bersifat pendidikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Ibukota.

Izin Pembangunan dan Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Mini Indonesia Indah ini Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.: D.III3912/d/4/74, tanggal 22 Agustus 1974, tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pengelolaan Perusahaan

Pelaksana Pengelolaan Taman Mini "Indonesia Indah" untuk pertama kali dibentuk dan diberi nama Badan Pelaksana Pengelolaan Perusahaan Taman Mini "Indonesia Indah". Kemudian melalui Naskah Pernyataan Penyerahan Miniatur Indonesia "Indonesia Indah" di Jakarta, Taman Mini "Indonesia Indah" diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia pada 20 April 1975.

Sebagai bentuk penerimaan oleh Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1977, pada 10 September 1977 TMII telah ditetapkan sebagai milik Negara Republik Indonesia yang penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita.

Berdasarkan Berita Acara Tentang Serah Terima Pengelolaan Perusahaan Taman Mini "Indonesia Indah" di Jakarta, pada 23 Agustus 1979, telah diserahkan kembali Pengelolaan Perusahaan Taman Mini "Indonesia Indah" dari H Tjokropuranolo selaku Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu

Kota Jakarta kepada Ibu Tien Soeharto selaku Ketua Yayasan Harapan Kita.

Selanjutnya Yayasan Harapan Kita mengukuhkan Taman Mini "Indonesia Indah" dalam Akte Persembahan No. 47, tanggal 17 Juni 1987, yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi, Sar-

resmian pada 1972-1975, Taman Mini Indonesia Indah langsung dipersembahkan dan diserahkan oleh Yayasan Harapan Kita kepada negara.

Maka, menurut Mensesneg Pratikno, berdasar masukan dari banyak pihak soal TMII, Presiden Jokowi



jana Hukum, Notaris di Jakarta yang merupakan wujud pengabdian, bakti, kecintaan dan Kontribusi Yayasan

Sebagai suatu rangkaian peristiwa pembangunan dan dilanjutkan dengan pelestariannya, Presiden HM Soeharto dan Penggagas Taman Mini Indonesia Indah Ibu Negara Hj Tien Soeharto tidak pernah memiliki niat untuk melakukan swakelola Taman Mini Indonesia Indah secara mandiri. Sebagaimana pada rentang waktu tiga tahun sejak pembangunan hingga pe-

menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021. "Perpres itu menjelaskan tentang mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemen-setneg," ujar Pratikno dalam konferensi pers virtual pada Rabu Rabu, 7 April 2021. Pratikno pula yang mengungkapkan penataan TMII sebagaimana dilaksanakan pemerintah di Gelora Bung Karno dan Kemayoran.

Kini penataan sedang berlangsung. Hasil awalnya akan terlihat pada Oktober 2022. •



YOUTUBER BANYAK PENONTON, IKLAN, DAN PENGHASILAN

10. DEDDY CORBUZIER

Deddy Corbuzier tercatat duduk di urutan ke-10 daftar youtuber dengan subscriber terbanyak. Angkanya mencapai 17,4 juta akun pelanggan. Di channel ini Deddy Corbuzier memiliki program podcast yang pernah mengundang bintang tamu dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Presiden RI,

dolar Amerika Serikat, setara Rp237 juta-3,7 miliar.

9. GEN HALILINTAR

Selanjutnya di urutan kesembilan, tercatat saluran GEN HALILINTAR dengan jumlah subscriber mencapai 17,8 juta. Saluran ini merupakan kelolaan keluarga halilintar. Konten yang ada didalamnya pun lebih banyak video keseharian keluarga tersebut. Tayangan videonya berhasil memikat hingga 2,9 miliar kali tayang. Sedangkan potensi penghasilan dari iklan saluran ini berkisar sekitar 2.800 hingga 44.400 dollar AS per bulan atau setara Rp 40 juta hingga Rp 638 juta per bulan.

8. INDOSIAR

Di posisi kedelapan, duduk stasiun televisi swasta Indonesia yang juga memiliki saluran YouTube. Isinya sebagian besar adalah tayangan TV yang diunggah ulang ke media sosial. Pengikut saluran stasiun TV di Youtube tercatat tersebut sudah memiliki pengikut sebanyak 19,2 juta. Sedangkan tayangan videonya memikat penonton hingga 8,30 miliar kali tayang. Potensi penghasilan iklan per bulannya mencapai 121.400-1,9 juta dolar AS setara Rp1,74-27 miliar.

7. BAIM PAULA

YouTuber yang memiliki subscriber terbanyak di Indonesia berikutnya yaitu Baim Paula. Channel ini sudah memiliki subscriber sebanyak 19,8 juta. Channel milik artis Baim Wong dan Paula Verhoeven ini mulai dibuat pada 4 Juni 2016. Isinya mengungkapkan kegiatan sehari-hari pasangan seleb pengelola saluran ini. Sedangkan daya pikatnya membuat saluran ini mengundang penonton hingga 3,7 miliar kali tayang. Malah video terbarunya sudah disaksikan sebanyak 499 ribu kali dalam waktu kurang dari 24 jam. Saluran Baim Paula berpotensi meraih iklan antara



Semakin jelas sekarang, selera sebagian besar pengguna media sosial Indonesia adalah tayangan hiburan. Karena itu, 10 saluran (channel) dunia hiburan pula yang paling banyak memiliki penonton berlangganan (subscriber). Dampaknya adalah potensi penghasilan para youtuber dari akses terhadap iklan di saluran mereka juga tinggi. Namun, jika masuk 100 besar saja, boleh jadi penghasilannya lumayan. Berikut saluran youtube yang paling banyak memiliki subscriber pada 2021. Mulai dari urutan ke-10.

Ma'ruf Amin.

Selain itu, ada juga program stand up comedy yang ia beri nama Somasi. Kini penonton channel Deddy Corbuzier sudah semakin banyak. Video terbarunya bahkan sudah disaksikan sebanyak 1,6 juta kali dalam waktu satu hari.

Sekadar info, di bawah Dedi, tercatat Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y), youtuber muda kelahiran tahun 2007 memiliki 17,1 juta dan videonya telah ditonton 2,09 miliar kali. Channel Youtube yang baru dibuat tahun 2017 ini berpotensi menghasilkan 16.500 hingga 264.100

16.900-270.500 dollar AS setara Rp 242 juta hingga Rp 3,88 miliar per bulan.

6. FROST DIAMOND

Sedikit berbeda dari yang lain, saluran dengan jumlah subscriber terbanyak di urutan keenam adalah Frost Diamond yang berisi permainan (game) interaktif. Toh saluran ini tetap dapat dikategorikan sebagai tayangan hiburan. Jumlah subscriber Frost Diamond tercatat sudah mencapai 20,7 juta pelanggan. Channel YouTube muncul sejak 22 Januari 2014. Video-video yang tayang di channel ini memiliki banyak penggemar. Alhasil, videonya memikat penonton



hingga 4,4 miliar kali tayang. Malah salah satu video terbarunya sudah ditonton sebanyak 77 ribu kali dalam waktu lima jam setelah penayangan. Sedangkan potensi penghasilan iklan saluran ini berkisar 27.700-442.900 dollar AS setara Rp398 juta-6,36 miliar per bulan.

5. TRANS7 OFFICIAL

Selain Indosiar yang duduk di urutan ke delapan, stasiun TV lainnya yang berada di daftar 10 Youtuber dengan subscriber terbanyak tahun lalu adalah Trans7 di urutan kelima. Saluran ini tercatat memikat pelanggan hingga 21,8 juta akun. Isinya pun sebagian besar merupakan tayang ulang siaran TV. Sedangkan potensi pendapatan iklan saluran ini berkisar sekitar 47.900-767.000 dollar AS setara Rp688 juta-Rp11,01 miliar per bulan.

4. RANS ENTERTAINMENT

Di urutan ke empat tercatat Rans Entertainment sebagai YouTuber dengan 10 subscriber terbanyak di Indonesia. Channel YouTube milik artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Jumlah pengikutnya tercatat sebanyak 22,8 juta. Potensi penghasilan

iklan ini berkisar 48.100-770.400 dollar AS setara Rp691 juta-Rp11,07 miliar per bulan.

3. JESS NO LIMIT

Tayangan game yang paling populer di Indonesia ini, Jess No Limit, berhasil memikat pelanggan hingga 24,1 juta. Pengelolanya, Tobias Justin, sering mengikuti turnamen Mobile Legends dan sering membagikan video dirinya saat bermain game online, juga mengulasnya. Tak kurang dari 1.709 tayangan video tersedia di saluran milik kakak seleb Jessica Jane ini. Daya pikatnya membuat video di saluran ini tayang hingga 2,77 miliar kali. Sedangkan



potensi penghasilan iklannya berkisar 14.700-235.200 dollar AS setara Rp211 juta-Rp3,37 miliar.

2. AH

Berasal dari keluarga Halilintar, Atta Halilintar merupakan yang paling menonjol dengan salurannya sendiri yang duduk di urutan kedua YouTu-



ber dengan subscriber terbanyak di Indonesia tahun lalu. Pelanggannya mendekati angka 29 juta sejak tayang pada 26 Januari 2014. Atta sering membagikan tayangan video kesehatan bersama keluarga dan teman-temannya. Selain itu, ada juga beberapa konten menarik lainnya yang bisa disaksikan di saluran AH ini. Daya pikatnya membuat video di saluran Youtube AH tayang hingga 3,59 miliar kali. Sedangkan potensi penghasilan iklannya berkisar 18.900-302.400 dollar AS setara Rp271-4,34 miliar setiap bulan.

1. RICIS OFFICIAL

Nah, sepanjang 2021 lalu, posisi

pertama Youtuber dengan pelanggan terbanyak adalah Ria Ricis. Jumlah pelanggannya melampaui 29 juta akun per Januari 2022 dan kemungkinan akan bertambah terus. Ria Ricis mulai mengembangkan saluran youtubenya pada 15 Januari 2016. Isinya adalah tayangan video keseharian Ria Ricis bersama orang-orang terdekatnya. pernikahannya pada akhir 2021 boleh jadi membuat popularitasnya semakin meningkat. Yang jelas, daya pikat saluran Ria Ricis membuat videonya tayang hingga 4,48 miliar kali. Sedangkan potensi penghasilan iklan di saluran ini berkisar 40.000 hingga 639.900 dollar AS setara Rp574 juta hingga Rp9,18 miliar per bulan.

Mau mengikuti jejak atau bahkan melampaui catatan para youtuber terkemuka? Pertimbangkan kualitas produk video dan teknologi pembuatan kontennya. Perlu kompetensi pula, dan bukan asal-asalan. ●



TETIRAH PEMIMPIN INDONESIA DAN SINGAPURA

Acaranya bertajuk Leader's Retreat, bolehlah diindonesiakan sebagai tetirah atau pergi sementara waktu. Namun 5th Singapore-Indonesia Leader's Retreat adalah acara serius berkaitan dengan perjanjian bilateral kedua negara yang mencerminkan keunikan hubungan antartetangga di kawasan.

A lhasil, tetirah yang kelima itu menyepakati tiga perjanjian kerja sama strategis bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan secara bersamaan. Pada penyelenggaraan pertemuan Leaders' Retreat di Bintan, Kepulauan Riau, sekitar setengah jam dengan kapal cepat dari dan ke Singapura, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong kembali menegaskan komitmen Indonesia dan Singapura untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara bersahabat.

Di pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 25 Januari 2022 itu, kedua kepala negara menandatangani tiga dokumen kerja sama strategis: persetujuan tentang penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan Indonesia - Singapura (realignment Flight Information Region

- FIR); perjanjian tentang Ekstradisi Buronan (Extradition Treaty); dan Pernyataan Bersama (Joint Statement) Menteri pertahanan RI dan Singapura tentang kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian pertahanan 2007 (joint statement MINDEF Defence Co-operation Agreement).

Mengutip penjelasan resmi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves), sebagaimana persetujuan penyesuaian batas wilayah Informasi penerbangan Indonesia - Singapura, pemberlakuan DCA 2007 juga menunjukkan komitmen Indonesia dan Singapura untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 terkait batas batas kedaulatan dan hak berdaulat negara sesuai prinsip negara kepulauan maupun akomodasi terhadap berbagai kepentingan dari negara yang saling bertetangga dan bersahabat dengan

Indonesia. Lebih jauh, selain ketiga dokumen perjanjian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Senior Minister / Coordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat (exchange of letter) yang akan menjadi kerangka pelaksanaan ketiga dokumen kerja sama strategis Indonesia - Singapura secara simultan.

"Penandatanganan tiga dokumen perjanjian strategis Indonesia - Singapura ini memperkuat dan menyempurnakan kerja sama bidang hukum dan pertahanan keamanan serta merefleksikan penyelesaian konstruktif long-standing issues di antara kedua negara bersahabat," ujar Menko Marves Luhut Pandjaitan di Bintan. Ia juga mengungkapkan, penandatanganan dokumen kerja sama bilateral Indonesia - Singapura ini turut menunjukkan komitmen pemerintah kedua negara dalam menindaklanjuti kesepakatan Leaders' Retreat 2019 melalui koordinasi level kebijakan yang dikomandani oleh Menteri Koordinator kedua negara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Menteri Transportasi Singapura di hadapan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong menandatangani persetujuan penyesuaian batas FIR (Flight Information Region) Jakarta - Singapura. Penandatanganan persetujuan ini menandakan telah selesainya negosiasi bilateral Indonesia - Singapura untuk penyesuaian batas Wilayah Informasi Penerbangan (realignment Flight Information Region - FIR) sesuai hukum internasional.

Negosiasi realignment FIR sendiri telah dilakukan Indonesia dan Singapura sejak 1990-an, namun baru bisa menuju penyelesaian komprehensif sejak beberapa tahun terakhir. Dengan penandatanganan kesepakatan ini, kedua negara masih harus secara bersama menyampaikan kesepakatan batas FIR ini kepada Organisasi Penerbangan Sipil internasional/ICAO untuk disahkan.

"Persetujuan penyesuaian batas FIR Jakarta dan Singapura telah turut men-

egaskan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Sebagai negara pihak UNCLOS 1982, Singapura juga mengakui penerapan prinsip negara kepulauan dalam penentuan batas wilayah negara dan yurisdiksi Indonesia di perairan serta ruang udara di kepulauan Riau dan Bintan," ujar Menhub Budi Karya Sumadi.

Ada lima elemen penting dari kesepakatan tersebut. Pertama, Penyesuaian batas FIR Jakarta yang melingkupi seluruh wilayah teritorial Indonesia sehingga perairan sekitar Kepulauan

tertentu tersebut, ketinggian 37.000 kaki ke atas tetap dikontrol Indonesia. Hal ini agar pengawas lalu lintas udara kedua negara, dapat mencegah fragmentasi dan mengkoordinasikan secara efektif lalu lintas pesawat udara yang akan terbang dari dan menuju Singapura pada ketinggian tertentu tersebut.

Pendelegasian PJP secara terbatas pada area tertentu FIR Jakarta kepada Singapura tentu tidak mengecualikan kewenangan Indonesia untuk melaksanakan aktivitas sipil dan militer



Riau dan Natuna yang sebelumnya masuk dalam FIR Singapura menjadi bagian dari FIR Jakarta. Kedua, Indonesia berhak dan bertanggung jawab atas Penyediaan Jasa Penerbangan (PJP) pada wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia yang selaras dengan batas-batas laut teritorial.

Terkait hal ini, Menhub Budi Karya menjelaskan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura memberikan PJP di sebagian area FIR Indonesia yang berbatasan dengan FIR Singapura. Indonesia akan memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada area tertentu di ketinggian 0-37.000 kaki kepada otoritas penerbangan Singapura. Di area

sesuai kedaulatan dan hak berdaulat di ruang udara Indonesia. Otoritas penerbangan Indonesia tetap mengoordinasikan penerbangan di seluruh area FIR Jakarta.

Ketiga, selain menyepakati pengelolaan ruang udara untuk penerbangan sipil, Singapura juga menyepakati pembentukan kerangka kerja sama Sipil dan Militer guna Manajemen Lalu Lintas Penerbangan (Civil Military Coordination in ATC - CMAC). Tujuannya, untuk memastikan terbukanya jalur komunikasi aktif yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan menempatkan beberapa orang personel sipil dan militer di Singapore

• INFO KHUSUS

Air Traffic Control Centre (SATCC). Hal ini telah tertuang di dalam perjanjian FIR yang telah ditandatangani. Selain itu, sebagai bagian dari delegasi PJP terbatas ini, Otoritas Penerbangan Udara Singapura juga berkewajiban mencegah dan menginformasikan kemungkinan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing kepada otoritas pertahanan udara Indonesia.

Keempat, Singapura juga berkewajiban menyertakan kutipan biaya jasa

Kelima, Indonesia juga berhak melakukan evaluasi operasional atas pemberian pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan oleh Singapura guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ICAO. Penyesuaian batas FIR Jakarta dan Singapura memang berdasar pada hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).

Peraturan perundangan nasional seperti terdapat dalam Undang-

batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.

Pada 1973 silam, ICAO menetapkan batas FIR Singapura melingkupi sebagian ruang udara di atas perairan di sekitar kepulauan Riau dan Natuna. Hal ini dimungkinkan karena ruang udara di atas perairan di sekitar kepulauan Riau dan Natuna, sesuai hukum internasional, masih merupakan laut bebas (high seas) dan ruang udara Internasional. Sebelum pemberlakuan



pelayanan penerbangan yang diberikan kepada pesawat yang terbang dari dan menuju Singapura kepada Indonesia. Pendelegasian PJP ini juga akan diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh Kementerian Perhubungan. Evaluasi terhadap delegasi PJP akan dilakukan terhadap Singapura secara berkala maupun secara melekat dengan penempatan personel Indonesia pada menara pengawas penerbangan udara Singapura.

Undang Nomor 1 Tahun 2009 juga menghendaki agar wilayah informasi penerbangan di atas wilayah Indonesia selaras dengan ruang udara sesuai prinsip negara kepulauan. Sebagaimana diketahui, seiring berlakunya rezim negara kepulauan dalam hukum internasional, batas wilayah informasi penerbangan di atas perairan di sekitar kepulauan Riau dan Natuna yang semula berada dalam tanggung jawab Singapura harus disesuaikan dengan

(entry into force) UNCLOS 1982 di tahun 1994, perairan dan ruang udara yang melampaui tiga mil dari pulau-pulau Indonesia di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna belum merupakan laut teritorial (wilayah) atau bagian dari perairan kepulauan Indonesia kawasan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.

Selain mendapatkan hak pengelolaan ruang udara, Indonesia juga menyepakati kerja sama di bidang hukum.

Indonesia. Kemenko Marves menyebut Indonesia berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati perjanjian ekstradisi yang progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan bentuk dan modus tindak kejahatan di masa sekarang dan masa depan.

Penandatanganan perjanjian ekstradisi akan membuka babak baru kerja sama bidang hukum Indonesia – Singapura. Perjanjian ekstradisi ini juga akan melengkapi dan menyempurnakan komitmen kedua negara sebagai sesama negara ASEAN terkait perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty) yang mengharuskan kerja sama di antaranya terkait pencarian pelaku kejahatan, penggeledahan, maupun penyitaan asset. Perjanjian ekstradisi yang ditandatangani oleh kedua negara memungkinkan dilakukannya ekstradisi terhadap pelaku 31 jenis tindak pidana serta pelaku kejahatan lainnya yang telah diatur dalam sistem hukum kedua negara.

Perjanjian ekstradisi ini juga menyepakati pemberlakuan masa retroaktif hingga 18 tahun terhadap tindak kejahatan yang berlangsung sebelum berlakunya perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura. Perjanjian ekstradisi buronan Indonesia – Singapura ini juga memiliki fitur khusus yang secara efektif akan mengantisipasi celah hukum dan muslihat pelaku kejahatan. Misalnya, perubahan status kewarganegaraan untuk menghindari penegakan hukum. Dalam perjanjian ekstradisi ini, status warga negara pelaku kejahatan yang berubah tidak dapat mengecualikan pelaksanaan ekstradisi mengingat pelaksanaan ekstradisi harus dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan pelaku ketika tindak kejahatan terjadi.

Pemerintah menilai pemberlakuan perjanjian ekstradisi buronan akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak kriminal di Indonesia dan Singapura. Secara khusus, bagi Indonesia, pemberlakuan perjanjian ekstradisi diyakini dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau dan memfasilitasi implementasi Keputusan Presiden RI Nomor

6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Keberhasilan tim negosiasi eksekutif pemerintah Indonesia dalam mendorong perjanjian ekstradisi kedua negara merupakan buah komitmen, konsistensi, dan kerja sama lintas pemangku kepentingan di tingkat Kementerian/Lembaga. Kesepakatan kedua negara terkait ekstradisi ini menyempurnakan secara utuh skema ekstradisi yang pernah didiskusikan secara serius sejak masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

skema persetujuan kerja sama pertahanan 2007 (Defence Cooperation Agreement /DCA 2007).

Secara singkat DCA 2007 menjadi payung kerja sama kedua negara untuk Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara regular mengenai isu-isu keamanan, pertukaran informasi intelijen, termasuk penanggulangan terorisme, kerja sama iptek bidang pertahanan, peningkatan SDM, pertukaran personel militer secara regular, latihan dan operasi bersama, kerja sama SAR dan bantuan kemanusiaan, pembangunan daerah latihan bersama, dan akses latihan militer di wilayah yang di-



(SBY). Diharapkan dengan penandatanganan perjanjian ekstradisi buronan Indonesia – Singapura, kerja sama bidang hukum dan pencegahan kejahatan lintas negara akan semakin efektif, dan menjamin kepentingan serta membawa kemaslahatan bagi kedua negara bersahabat.

Melengkapi paket kesepakatan FIR dan Ekstradisi, Menteri Pertahanan kedua negara menandatangani Joint Statement (pernyataan bersama) yang menuangkan prinsip-prinsip dasar kerja sama di bidang pertahanan yang saling menguntungkan; menghormati kedaulatan, hukum internasional dan nasional. Pernyataan Bersama ini juga meneguhkan komitmen konkret

berikan izin oleh Indonesia. Indonesia melalui Komite Kerjasama Pertahanan yang dibentuk dalam skema DCA akan mengawasi serta mengendalikan berbagai implementasi kerja sama tersebut.

Namun, itu semua pandangan dari kalangan eksekutif pemerintahan Indonesia. Reaksi bermunculan dari kalangan akademisi maupun legislatif. Satu hal, perjanjian bilateral itu masih perlu mendapat ratifikasi dari lembaga legislatif DPR. Dinamika dalam negeri masih akan berlanjut.

Apakah kesepakatan hasil tetirah Kepala Negara Indonesia dan Singapura akan efektif? Masih memerlukan waktu untuk melihatnya. ●

DARI SANCHAYA BINTAN

► Pernyataan Bersama Presiden RI dan PM Singapura

PRESIDEN Republik Indonesia (Joko Widodo)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat datang kembali di Indonesia kepada PM Lee Hsien Loong dan delegasi.

Pertemuan saya dan PM Lee membahas upaya penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, dan saling tukar pandangan mengenai berbagai isu di kawasan.

Pertama, penguatan kerja sama pemulihan ekonomi. Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia. Investasi Singapura di Indonesia pada Januari – September 2021 senilai 7,3 miliar US Dollar. Pertemuan retreat mencatat adanya investasi baru senilai 9,2

miliar US Dollar, antara lain di bidang energi baru terbarukan di sekitar Batam serta Pulau Sumba dan Manggarai Barat, NTT; serta pembangunan hub logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Investasi di bidang energi dan energi terbarukan terus menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Untuk mendukung iklim investasi hijau, dalam rangkaian pertemuan retreat ini telah ditandatangani MoU kerja sama energi, kemudian MoU kerja sama green and circular economy development.

Selain itu, guna terus menjaga stabilitas finansial dan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi telah ditandatangani pula beberapa kerja sama, antara lain MoU kerja sama keuangan, dan pada November 2021

kerja sama local currency bilateral swap agreement dan bilateral repo line telah diperpanjang satu tahun. Saya juga berharap agar MoU antara bank sentral terkait inovasi pembayaran, anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme dapat segera ditandatangani.

Selain itu, guna mendukung mobilitas manusia yang aman kedua negara saat ini sedang memfinalisasi kerja sama pengakuan vaksin dan penyelarasan interoperabilitas platform pelacakan dan perlindungan yang dimiliki kedua negara.

Yang kedua, di bidang politik, hukum, dan keamanan saya menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan antara kedua negara. Exchange of letters antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Inves-



tasi Republik Indonesia dan Menteri Koordinasi untuk Keamanan Nasional Singapura, kemudian perjanjian ekstradisi, kemudian persetujuan flight information region (FIR), dan pernyataan bersama Menteri Pertahanan kedua negara tentang komitmen untuk memberlakukan perjanjian kerja sama pertahanan.

Untuk perjanjian ekstradisi, dalam perjanjian yang baru ini masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun, sesuai dengan Pasal 78 KUHP. Sementara, dengan penandatanganan perjanjian FIR, maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perairan sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna. Ke depan, diharapkan kerja sama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Kemudian yang ketiga, kerja sama pendidikan dan pengembangan sum-

ber daya manusia (SDM). Kerja sama di bidang SDM ini telah menjadi komitmen kedua negara sejak beberapa tahun yang lalu. Untuk tahun 2022, akan dilakukan pelatihan SDM antara Singapura dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk penguatan kapasitas di bidang food industry 4.0 dan supply chain. Kerja sama seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut di berbagai daerah. Untuk skala lebih besar, saya menyambut baik rencana penandatanganan MoU on Human Capital Partnership Arrangement. MoU ini akan memperkuat kerja sama riset dan penguatan kelembagaan, dan pertukaran mahasiswa dalam rangka memperkokoh konsep Kampus Merdeka di Indonesia.

Terakhir, PM Lee dan saya juga melakukan tukar pandangan mengenai beberapa isu kawasan. Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya memperkuat kesatuan, cara kerja, dan kelembagaan ASEAN, agar ASEAN siap menghadapi berbagai tantangan

di masa depan.

Mengenai Myanmar, kita sangat prihatin melihat perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan Five-Point Consensus. Konsensus ini merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua. Kita juga sepakat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar terus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan perlu terus didorong dan diberikan tanpa diskriminasi.

Saya juga menyampaikan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan ASEAN, agar ASEAN lebih tangguh dan mampu merespons berbagai tantangan baru di masa mendatang.

Sekali lagi, terima kasih PM Lee atas pertemuan yang sangat konstruktif ini. Dan sekarang dengan hormat saya mengundang Yang Mulia Perdana Menteri Singapura untuk menyampaikan pandangannya.

Saya persilakan. Terima kasih. •





PERDANA MENTERI SINGAPURA (LEE HSIEN LOONG)

YOUR Excellency, President Joko Widodo;

Ministers;

Ladies and Gentlemen.

I'd like to thank President Joko Widodo for his very warm hospitality to me and my delegation.

Bintan is an apt venue for the Singapore-Indonesia leaders' retreat, given the strong economic and people-to-people links between Singapore and Riau Islands Province (Kepri).

This is my fifth leaders' retreat with President Jokowi. Our last one was held in Singapore in 2019.

Typically, we hold the leaders' retreat annually, but the pandemic disrupted our plans, notwithstanding the President and I have kept in touch regularly. Most recently, we met in October in Rome while attending the G20 Summit.

But it is still important for us to resume the leaders' retreat because it is a

key platform to discuss and make progress on a bilateral agenda. I'm therefore most grateful to the President and his officials for making these excellent arrangements to host my delegation and me.

Today our bilateral relations take a major step forward. I'm very happy that the President and I have just witnessed the signing of a "balanced" set of agreements that addresses three long-standing bilateral issues between Singapore and Indonesia: the Flight Information Region, the Defense Cooperation, and Extradition Of Fugitives. These three issues are important to our two countries. They've been on our bilateral agenda for several decades. We've worked together and discussed them many times before.

In our previous leaders' retreat, President Jokowi and I decided that it was time to decisively settle these long-standing bilateral issues. We endorse

the framework which would address the needs and interests of both sides.

We tasked Coordinating Minister Pak Luhut Panjaitan and Senior Minister and Coordinating Minister Teo Chee Hean to follow up with detailed negotiations.

I'm very glad that we have now achieved what we set out to do. Our two sides have reached agreement on this long-standing bilateral mantis.

When implemented, the FIR (Flight Information Region) Agreement will meet the civil aviation needs of both countries and uphold the safety and efficiency of air traffic in a manner consistent with ICAO (International Civil Aviation Organization) rules.

The Defense Cooperation Agreement will strengthen cooperation between our armed forces and advance our defense relations.

The Extradition Treaty will enhance cooperation in combating crime and

send a clear (and) positive signal to investors.

In addition, we exchanged letters to agree that these three agreements will enter into force simultaneously. What remains will be for both countries to complete our domestic processes to ratify and bring the set of agreements into force.

The conclusion of these agreements demonstrates the strength and maturity of Singapore-Indonesia relations. These agreements take into account both parties interest, represented good balance of benefits, and are durable agreements for the long haul, designed to last for at least a generation, and create a solid foundation to move bilateral relations forward with confidence and trust.

I thank President Jokowi for his leadership and vision, which have brought about this very positive outcome. I also thanked Pak Luhut, SM (Senior Minister) Theo, and the officials on both sides for their tireless work and their shared determination to make progress on these longstanding bilateral issues.

I encourage the ministers and officials to maintain close cooperation and coordination and implement the agreement expeditiously.

President Jokowi and I also discussed the resumption of cross-border travel. Indonesia has resumed tours and travel from Singapore to Bintan and Batam. It implemented a travel bubble to Bintan and Batam, and Singapore will discuss with Indonesia how we can make this bidirectional, and we hope without taking too long.

President Jokowi and I agreed to continue discussions also to expand air and sea travel more generally to more destinations in Indonesia. But we have to take into account the Covid situation, and in particular the outbreak of the Omicron variant. And we will do so at a pace that both sides are comfortable with, taking into account our respective public health situations.

We also reviewed our ongoing bilateral cooperation's. As the President noted, Singapore has consistently been Indonesia's top foreign investor since 2014. And despite the pandemic,

our investments have grown.

At the last leaders' retreat, we signed a bilateral investment treaty which has entered into force. This will build investors' confidence and contribute to economic growth and jobs growth.

And the Kendal Industrial Park, which the President and I jointly opened at our 2016 retreat, is doing well. It has attracted USD1.6 billion in investment and will create many thousands of jobs.

Our Finance Ministries and Central Banks are also strengthening institutional linkages to deepen financial co-operation.

And Singapore and Indonesia are at the same time, beside these existing areas, also exploring new areas of collaboration, such as sustainability, a green economy, a digital economy, and human capital development. And

adopted in Jakarta, in April last year.

We are committed to help Myanmar reach a durable and peaceful resolution in the interests of its people. But it is essential for the ASEAN Chair and his Special Envoy to engage all parties involved. We also need to see progress in the delivery of humanitarian assistance.

Singapore will continue to work with the ASEAN Chair Cambodia and the next Chair, which is Indonesia, and as well as other ASEAN member states on the full implementation of the Five-Point Consensus and other relevant decisions.

I also thank President Jokowi for inviting Singapore to this year's G20 Meetings. We look forward to supporting Indonesia's G20 Chairmanship and making it a success.

We are very grateful that President Jokowi has hosted a successful and



I'm happy that our officials are already meeting to discuss cooperation on sustainability

We have formalized cooperation on green and circular economy development, on energy cooperation, and exchanges between our students and educators.

We also discussed the regional developments, in particular Myanmar where the situation remains serious. We noted that no significant progress has been made implementing ASEAN's Five-Point Consensus since it was

fruitful leaders' retreat. It shows that our bilateral relationship is in good working-order. Our two countries are able to work together in challenging circumstances and resolve long-standing issues in an open and constructive manner.

I'm confident that we will build on these strong foundations and develop new areas of collaboration to benefit future generations. I look forward to working closely with the President to take our bilateral relations to greater heights. ●



MASIH MENUNGGU RATIFIKASI DPR

Tiga kesepakatan telah ditandatangani oleh eksekutif pemerintahan Indonesia dan Singapura. Efektivitasnya masih menunggu ratifikasi (pengesahan perjanjian internasional di lingkup nasional) oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Apakah ratifikasi tiga kesepakatan antara Indonesia dan Singapura akan berlangsung mulus? Pengalaman sebelumnya tidak demikian.

Pada 2007 lalu, misalnya, Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi serupa. Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Hassan Wirajuda, dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo menandatangani di Istana Tampaksiring, Bali. Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan itu.

Namun kesepakatan di Tampaksiring itu tak kunjung efektif karena

belum ada ratifikasi parlemen kedua negara. Alasan kedua negara belum meratifikasi perjanjian adalah karena pemerintah Indonesia-Singapura sepakat agar pengesahan perjanjian ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan perjanjian kerja sama keamanan Indonesia-Singapura. Sedangkan Komisi I DPR RI periode 2004-2009 akhirnya menolak ratifikasi perjanjian ini.

Oleh sebab itu, kesepakatan ekstradisi, juga soal wilayah informasi penerbangan (flight information regions, FIR), serta kesepakatan kerja sama bidang pertahanan (defence cooperation agreement, DCA) antara Indonesia dan Singapura merupakan

ganjalan dalam hubungan antarnegara di kawasan.

Terbukti, selain tiga kesepakatan itu, sejumlah kesepakatan lain juga ditandatangani dalam tirah di Bintan pada awal 2022 ini. Selain tiga perjanjian yang menjadi ganjalan tadi, Indonesia dan Singapura juga menjajaki area kerja sama baru, seperti perlindungan lingkungan, ekonomi hijau, ekonomi digital, dan pengembangan sumber daya manusia

"Singapura secara konsisten menjadi investor asing utama Indonesia sejak 2014. Dan meskipun ada pandemi, investasi kami telah tumbuh," kata PM Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, Selasa, 25 Januari 2022.

Lebih dari itu, kedua negara juga menandatangani beberapa perjanjian bilateral lainnya di Resort Sanchaya Bintan itu. Antara lain, Kementerian keuangan Singapura dan Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) tentang kerjasama keuangan dan ekonomi. Nota Kesepahaman ini mencakup bidang kolaboratif tradisional seperti kerja sama bea cukai dan kebijakan fiskal, serta bidang yang sedang berkembang seperti layanan keuangan, keuangan iklim, dan ekonomi digital.

Bank sentral kedua negara juga telah menandatangani MOU untuk memperkuat kerja sama bilateral dan memperdalam hubungan. MOU mempromosikan kolaborasi pada proyek-proyek yang terkait dengan inovasi pembayaran, dan meresmikan kerja sama di berbagai fungsi bank sentral dan regulasi yang diperluas, kata Otoritas Moneter Singapura dan Bank Indonesia.

Kementerian Lingkungan hidup Singapura dan Kementerian PPN/Bappenas juga menandatangani MOU tentang kemitraan dalam pengembangan ekonomi hijau dan sirkular. Area kerja sama yang potensial mencakup pengoptimalan sumber daya dan inisiatif daur ulang untuk menangani limbah elektronik, makanan, dan kemasan termasuk plastik.

Kedua negara juga menandatangani MOU kerjasama energi untuk transisi energi lebih lanjut di kedua negara dan kawasan. Selain itu, Kementerian Pendidikan Singapura (MOE) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia telah menandatangani Human Capital Partnership Arrangement (HCPA) untuk memperdalam kerja sama pendidikan dan hubungan kemitraan pendidikan negara dan siswa kedua negara.

"HCPA juga akan memperluas peluang bagi mahasiswa Singapura dan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pertukaran dan magang di luar negeri, sehingga dapat memperdalam pemahaman mereka tentang negara masing-masing dan mempersiapkan mereka untuk terlibat lebih baik di kawasan ini.

Nah, bagaimana dengan tiga per-

janjian yang menjadi ganjalan tadi? Untuk soal FIR, misalnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan, saat ini perjanjian tersebut belum dapat diakses oleh publik. "Bila saatnya perjanjian ini hendak disahkan DPR maka publik akan mendapat akses," ujar Hikmahanto, Rabu, 26 Januari 2022.

Sedangkan kalangan parlemen masih akan mempelajari dulu kesepakatan eksekutif Indonesia-Singapura dalam tetirah di Bintan itu. Perjanjian

ra," kata Wakil Ketua Umum PPP ini, Rabu, 26 Januari 2022.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyoroti kesepakatan FIR dan DCA. Menurut dia, DPR menunggu tindak lanjut pemerintah untuk meratifikasi perjanjian itu di DPR.

"Kami tidak ingin berspekulasi karena progress soal DCA ini belum ada laporan dari pemerintah untuk diratifikasi, sedangkan soal izin latihan militer udara juga akan kami tanyakan, apakah itu mengganggu prinsip kedaula-



ekstradisi mendapat perhatian dari Anggota Komisi III DPR Arsul Sani.

"Kalau perjanjian ekstradisi itu benar-benar berbasis resiprositas, artinya kemanfaatan timbal balik antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Jangan kemudian tidak dikaitkan dengan perjanjian lainnya yang hanya menguntungkan katakanlah Singapu-

tan wilayah udara kita sesuai Pasal 5 UU 1/2009 dan pasal 1 konvensi Chicago 1944 yaitu utuh dan penuh," kata Bobby, Jumat, 28 Januari 2022.

Akhirnya, apa yang tertuang, tertulis, dan tersirat dalam perjanjian memang perlu pendalaman. Meskipun perjanjian dengan negara tetangga, yang juga telah banyak membantu kita. •

RISIKO

Gunawan Effendi

Suka atau tidak, setiap awal tahun, World Economic Forum (WEF), akan menjadi pusat perhatian global. Lembaga tempat bertemunya aneka gagasan kalangan bisnis dan pemerintahan dari berbagai belahan dunia itu menjadi salah satu acuan penting bagi agenda ekonomi dan politik. Untuk mengikuti atau menentanginya sekalipun. Sejak 2006.

Sebelum pertemuan, WEF mengeluarkan hasil survei tahunannya tentang persepsi risiko global pada tahun berjalan dan ke depannya. Laporan survei tahunan ke-17 menyelipkan pandangan lebih dari 12.000 pemimpin tingkat negara yang mengidentifikasi risiko jangka pendek yang kritis terhadap 124 negara. Kemudian terkumpul menjadi Survei Opini Eksekutif WEF. Surveinya berlangsung Mei-September 2021.

Jadi setiap negara terwakili oleh sekitar seratus orang. Terdiri dari para ahli berbagai bidang, pengusaha, maupun para pemimpin politik.

Ada lima bidang utama yang menjadi fokus perhatian survei persepsi risiko kali ini. Masing-masing adalah ekonomi, lingkungan hidup, geopolitik, masyarakatan, dan teknologi. Lima bidang tadi selanjutnya terurai masing-masing memiliki tujuh cabang.

Pengantar laporan survei itu mengemukakan, bidang dan cabang yang disorot di setiap negara kemungkinan akan menginformasikan pengambilan keputusan nasional dan memberikan perspektif tentang bagaimana prioritas risiko jangka pendek dalam negeri dapat dibandingkan dengan risiko dan perspektif global. Dengan demikian, memang terbuka kemungkinan perbedaan antara persepsi risiko global dan di tingkat nasional. Setidaknya Indonesia menunjukkan perbedaan itu.

Secara global, laporan itu menunjukkan dari lima bidang utama, persepsi risiko yang paling dianggap riskan didominasi oleh lingkungan hidup dan ekonomi. Dari 10 risiko yang dianggap paling tinggi untuk 10 tahun ke depan, secara berurutan adalah kegagalan tindakan terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kepunahan ragam hayati, penurunan keadilan sosial, krisis pekerjaan dan nafkah, penyakit infeksi, kerusakan lingkungan

oleh manusia, krisis sumber daya alam, krisis utang, dan konfrontasi geoekonomi.

Nah, berbeda dengan persepsi tentang risiko global, hasil survei persepsi risiko tingkat nasional di Indonesia menunjukkan lima peringkat tertingginya secara berurutan adalah krisis utang global dan kerusakan lingkungan oleh manusia (sama-sama di peringkat pertama). Menyusul masalah lapangan kerja dan nafkah di urutan ketiga. Sedangkan urutan keempat dan kelima masing-masing adalah geopolitisasi sumber daya strategis dan kegagalan menerapkan aturan keamanan siber (cybersecurity).

Survei itu menggambarkan krisis utang sebagai kondisi keuangan perusahaan maupun anggaran publik kewalahan oleh akumulasi utang maupun pembayarannya, menyebabkan kebangkrutan massal, gagal bayar, kegagalan penyelamatan bisnis, krisis likuiditas maupun krisis utang negara. Sedangkan risiko lapangan kerja dan nafkah yang menjadi bagian dari bidang masyarakatan adalah menurunnya prospek lapangan kerja maupun standard usia kerja: pengangguran, setengah pengangguran, upah lebih rendah, perjanjian kerja yang rapuh, penurunan hak pekerja dan masalah terkait.

Sementara geopolitisasi sumber daya adalah pemusatan, eksploitasi, maupun pembatasan mobilitas oleh arus barang, pengetahuan, jasa, atau teknologi yang penting bagi pembangunan manusia dengan maksud untuk memperoleh keuntungan geopolitik. Sedangkan keamanan siber adalah kondisi infrastruktur maupun tindakan keamanan siber kalangan bisnis, pemerintah, dan rumah tangga dikalahkan atau menjadi usang oleh kejahatan siber yang semakin canggih dan sering, yang mengakibatkan gangguan ekonomi, kerugian finansial, ketegangan geopolitik, maupun ketidakstabilan sosial.

Persepsi risiko memang merupakan data yang tersimpan dalam ingatan. Namun, bukankah ingatan itu berdasarkan kenyataan maupun pengalaman? Akhirnya, upaya mitigasi untuk mengelola dan menghindari dampak destruktifnya jauh lebih penting. Sekarang dan selanjutnya. Suka atau tidak suka. ●

Hong Kong SAR, China	Asset bubble bursts in large economies	Prolonged economic stagnation	Infectious diseases	Intestate conflict	Erosion of social cohesion
Hungary	Failure to stabilize price expectations	Extreme weather events	Climate action failure	Infectious diseases	Fracture of interstate relations
Iceland	Asset bubble bursts in large economies	—	Collapse of a systemically important industry	Failure of cybersecurity measures	—
India	Fracture of interstate relations	Debt crises in large economies	Widespread youth disillusionment	Failure of technology governance	Digital inequality
Indonesia	Debt crises in large economies	—	Employment and livelihood crises	Geopolitization of strategic resources	Failure of cybersecurity measures
Iran	Employment and livelihood crises	Widespread youth disillusionment	Prolonged economic stagnation	Natural resource crises	Biodiversity loss and ecosystem collapse
Ireland	Climate action failure	—	Fracture of interstate relations	Debt crises in large economies	—
Israel	Failure of cybersecurity measures	—	Asset bubble bursts in large economies	Prolonged economic stagnation	—
—	Terrorist attacks	—	—	Failure of cybersecurity measures	Weapons of mass destruction

nfo indonesia

www.infoindonesia.id

Network



INFO PASANG
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel



Koran Cetak Info Indonesia

 www.infoindonesia.id

 facebook @infoindonesia.id  twitter @_infoindonesia

 Instagram @info_indonesia.id  YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id



info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

EDISI #17 FEBRUARI 2022



Rp75.000,-

PROGRAM
DESA BRILIAN
TERUS
BERJALAN

USAHA PEMKOT
TANGSEL DALAM
PENANGANAN
COVID-19

KAWAL
PEMBANGUNAN
UNTUK
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

PERTUMBUHAN
EKONOMI SUMSEL
MELAMPAUI
NASIONAL

NAMA AHOK MENCUAT LAGI

SEJARAH BARU
PERTAMINA
MANDALIKA
CIRCUIT

